

# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024, disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan dimaksud, LKPJ disampaikan ke DPRD untuk selanjutnya dibahas, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Banten.

LKPJ Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 ini memuat informasi pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Selain itu, dalam laporan ini juga disampaikan informasi berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Banten.

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari semua pihak atas terselesaikannya penyusunan LKPJ Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 ini, semoga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten pada masa yang akan datang.

Serang, 21 Maret 2025

Gubernur Banten

Andra Soni

# **DAFTAR ISI**

			Hale				
		NTAR					
DAFTAR	R ISI						
BAB I	PENDAHULUAN						
	1.1	LATAR BELAKANG					
	1.2	DASAR HUKUM					
	1.3	VISI DAN MISI					
	1.4	DATA UMUM DAERAH					
		1.4.1 Data Geografis Wilayah					
		1.4.2 Jumlah Penduduk					
		1.4.3 Pertumbuhan Penduduk					
		1.4.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)					
		1.4.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan					
		1.4.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja					
		1.4.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan					
BAB II	PER	UBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI BANTEN					
		UN ANGGARAN 2024					
	2.1	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
		2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah					
		2.1.2 Strategi Pendapatan Daerah					
		2.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah					
	2.2	PENGELOLAAN BELANJA DAERAH					
		2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah					
		2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	-				
	2.3	PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH	-				
		2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah	-				
		2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah	]				
BAB III	HAS	IL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN					
		G MENJADI KEWENANGAN DAERAH	-				
	3.1	CAPAIAN INDIKATOR MAKRO					
		3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia					
		3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi					
		3.1.3 Persentase Penduduk Miskin					
		3.1.4 Tingkat Pengangguran					
		3.1.5 Indeks Gini	•				
		3.1.6 Inflasi	I				
	3.2	CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024	n				

	3.3	CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN	
		2024	III-20
	3.4	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	
		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN	
		2024	III-136
	3.5	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI	
		BANTEN ATAS LKPJ GUBERNUR BANTEN TAHUN	
		ANGGARAN 2023	III-144
<b>BAB IV</b>	CAP	AIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
	DAN	PENUGASAN	IV-1
	4.1	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-	
		PEMBANTUAN	IV-1
		4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan	
		Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya	IV-1
		4.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah	
		Anggaran	IV-2
		4.1.3 Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Pembantuan	IV-2
		4.1.4 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan	
		Yang Diterima Dari Pemerintah tingkat Bawahnya	IV-10
	4.2	HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM	
		PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA	
		PENYELESAIAN	IV-10
BAB V	PEN	UTUP	V-1

# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, berkenaan dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya serta dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan strategis lainnya.

Sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penyusunan LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2022. Pada tahun ini, fase Pelaksanaan RPD Provinsi Banten

Tahun 2023-2026 merupakan tahun kedua, yang secara kebijakan telah dilaksanakan melalui:

- Penetapan RKPD Tahun 2024 dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024:
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian atas hasil pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud merupakan bentuk kolaborasi dan sinergitas antara Pj.Gubernur dengan DPRD sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah dan juga seluruh masyarakat Provinsi Banten.

# 1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dan Peraturan;
- 19. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

# 1.3. VISI DAN MISI

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan Visi pembangunan dalam RPJPD 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah "Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa". Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu

- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
- 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Secara Merata dan Berkeadilan:
- 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
- 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

# 1.4. DATA UMUM DAERAH

# 1.4.1. Data Geografis Wilayah

Dari sisi astronomis, wilayah Provinsi Banten berada pada batas 105°01'11"-106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50"-07°01'01" Lintang Selatan. Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa (berbatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota Negara, DKI Jakarta) sehingga menambah posisi geostrategis Provinsi Banten sebagai pintu gerbang jalur perdagangan Pulau Jawa dan Sumatera. Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan bagian timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.1
Peta Wilayah Provinsi Banten
Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

Provinsi Banten memiliki luas 9.352,77km² atau sekitar 0,51 persen dari luas daratan Indonesia. Berarti, Banten adalah provinsi dengan luas wilayah terkecil kelima di Indonesia setelah Kepulauan Riau (0,43%), Bali (0,30%), DI Yogyakarta (0,16%) dan DKI Jakarta (0,03%). Provinsi Banten secara umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 257,93 meter di atas permukaan laut (mdpl), serta memiliki beberapa gunung dengan ketinggian mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) wilayah kabupaten dan 4 (empat) kota dengan rincian luas daratan masing-masing kabupaten/kota, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang 2.771,414 km², Kabupaten Lebak 3.312,180 km², Kabupaten Tangerang 1.027,757 km², Kabupaten Serang 1.469,908 km², Kota Tangerang 178,347 km², Kota Cilegon 162,514 km², Kota Serang 265,787 km², dan Kota Tangerang Selatan 164,860 km². Rincian secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Banten menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (kilo meter persegi)	Persen
1	Kabupaten Pandeglang	2.771,414	29,63
2	Kabupaten Lebak	3.312,180	35,41
3	Kabupaten Tangerang	1.027,757	10,99
4	Kabupaten Serang	1.469,908	15,72
5	Kota Tangerang	178,347	1,91
6	Kota Cilegon	162,514	1,74

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (kilo meter persegi)	Persen	
7	Kota Serang	265,787	2,84	
8	Kota Tangerang Selatan	164,860	1,76	
	PROVINSI BANTEN	9.352,767	100,00	

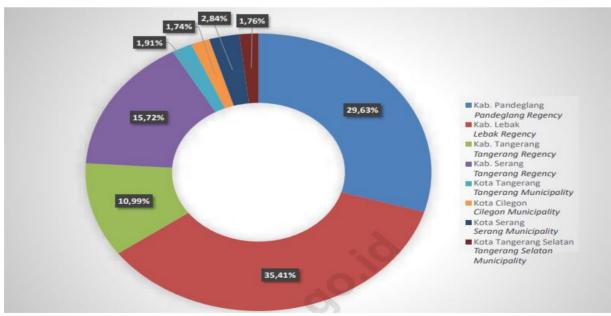
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Rincian luas wilayah, jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Pembagian Wilayah Provinsi Banten menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)	Pusat Pemerintahan	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Kabupaten					
Pandeglang	22.771,414	Pandeglang	35	326	13
Lebak	3.3102,180	Rangkasbitung	28	340	5
Tangerang	1.027,757	Tigaraksa	29	246	28
Serang	1.469,908	Ciruas Kota	29	326	-
Kota					
Tangerang	178,347	Tangerang	13	-	104
Cilegon	162,514	Purwakarta	8	-	43
Serang	265,787	Serang	6	-	66
Tangerang Selatan	164,860	Pamulang	7	-	55
Provinsi Banten	9.352,77	Kota Serang	155	1.238	314

Kabupaten/Kota dengan wilayah paling luas di Provinsi Banten adalah Kabupaten Lebak dengan persentase luas wilayah sebesar 35,46% dari luas Provinsi Banten. Sedangkan Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,76% dan 1,74%. Gambar berikut ini menyajikan proporsi luas masingmasing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Gambar 1.2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

Untuk kondisi topografi, wilayah Provinsi Banten bervariasi dari dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) hingga perbukitan terjal, dengan ketinggian berkisar antara 0 mdpl sampai 1.000 mdpl. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Provinsi Banten dikelompokkan dalam kelas ketinggian sebagai berikut:

- Ketinggian 0 200 mdpl (dataran rendah), meliputi daerah Kota Cilegon, Kota
   Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang.
- Ketinggian 201 2.000 mdpl; meliputi daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang
- Ketinggian 501 2.000 mdpl; meliputi daerah Lebak Timur yang terdapat di Puncak
   Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Sedangkan berdasarkan morfologinya, dataran rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 mdpl sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0-1 mdpl. Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah – Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 mdpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketingian maksimum 553 mdpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi. Kondisi kemiringan lahan di Provinsi Banten terbagi menjadi tiga kondisi yang ekstrim yaitu:

- Dataran (kemiringan 0 15%); sebagian besar terdapat di daerah Utara Provinsi Banten, yang tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yaitu di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang hingga Kabupaten Lebak.
- Perbukitan landai-sedang (kemiringan < 15% dengan tekstur bergelombang rendah-sedang); sebagian besar terdapat di bagian utara yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian utara Kabupaten Pandeglang.</li>
- Daerah perbukitan terjal (kemiringan < 25%); terdapat di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.

Untuk klimatologi Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Muson dan Gelombang La Nina atau El Nino. Saat musim penghujan (November - Maret) cuaca didominasi oleh angin Barat (dari Sumatera,

Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Sedangkan pada bulan Agustus cuaca didominasi oleh angin timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang cukup ekstrim terutama di wilayah bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino.

Berdasarkan pengamatan sepanjang tahun 2024, unsur iklim yang tercatat di empat Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Provinsi Banten tercatat memiliki:

- Suhu udara minimum 23,6°C dan maksimum adalah 35,40°C
- Kelembaban udara minimum 40,00% dan kelembaban udara maksimum adalah 97,00%.
- Angin rata-rata adalah 2,70 meter/detik dan maksimum 19,00 meter/detik.
- Tekanan udara rata-rata adalah 1.008,50 mb.
- Curah hujan rata-rata tercatat 2.977,8 mm dengan jumlah hari hujan 155 hari.

Struktur geologi Provinsi Banten terdiri dari formasi batuan dengan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter dimana tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200-800 meter. Formasi dengan satuan tertua ialah formasi Bojongmanik yang diperkirakan berusia Miosen akhir, dengan batuan yang terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasiran, batu gamping, batu pasir tufaan, konglomerat dan breksi andesit, yang dimana umurnya diduga Pliosen awal. Berikutnya ditemukan Formasi Cipacar yang terdiri dari *tuff* batu apung berselingan dengan lempung tufaan, konglomerat dan napal glaukonitan, yang dimana umurnya diperkirakan Pliosen akhir. Di atas formasi ini ialah Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasiran, lempung pasiran, batu gamping kokina dan *tuff*.

Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan aluvium yang diperkirakan berumur mulai Miosen awal hingga Resen. Adapun satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen dan terdiri dari tiga anggota yakni konglomerat, batu lempung dan batu gamping. Selanjutnya adalah Formasi Cicaruruep, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimapang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan Formasi Cikotok.

Batuan Gunung Api, dapat dikelompokan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Plistosen Tua hingga Holosen. Batuan terobosan yang dijumpai bersusunan andesiot hingga basal. Tuff Cikasungka diperkirakan berumur Plistosen, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuarter. Pada peta lembar Leuwidamar tersaji singkapan batuan metamorf yang diperkirakan berumur Ologo Miosen dan terdiri dari Sekis, Genes dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Dorit Kuarsa diperkirakan berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit diperkirakan berumur

Miosen akhir serta Basal berumur kuarter. Batuan endapan termuda ialah aluvium serta endapan pantai yang dapat berupa kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang kerangan, gosong pantai dan gamping terumbu.

Secara hidrologi di wilayah Provinsi Banten terdapat menjadi enam Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

- DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);
- DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
- DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
- DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Teluklada, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Selain itu, di wilayah Provinsi Banten terdapat 5 satuan Cekungan Air Tanah (CAT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, antara lain CAT Labuan, CABT Rawadano dan CAT Malingping dan lintas provinsi yang meliputi CAT Serang – Tangerang dan CAT Jakarta. Keberadaan CAT ini selain sebagai sumber air, tetapi juga memiliki potensi bahaya likuefaksi. Terjadinya likuefaksi tergantung pada kedalaman air tanah dan porositas litologinya. Kejadian gempa dengan intensitas tertentu akan memicu terjadinya likuefaksi pada daerah cekungan air tanah yang memiliki kedalaman yang dangkal dengan litologi berupa material lepas (*porous*).

# 1.4.2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Jumlah Penduduk Banten sampai dengan Semester II Tahun 2024 tercatat 12.881.374 jiwa terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya sejumlah 500.276 jiwa, terinci pada tabel dibawah ini.

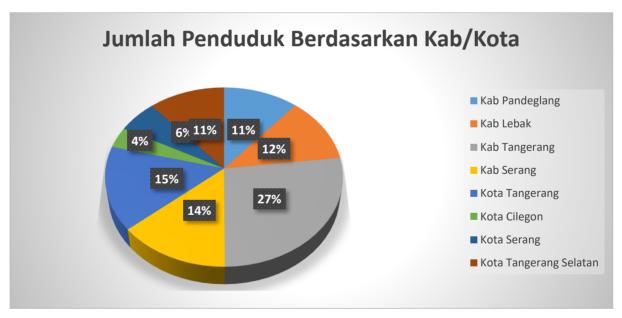
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Tahun 2021 - 2024 Provinsi Banten

	Ju	ппап ге	Hauauk	ranun 20	121 - 2024	+ LIOVIIIS	or Danten		
KABUPATEN/ KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL				
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	670.356	714.400	738.650	636.734	677.646	698.396	1.307.090	1.392.046	1.437.036
Kab Lebak	737.495	762.128	786.683	696.358	722.457	744.881	1.433.853	1.484.585	1.531.564
Kab Tangerang	1.713.548	1.672.223	1.761.008	1.638.924	1.614.197	1.698.698	3.352.472	3.286.420	3.459.706

KABUPATEN/	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL				
KOTA	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kab Serang	857.951	875.574	913.981	820.964	842.928	877.814	1.678.915	1.718.502	1.791.795
Kota Tangerang	975.709	955.333	983.453	954.847	944.181	973.896	1.930.556	1.899.514	1.957.394
Kota Cilegon	228.454	234.937	243.024	221.817	229.779	237.354	450.271	464.716	480.378
Kota Serang	368.031	371.981	387.152	352.331	358.549	372.777	720.362	730.530	759.929
Kota Tangerang Selatan	689.497	700.754	729.068	688.969	704.031	734.539	1.378.466	1.404.785	1.463.607
Provinsi Banten	6.241.041	6.287.330	6.543.019	6.010.944	6.093.768	6.338.355	12.251.985	12.381.098	12.881.374

Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2024

Menurut data tahun 2024, Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang tersebar pada 8 (delapan) kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten/Kota sebagai berikut: Jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjumlah 1.531.564 jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berjumlah 1.437.036 jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Serang berjumlah 1.791.795 jiwa; jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.459.706 jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang berjumlah 1.957.394 jiwa; jumlah penduduk Kota Cilegon berjumlah 480.378 jiwa; jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 759.929 jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.463.607 jiwa.



Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten

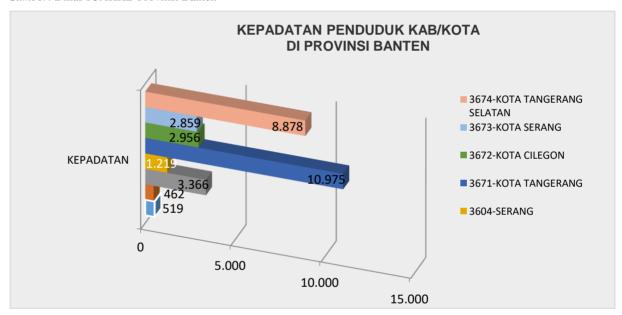
Gambar. 1.3 Sebaran Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota tahun 2024

Komposisi penduduk berdasarkan wilayah Tahun 2024 menunjukkan kepadatan penduduk Banten yang didominasi oleh wilayah Kota Tangerang dengan kepadatan penduduk 10.724 jiwa/km². Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil berada pada Kabupaten Lebak dengan kepadatan penduduk 451 jiwa/km². Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut:

Tabel 1.4 Sebaran Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2024

PROVINSI/KAB/KOTA	PENDUDUK	LUAS WIL	KEPADATAN
36-BANTEN	12.881.374	9.352,77	1.377
3601-PANDEGLANG	1.437.046	2.771,41	519
3602-LEBAK	1.531.564	3.312,18	451
3603-TANGERANG	3.459.706	1.027,76	3.220
3604-SERANG	1.791.795	1.469,91	1.177
3671-KOTA TANGERANG	1.957.349	178,35	10.724
3672-KOTA CILEGON	480.378	162,51	2.894
3673-KOTA SERANG	759.929	265,79	2.768
3674-KOTA TANGERANG SELATAN	1.463.607	164,86	8.581

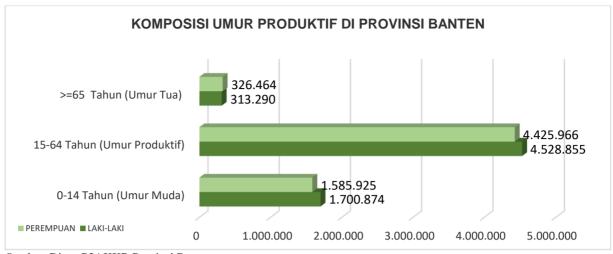
Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten



Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten

Gambar 1.4 Kepadatan Penduduk Kab/Kota Provinsi BantenTahun 2024

Pada tahun 2024, komposisi umur di Provinsi Banten terbagi menjadi 3 yaitu umur produktif, umur tua, dan umur muda. Untuk umur produktif di Banten jatuh pada usia 15 – 64 tahun dengan jumlah 8.954.821 jiwa, umur tua adalah penduduk dengan usia 65 tahun keatas dengan jumlah penduduk 639.754 jiwa, dan umur muda yang tergolong dari usia 0 – 14 tahun dengan jumlah penduduk 3.286.799 jiwa.

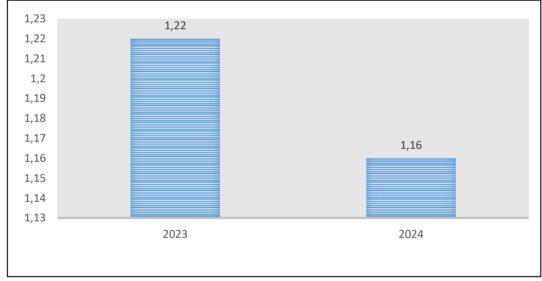


Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten

Gambar 1.4 Komposisi Umur Produktif di Provinsi BantenTahun 2024

# 1.4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di dua tahun terakhir menunjukan terjadi penurunan pertumbuhan penduduk. Di tahun 2023 pertumbuhan sebesar 1,22% dan di tahun 2024 pertumbuhan senilai 1,16%. Terjadi penurunan sebesar 0,06 persen dapat dilihat dari gambar dibawah ini



Sumber: BPS Banten

Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk 2023-2024 Provinsi Banten

Selain pertumbuhan penduduk, penggambaran kenaikan jumlah penduduk bisa dengan angka *Total Fertility Rate* (TFR) didefinisikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. Berikut gambaran TFR Provinsi Banten dan Kab/Kota. TFR Provinsi Banten tahun 2023 berdasarkan data dari siperindu BKKBN sebesar 1,96, TFR paling besar ada di Kabupaten Pandeglang dengan nilai 2,16 dan

TFR paling kecil ada di Kota Tangerang Selatan dengan nilai 1,71. TFR ini merupakan suatu ukuran bagi pemerintah untuk melihat jumlah kelahiran total.

Penambahan jumlah penduduk ini akan ditandai dengan adanya bonus demografi tentu dapat menjadi kesempatan dan tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Bonus demografi yang dimiliki dapat ditunjang dengan kenaikan cakupan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat di Provinsi Banten (pendidikan dapat diakses secara merata dengan kualitas yang mumpuni) serta peningkatan kesempatan bekerja dengan membuka lowongan pekerjaan di Provinsi Banten.

# 1.4.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Banten. Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada tahun 2024 **sebanyak 10.692 orang**. Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci PNS Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan dan tingkat pendidikan.

# 1.4.4.1. PNS Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin

Kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang. Pada tahun 2024, jumlah ASN di lingkup Provinsi Banten sebesar 10.692, dengan rincian sebanyak 5.390 orang atau 50 persen berjenis kelamin Laki-laki dan 5.302 ASN atau 50 persen berjenis kelamin perempuan.

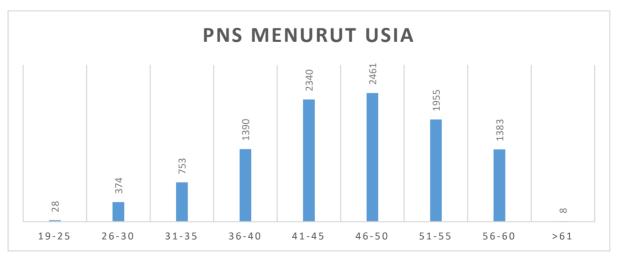


Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, diolah

Gambar 1.6 PNS Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin

# 1.4.4.2. PNS Provinsi Banten Berdasarkan Usia

PNS Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang berjumlah 10.692 orang terdistribusi di 33 Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dari total PNS tersebut, kelompok usia 41-50 tahun masih mendominasi jumlah PNS berdasarkan usia dengan jumlah 4801 orang, sedangkan usia 51-55 tahun sebanyak 1.955 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok pegawai tersebut akan pensiun dalam kurun waktu 3-7 tahun mendatang. Sebagai upaya antisipasi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus sudah siap dengan upaya perekrutan pegawai baru, baik itu yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelamar umum maupun melalui perpindahan guna memenuhi kebutuhan organisasi. Secara rinci data PNS Banten berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, diolah

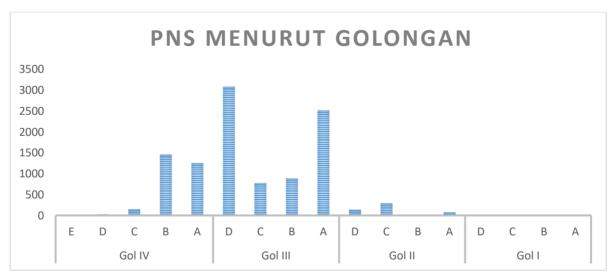
Gambar 1.7 PNS Provinsi Banten Berdasarkan Usia

Berdasarkan Gambar 1.7 PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten didominasi usia 40 tahun ke atas dengan jumlah sebanyak 8.147 pegawai. Adapun jumlah PNS berusia 19-40 tahun sebanyak 2.545 pegawai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan usia PNS yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kompetensi PNS di setiap kelompok usia PNS. PNS diharapkan dapat memiliki kualitas diri yang lebih inovatif, kreatif dan visioner dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong birokrasi yang ada menjadi birokrasi yang lebih responsif dan adaptif.

# 1.4.4.3. PNS Provinsi Banten Berdasarkan Golongan Ruang

Distribusi pegawai antar golongan secara proporsional dapat menunjang peningkatan profesionalisme PNS. Gambar 1.8 menunjukkan komposisi PNS Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan golongan ruang.

Berdasarkan Gambar 1.8, diketahui bahwa komposisi PNS Provinsi Banten sebagian besar merupakan pegawai golongan III dengan jumlah 7.259 PNS atau 68%, diikuti dengan golongan IV dengan jumlah 2.902 PNS atau 27%, dan golongan II sebanyak 517 PNS atau 4,8% dan golongan I berjumlah 14 orang 0,2%.

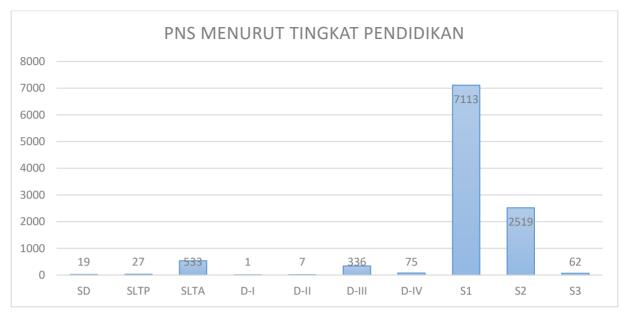


Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, diolah

Gambar 1.8 PNS Provinsi Banten Berdasarkan Golongan Ruang

# 1.4.4.4. PNS Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan

Secara umum kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai apabila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir. Kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten menurut tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagaimana gambar berikut:



Sumber: diolah BKD Provinsi Banten Tahun 2024

Gambar 1.9 PNS Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Gambar 1.9 sebagian besar tingkat pendidikan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten berpendidikan Sarjana (S1) dan hal ini terus mengalami kenaikan dimana di tahun 2024 tercatat sebanyak 7113 ASN berpendidikan S1. ASN berpendidikan Magister/Pascasarjana (S2) sebanyak 2.519 orang. Dapat diketahui bahwa sebanyak 62 orang ASN telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Doktoral (S3) bertambah 14 orang ASN yang menyelesaikan pendidikan S3 nya di tahun 2024 ini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat potensial untuk memenuhi kinerja yang ditargetkan.

# 1.4.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Banten terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Adapun realisasi pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	<b>T</b> I •	ъ .	Realisasi		
Reekening	Uraian	Pagu Anggaran	Rupiah	%	
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI	9.211.948.237.039,00	9.024.826.805.361,95	97,97	
	DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah	8.614.911.017.911,00	8.552.409.195.856,00	99,27	
4.1.02	Retribusi Daerah	228.333.727.283,00	238.989.988.257,50	104,67	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan	51.909.734.739,00	51.909.734.739,00	100,00	
	Daerah yang Dipisahkan				

Kode	TI	D A	Realisasi		
Reekening	Uraian	Pagu Anggaran	Rupiah	%	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	316.793.757.106,00	181.517.886.509,45	57,30	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.189.827.239.115,00	3.372.744.305.167,00	105,73	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.189.827.239.115,00	3.372.744.305.167,00	105,73	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.430.560.000,00	6.430.560.000,00	100,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.430.560.000,00	6.430.560.000,00	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	12.408.206.036.154,00	12.404.001.670.528,95	99,97	

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

# 1.4.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Adapun realisasi belanja daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode			Realisasi		
Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Rupiah	%	
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	7.498.766.669.790,62	7.175.245.782.994,80	95,69	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.505.105.705.656,00	2.388.030.777.344,00	95,33	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.967.500.533.797,62	3.765.440.053.881,80	94,91	
5.1.03	Belanja Bunga	1.029.672.328,00	1.029.672.328,00	100,00	
5.1.05	Belanja Hibah	981.829.299.009,00	977.757.244.963,00	99,59	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	43.301.459.000,00	42.988.034.478,00	99,28	
5.2	BELANJA MODAL	1.186.953.963.349,38	1.132.361.153.679,53	95,40	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.880.019.157,00	46.092.332.880,00	98,32	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.058.384.128,00	337.856.734.558,00	96,51	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.768.451.234,00	172.595.689.295,53	96,55	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	572.699.621.783,38	537.319.896.762,00	93,82	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.449.411.526,00	35.463.441.663,00	100,04	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.098.075.521,00	3.033.058.521,00	97,90	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.506.165.705,00	75.000.000,00	0,12	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	60.506.165.705,00	75.000.000,00	0,12	
5.4	BELANJA TRANSFER	3.610.356.564.438,00	3.605.330.492.510,00	99,86	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.386.606.564.438,00	3.386.606.564.438,00	100,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	223.750.000.000,00	218.723.928.072,00	97,75	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	12.356.583.363.283,00	11.913.012.429.184,33	96,41	

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

# 1.4.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan Daerah terdiri atas 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah dan 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Adapun realisasi pembiayaan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	**	D 4	Realisasi		
Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Rupiah	%	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.875.060.165,00	86.875.060.164,95	100,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.875.060.165,00	86.875.060.164,95	100,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	138.497.733.036,00	138.497.733.036,00	100,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.497.733.036,00	138.497.733.036,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(51.622.672.871,00)	(51.622.672.871,05)	100,00	

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

# **BAB II**

# PERUBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional,perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin sinkronisasi dan sinergitas arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas bidang pembangunan nasional antara pembangunan nasional telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024, yang di dalamnya telah memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan, isu strategis, prioritas, dan arah kebijakan serta kerangka pendanaan yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (APBD TA 2024).

Selanjutnya untuk melaksanakan RKPD, secara operasional disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tahap sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya pelaksanaan APBD merupakan manivestasi kolaborasi kinerja unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yaitu antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka mengakomodasi permasalahan pembangunan yang dinamis dan pelaksanaan pembangunan yang adaptif dilakukan Perubahan APBD agar dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan. Perubahan APBD TA 2024, didasarkan pada kriteria yang memenuhi kriteria untuk dilakukannya Perubahan APBD TA 2024, beberapa hal penting yang menjadi latar belakang perubahan APBD, antara lain:

- 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun berjalan dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan, serta faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran.

- 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 4. Adanya kegiatan lanjutan yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.
- 5. Keadaan darurat yaitu keadaan luar biasa, yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Pada saat Tahun Anggaran 2024 perlu dijelaskan bahwa implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baru akan berjalan pada pelaksanaan APBD 2025. Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan APBD TA 2024, antara lain sebagai berikut:

# 2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

# 2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan/Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penetapan target pendapatan daerah mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan asumsi-asumsi penting lainnya.

# 1. Pendapatan Asli Daerah

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Pendapatan Daerah secara signifikan berasal dari Pajak Daerah berupa pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat mandatory dalam pengalokasiannya seperti:

a. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada

- Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- c. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- d. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam pasal 47 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- e. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 35 Tahun 2023 Tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- f. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan

Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

g. Pemanfaatan dari Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan jenis retribusi yang bersangkutan.

# 2. Dana Perimbangan/Transfer

Pendapatan dana perimbangan/transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Penetapan target Dana Transfer berpedoman pada Peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana transfer dan/atau berdasarkan informasi yang diterbitkan melalui website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada setiap tahunnya.

# 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengoptimalkan hibah dari Pihak Ketiga, yang dalam hal ini yaitu PT Jasa Raharja.

# 2.1.2 Strategi Pendapatan Daerah

Untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dinamis dan cenderung meningkat, maka penggalian potensi pendapatan daerah harus senantiasa dilakukan. Untuk meningkatkan pendapatan Daerah, upaya yang dilakukan antara lain:

- 1. Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  - a. Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor Bersama kepolisian dan Jasa raharja;
  - b. Pemberlakuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok Dan/Atau Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya. Yang berlaku mulai tanggal 4 Oktober s/d 31 Desember 2024
  - c. Kerjasama dengan instansi terkait, seperti dengan melakukan penagihan PKB bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk kendaraan bermotor milik perusahaan di wilayah Provinsi Banten melalui Surat Kuasa Khusus(SKK) ;
  - d. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui *door to door* di seluruh wilayah UPTD PPD Bapenda Provinsi Banten;
  - e. Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;
  - f. Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat melalui SAMLING, SAMLONG, SAMSON, SAMTOR, drive thru dan Samsat *goes to factory*;

- g. Sosialisasi dan Publikasi pelayanan dan pengelolaan Pajak Daerah kepada Masyarakat secara luas baik secara virtual, Medsos, media cetak cetak, WA blast, Media luar ruang dan tatap muka;
- h. Optimalisasi pembayaran secara digital (Signal, Sambat, Ceria, EDC, QRIS);
- i. Melaksanakan sinergitas Pelayanan dengan Stakeholder melalui: Kerjasama dengan Koperasi Perusahaan, Samsat Desa, Kecamatan;
- j. Peningkatan Kerjasama dengan pihak swasta (Perbankan, Mall dll) dalam penyediaan sarana Gerai SAMSAT di lokasi strategis;
- k. Penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, operasionalisasi penagihan pajak daerah, dan mengoptimalkan penagihan pajak daerah dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada, pelayanan dengan mobil samsat keliling, pelayanan pada *event* tertentu di kabupaten/kota.
- 2. Peningkatan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  - a. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Dealer dan Leasing;
  - b. Koordinasi dengan Kepolisian terkait percepatan proses kendaraan baru;
  - c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan.
- 3. Peningkatan Pendapatan Pajak Air Permukaan, melalui:
  - a. Penetapan potensi baru Wajib Pajak Air Permukaan;
  - b. Koordinasi dan sinergitas dengan instansi teknis terkait serta para Wajib Pajak Air Permukaan;
  - c. Pengembangan sistem Pajak Air Permukaan;
  - d. Pelaksanaan pemungutan kepada Perusahaan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan tanpa ijin.
  - e. Kepercayaan masyarakat dalam mengolah dan pengusahaan Air Permukaan memiliki harapan yang cukup baik untuk kegiatan usaha;
- 4. Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, melalui:
  - a. Pengembangan aplikasi pelaporan PBBKB untuk mempermudah Wajib Pungut PBBKB dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai tahapan dalam penyetoran dan pelaporan PBBKB;
  - b. Pendataan Wajib Pungut Baru yang melakukan kegiatan usaha penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di Wilayah Provinsi Banten namun belum terdaftar sebagai wajib pungut di Provinsi Banten;
  - c. Penetapan potensi baru wajib PBBKB melalui pendataan potensi penyedia dan importir BBM diwilayah Provinsi Banten;
  - d. Koordinasi dan sinergitas dengan instansi teknis terkait (Dinas ESDM, BPH Migas, PT. Pertamina selaku wajib PBBKB terbesar).

# 5. Pajak Alat Berat (PAB)

- a. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dimana perda tersebut mengamanatkan tahun 2024 pajak alat berat mulai di pungut;
- b. Melaksanakan pendataan ke Perusahaan-peusahaan yang memiliki alat berat dan di tetapkan sebagai wajib pungut;

# 6. Peningakatan Pendapatan Pajak Rokok, melalui:

- a. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI;
- b. Percepatan pelaksanaan penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kab./Kota sebagai syarat penyaluran Pajak Rokok.

# 7. Retribusi Daerah

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal peningkatan retribusi daerah;
- Melakukan sosialisasi ke masyakat memalui tatap muka, media cetak dan elektronik terkait layanan-layanan yang di miliki Perangkat Daerah di Provinsi Banten;
- c. Mengoptimalkan retribusi pemanfaatan aset yang ada di Perangkat Daerah.

# 2.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah ditargetkan Sebesar Rp12.408.206.036.154, yang meningkat sebesar Rp662.196.630.115 dari target pendapatan pada APBD Murni yaitu sebesar Rp11.746.009.406.039. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.404.001.670.529 atau 99,97% dari anggaran. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ringkasan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Daerah APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD Tal	Realisasi		
Koue	Oraian	Murni	Perubahan	Rp	%
4	PENDAPATAN	11.746.009.406.039	12.408.206.036.154	12.404.001.670.529	99,97
	DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI	8.668.052.033.549	9.211.948.237.039	9.024.826.805.362	97,97
	DAERAH (PAD)				
4.2	PENDAPATAN	3.071.630.609.000	3.189.827.239.115	3.372.744.305.167	105,73
	TRANSFER				
4.3	LAIN-LAIN	6.326.763.490	6.430.560.000	6.430.560.000	100,00
	PENDAPATAN				
	DAERAH YANG SAH				

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

Pada kelompok **Pendapatan Asli Daerah** (**PAD**), dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp8.668.052.033.549 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp9.211.948.237.039 sedangkan realisasinya tercapai sebesar Rp9.024.826.805.362 atau 97,97 persen dari target yang telah ditetapkan. Sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 94,77 persen terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD Ta	hun 2024	Realisasi	
Koue	Oraian	Murni	Perubahan	Rp	%
4.1	PENDAPATAN ASLI	8.668.052.033.549	9.211.948.237.039	9.024.826.805.362	97,97
	DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah	8.284.849.811.619	8.614.911.017.911	8.552.409.195.856	99,27
4.1.02	Retribusi Daerah	214.752.691.760	228.333.727.283	238.989.988.258	104,67
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.558.590.039	51.909.734.739	51.909.734.739	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	109.890.940.131	316.793.757.106	181.517.886.509	57,30

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

Realisasi pendapatan pada tahun 2024 tidak mencapai target terutama karena belum optimalnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu khususnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Alat Berat, serta Lain-lain PAD yang sah, yang diantaranya disebabkan oleh:

- 1. Penurunan daya beli Masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru;
- 2. Penyaluran Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2024 baru akan disalurkan pada Triwulan I Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Realisasi Pajak Rokok dicatat berdasarkan nilai bersih setelah dikurangi potongan ke BPJS Kesehatan, sedangkan target Pajak Rokok yang tercantum adalah sebesar nilai bruto;
- 3. Penetapan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2024 yang terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 baru diundangkan pada 6 Agustus 2024 dan pemungutan Pajak Alat Berat dilakukan pada akhir tahun 2024. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dasar pengenaan Pajak Alat Berat adalah Nilai Jual Alat Berat;
- 4. Adanya insentif Pajak kepada Masyarakat dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok Dan/Atau

Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya;

Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah. Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp238.989.988.258 atau 104,67% dari target sebesar Rp228.333.727.283

Pada **Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan**, diperoleh dari pembagian laba pada BUMD. Pada APBD 2024 pendapatan dari sektor BUD ditargetkan Rp.51.909.734.739,00 dan terealiasasi Rp.51.909.734.739,00.

Pada kelompok **Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang sah** merupakan Pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 ditargetkan pada APBD sebesar Rp316.793.757.106 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp 316.793.757.106 tercapai sebesar Rp 181.517.886.509 atau 57,30 persen.

Pada **Pendapatan Transfer** yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian ditargetkan pada APBD 2024 sebesar Rp3.071.630.609.000 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp3.189.827.239.115 tercapai sebesar Rp 3.372.744.305.167 atau 105,73 persen.

Tabel 2.3

Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD Ta	hun 2024	Realisasi	
Koue		Murni	Perubahan	Rp.	%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.071.630.609.000	3.189.827.239.115	3.372.744.305.167	105,73
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.071.630.609.000	3.189.827.239.115	3.372.744.305.167	105,73

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

Realisasi Pendapatan transfer yang melebihi target bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 sebesar Rp994.434.626.000 atau 124,81% dari target sebesar Rp796.740.749.115.

Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan pendapatan transfer mengacu pada Peraturan Presiden 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024, disesuaikan dengan prognosis, serta sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa kebijakan pendapatan DBH memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis,

diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.

Kelompok **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** menampung penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp6.430.560.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp6.430.560.000. Realisasi Lainlain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Realisasi Hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp6.430.560.000.

#### 2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

# 2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan Provinsi Banten tahun 2024, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
- 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU.

Rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten yang tertuang dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sehingga menghasilkan arah pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan 2024

		<del>.</del>	<u>-</u>
No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan		Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Desa
	Meningkatnya Pelayanan Sosial		Peningkatan Pemberdayaan dan Pemenuhan SPM Bidang Sosial
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja
	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat		<ul> <li>Peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus</li> <li>Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi</li> <li>Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah</li> <li>Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek</li> </ul>
			Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integrative
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		<ul> <li>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan</li> <li>Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat</li> </ul>
			Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender		<ul> <li>Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi</li> <li>Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</li> <li>Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak</li> <li>Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</li> </ul>

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
			Penyediaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi.
	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya		Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
			Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga tingkat nasional
2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	<ul> <li>Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital</li> <li>Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk,         Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat         Pelayanan Usaha Terpadu</li> <li>Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk,         Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat         Pelayanan Usaha Terpadu</li> <li>Peningkatan Ketersedian Pangan yang didukung oleh         Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok         pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi</li> </ul>
	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha		<ul> <li>Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO</li> <li>Peningkatan pelayanan investasi dengan Kemudahan Perizinan sesuai UU Cipta Kerja     Pemerintah Terbitkan Perppu No.2 Tahun 2022 Jadi Pengganti UU Cipta Kerja, 30 Des 2022</li> <li>Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten</li> </ul>
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan		Pengembangan kualitas produk industri
			<ul> <li>Penguatan Manajemen Pusat Distribusi</li> <li>Peningkatan Jumlah Eksportir Non Migas Komoditas Unggulan Daerah</li> </ul>
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan		<ul> <li>Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (off farm)</li> <li>Peningkatan Infrastuktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya</li> </ul>
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis		<ul> <li>Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan</li> <li>Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan provinsi</li> <li>Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan</li> <li>Pemanfaatan Bendung dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi</li> <li>Pengelolaan prasarana pengendalian banjir</li> </ul>

II - 11

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
		Daerah	
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;	<ul> <li>Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional</li> <li>Perencanaan pembangunan TPA /TPST Regional yang berkualitas</li> <li>Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi</li> <li>Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum,</li> <li>Penigkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi</li> <li>Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik</li> <li>penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh</li> <li>Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan</li> <li>Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan Tahura Banten</li> <li>Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi</li> <li>Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan</li> <li>Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan</li> <li>Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan</li> </ul>
	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan		sumber daya mineral     Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana     Menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan
	Tanggap Darurat Bencana		informasi reocheanadh
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.	<ul> <li>Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan</li> <li>Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan</li> <li>Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah</li> <li>Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah</li> <li>Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja</li> </ul>

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
			<ul> <li>Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD</li> </ul>
			<ul><li>Peningkatan manajemen dan profesionalisme Aparatur</li><li>Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal</li></ul>
			<ul> <li>Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasiskan e-government</li> <li>Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, Kajian dan Inovasi pelayanan publik</li> <li>Peningkatan kualitas kebijakan BLUD</li> </ul>
	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU	<ul> <li>Peningkatan budaya politik yang demokratis,jujur dan bertanggungjawab berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa</li> <li>Penurunan kerawanan konflik masyarakat</li> </ul>

Sumber: Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Banten Tahun 2024

Selanjutnya kebijakan alokasi belanja daerah tahun 2024 sebagai berikut:

- Pemenuhan Belanja Wajib mengikat, antara lain Belanja Pegawai, Belanja Transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Belanja Lainnya yang telah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten;
- 2. Belanja Wajib dalam rangka pemenuhan layanan dasar yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal, antara lain:
  - a. Pemenuhan belanja pendidikan minimal 20 (dua puluh) persen dari Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Belanja dimaksud yang diarahkan untuk mendanai pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, dan pendanaan Biaya Operasional Sekolah (BOSDA);
  - b. Belanja Bidang Urusan Kesehatan diarahkan untuk Pelayanan Kesehatan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Kesehatan, Penyediaan alat kesehatan dan obat, Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan upaya-upaya promotif dan preventif kesehatan;
  - c. Belanja Infrastrukur, yang mendukung konektivitas untuk pertumbuhan ekonomi yaitu pengadaan lahan, pemantapan jalan, serta pembangunan jalan baru;
  - d. Pemenuhan kebutuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta pemberdayaan sosial.
- 3. Belanja dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang, seperti Pemenuhan Belanja Fungsi Pengawasan, Kediklatan, Belanja dalam rangka penanggulangan kebencanaan, dan sejenisnya.

II - 13

- 4. Belanja Hibah Kepada Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan termasuk dalam rangka penguatan hibah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada SMA, SMK, dan SKH Swasta.
- 5. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan provinsi. Secara teknis pengelolan bantuan keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten, dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten.
- 6. Belanja dalam mendukung target dan prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2029.

# 2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp11.866.009.406.039 yang selanjutnya pada Perubahan APBD TA 2024 telah ditetapkan menjadi sebesar Rp12.356.583.363.283. Anggaran Belanja Daerah tersebut terealisasi sebesar Rp11.913.012.429.184 atau sebesar 96,41%. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD T	ahun 2024	Realisasi	
	Oraian	Murni	Perubahan	Rp	%
5	BELANJA DAERAH	11.866.009.406.039	12.356.583.363.283	11.913.012.429.184	96,41
5.1	Belanja Operasi	7.219.458.552.287	7.498.575.943.466	7.175.245.782.995	95,69
5.2	Belanja Modal	1.163.654.397.284	1.186.953.963.349	1.132.361.153.680	95,40
5.3	Belanja Tidak Terduga	62.696.892.030	60.696.892.030	75.000.000	0,12
5.4	Belanja Transfer	3.420.199.564.438	3.610.356.564.438	3.605.330.492.510	99,86

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

Secara terperinci, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

# 1. Realisasi Belanja Operasi

Belanja Operasi, yaitu belanja dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan, mendorong aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja operasi ditargetkan pada APBD sebesar Rp7.219.458.552.287 dan Perubahan APBD sebesar Rp7.498.575.943.466 dengan realisasi sebesar Rp7.175.245.782.995 atau 96,69%. Target dan realisasi rincian Belanja Operasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Target dan Realisasi Rincian Belanja Operasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

V. I. Harton		APBD Ta	hun 2024	Realisasi		
Kode	Uraian	Murni	Perubahan	Rp	%	
5.1	BELANJA OPERASI	7.219.458.552.287	7.498.575.943.466	7.175.245.782.995	95,69	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.637.346.334.404	2.505.105.705.656	2.388.030.777.344	95,33	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.565.457.889.646	3.967.309.807.473	3.765.440.053.882	94,91	
5.1.03	Belanja Bunga	1.029.672.328	1.029.672.328	1.029.672.328	100	
5.1.05	Belanja Hibah	968.653.655.909	981.829.299.009	977.757.244.963	99,59	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	46.971.000.000	43.301.459.000	42.988.034.478	99,28	

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

Realisasi **Belanja Pegawai** TA 2024 sebesar Rp2.388.030.777.344 atau 95,33% dari target sebesar Rp2.505.105.705.656. Kurang optimalnya realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN disebabkan oleh tidak terserapnya Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) PNS pada Perangkat Daerah se-Provinsi Banten yang disebabkan karena belum diterbitkannya Peraturan Daerah terkait mekanisme belanja tersebut, sehingga menjadi kendala administratif dalam pelaksanaan anggaran. Akibatnya, meskipun alokasi dana telah tersedia, proses realisasi tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas.

Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengalami penurunan sebesar 8,24% pada tahun 2024 ini. Penurunan ini disebabkan antara lain karena terjadi perubahan status kepegawaian di UPT RSUD Banten sebanyak 51 Orang dan di UPT RSUD Malingping sebanyak 9 orang, yang dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan ini berdampak pada pengurangan alokasi anggaran belanja pegawai BLUD.

Belanja Barang meliputi **Belanja Barang dan Jasa** sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp3.765.424.542.882 atau 94,91% dari target sebesar Rp3.967.500.533.798. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari: Belanja Barang, Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belana Perjalanan Dinas; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; Belanja Barang dan Jasa BOS; dan Belanja Barang dan Jasa BLUD

**Belanja Bunga** meliputi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat. Realisasi Belanja Bunga TA 2024 sebesar Rp1.029.672.328 atau 100,00% dari target sebesar Rp1.029.672.328. Belanja Bunga tersebut merupakan biaya pengelolaan atas pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

**Belanja Hibah** meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Dana BOS, serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp977.757.244.963 atau 99,59% dari target sebesar Rp981.829.299.009.

**Belanja Bantuan Sosial** meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp42.988.034.478 atau 99,28% dari target sebesar Rp43.301.459.000.

- Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Individu sebesar Rp10.588.034.478 terdiri dari: a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu merupakan Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp894.210.000 pada Dinas Sosial, berupa barang seperti Beras dan Susu, kepada Penyandang Disabilitas Sebesar Rp297.000.000, Belanja bantuan Sosial kepada Lanjut Usia sebesar Rp297.840.000, dan Belanja bantuan Sosial kepada Anak sebesar Rp298.530.000. b) Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp9.693.824.478 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang digunakan untuk Pembangunan Listrik Pedesaan berupa program bantuan listrik untuk instalasi dan sambungan rumah.
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp32.400.000.000 pada Dinas Sosial yang digunakan untuk menanggulangi Kemiskinan Ekstrem.

#### 2. Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan untuk perolehan aset dengan manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana publik ditargetkan pada APBD sebesar Rp1.163.654.397.284 dan Perubahan APBD sebesar Rp1.186.953.963.349 dengan realisasi sebesar Rp1.132.361.153.680 atau 94,90%. Target dan realisasi rincian Belanja Modal APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Rincian Belanja Modal APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

T7 1	***	APBD Ta	hun 2024	Realisasi		
Kode	Uraian	Murni Perubahan		Rp	%	
5.2	BELANJA MODAL	1.163.654.397.284	1.186.953.963.349	1.132.361.153.680	95,40	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	85.762.791.473	46.880.019.157	46.092.332.880	98,32	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.034.860.793	350.058.384.128	337.856.734.558	96,51	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.018.940.333	178.768.451.234	172.595.689.296	96,55	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	588.943.141.760	572.699.621.783	537.319.896.762	93,82	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.740.648.100	35.449.411.526	35.463.441.663	100,04	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.154.014.825	3.098.075.521	3.033.058.521	97,90	

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

#### 3. Realisasi Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tak Terduga ditargetkan pada APBD sebesar Rp62.696.892.030 dan Perubahan APBD sebesar Rp60.696.892.030 dengan realisasi sebesar Rp75.000.000 atau 0,12%.

Realisasi Belanja tersebut digunakan untuk Pembayaran Belanja Dana Darurat untuk Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Ahli waris Badan Adhoc dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

#### 4. Realisasi Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Belanja Transfer TA 2024 terdiri dari belanja transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan, ditargetkan pada APBD Murni sebesar Rp3.420.199.564.438 dan Perubahan APBD sebesar Rp3.610.356.564.438 dengan realisasi sebesar Rp3.605.330.492.510 atau 99,86%. Target dan realisasi rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Rincian Belanja Transfer APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2024

141141111111111111111111111111111111111								
T7 1	APBD Tahun 2024		hun 2024	Realisasi				
Kode	Uraian	Murni Perubahan		Rp	%			
5.4	BELANJA TRANSFER	3.420.199.564.438	3.610.356.564.438	3.605.330.492.510	99,86			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.196.399.564.438	3.386.606.564.438	3.386.606.564.438	100,00			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	223.800.000.000	223.750.000.000	218.723.928.072	97,75			

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan seluruhnya merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 tahun 2021 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp3.386.606.564.438 atau 100,00% dari target sebesar Rp3.386.606.564.438.

**Belanja Bantuan Keuangan** terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp95.923.928.072 atau 95,97% dari target sebesar Rp99.950.000.000. Secara umum Pemerintah Kabupaten/Kota pada saat mengusulkan Bantuan Keuangan Tahap II mengajukan permohonan pencairan sebesar sisa nilai untuk menghindari adanya pengembalian STS di akhir tahun sehingga realisasi Pemerintah Kabupaten/Kota dibawah 100%.

Sedangkan untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak yang terealisasi sebesar 91,55% dari anggaran disebabkan terdapat addendum kontrak pada kegiatan yang dilaksanakan di Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 sebesar Rp122.800.000.000 atau 99,19% dari target sebesar Rp123.800.000.000. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dari 1.228 desa terdapat sebanyak 10 desa yang tidak realisasi Bantuan Keuangan tahun 2024 karena beberapa hal, sebagai berikut:

- 1 Desa di Kabupaten Lebak; Desa Kanekes, tidak Menyampaikan Proposal dikarenakan Desa Kanekes menjadi Desa Adat.
- 3 Desa di Kabupaten Serang; Desa Carenang, Desa Kedayakan, Desa Tunjung Teja, tidak Menyampaikan Proposal karena kurangnya SDM di Desa tersebut.
- 6 Desa di Kabupupaten Tangerang; Desa Kohod dan Desa Jatimulya, Tidak Menyampaikan Proposal dikarenakan terkendala waktu yang terlalu mendesak di akhir tahun sehingga khawatir tidak bisa merealisasikannya. Desa Kampung Kelor, Desa Pondok Kelor, Desa Sindang Jaya, dan Desa Wanakerta, adanya programprogram di Desa sehingga proposal bantuan tidak terealisasikan

#### 2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan (Financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah pada Tahun 2024, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Penerimaan atas Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Serta Pengeluaran Pembiayaan dalam rangka Pembayaran pokok pinjaman dan penyertaan modal kepada Badan Usahan Milik Daerah.

#### 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah APBD Murni dianggarkan sebesar Rp120.000.000.000 dan pada Perubahan APBD TA 2024 ditetapkan menjadi sebesar Rp(51.622.672.871). Pembiayaan Daerah netto terealisasi sebesar Rp(51.622.672.871) atau 100 persen. Rincian Pembiayaan Daerah secara rinci tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Target dan Realisasi Rincian Pembiayaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

T7 1	***	APBD Ta	hun 2024	Realisasi		
Kode	Uraian	Murni	Perubahan	Rp	%	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263.497.733.036	86.875.060.165	86.875.060.165	100,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	263.497.733.036	86.875.060.165	86.875.060.165	100,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	143.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	100,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	0	0	-	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	100	
•	Pembiayaan Netto	120.000.000.000	(51.622.672.871)	(51.622.672.871)	100	

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2024 (unaudit).

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2024 sebesar Rp86.875.060.165 atau 100,00% dari target sebesar Rp86.875.060.165.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2024 sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00% dari target sebesar Rp138.497.733.036.

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah, lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2024 tidak menganggarkan Dana Cadangan karena Dana Cadangan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah sudah disalurkan pada tahun 2023 kepada KPU dan Bawaslu;
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp138.497.733.036 berupa Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT. SMI untuk Periode Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7.2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai

Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024.

#### **BAB III**

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pembangunan daerah jangka menengah daerah Provinsi Banten pada tahun 2024 menjadi tahun ke-dua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 adalah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Banten tahun 2023-2026 yaitu "*Banten Mandiri*, *Maju*, *Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa*". Perwujudan visi Pembangunan daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan; 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Pada tahun ke-dua pelaksanaan RPD, kebijakan Pembangunan daerah Banten tahun 2024 diarahkan pada tema pembangunan yaitu "*Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi*" Kebijakan tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 2. Meningkatkan pemerataan Pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
- 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan
- 4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
- 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu

Dalam penghitungan capaian indikator kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan kategori tingkat ketercapaian: 1) Sangat Tinggi : ≥ 91%; 2) Tinggi : 76 − 90,99%; 3) Sedang : 66 − 75,99%; 4) Rendah : 51 − 65,99%; dan 5) Sangat Rendah : ≤ 50,99%.

Hasil dari pelaksanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Realisasi Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2024

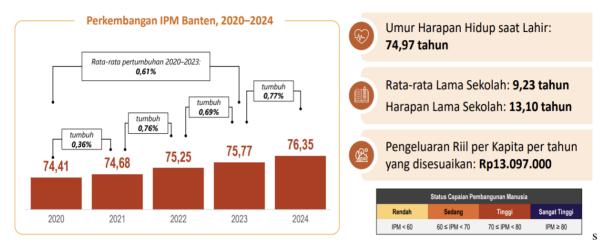
	Realisasi Indikatoi Waki o 1 Tovinsi Danten Tanun 2024							
No	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi Nasional		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,77	76,02	76,35	75,02		
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,81	4,80 – 5,0	4,79	5,03		
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,52	7,02	6,68	4,91		
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,17	5,67	5,70	8,57		
5	Indeks Gini	Poin	0,368	0,360	0,359	0,381		
6	Tingkat Inflasi	Persen	2,9	3,0-4,0	1,88	1,57		

Sumber: RKPD-P 2024, BPS Provinsi Banten

#### 3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan

Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.1 Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten salah satunya terpresentasikan melalui capaian IPM. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang rilis pada No. 60/12/36/Th.XVIII, 2 Desember 2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2024 sangat baik yaitu sebesar 76,35 poin, meningkat sebesar 0,77 poin dari tahun lalu. Capaian kinerja IPM pada tahun 2024 sudah melebihi harapan yang ditargetkan pada dokumen perencanaan sebesar 76,02 poin sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,43%. Capaian kinerja IPM tahun 2024 jika kita lihat sudah mencapai target akhir kinerja RPD yaitu sebesar 74,39 di akhir tahun 2026. Jika dibandingkan capaian Nasional IPM Banten berada di atas nasional sebesar 1,33 poin, IPM nasional sendiri berada di angka sebesar 75,02.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2024 termasuk pada klasifikasi "tinggi", secara peringkat Banten menempati peringkat ke-7 dengan status IPM tertinggi dari 38 Provinsi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2024 terus meningkat, pada tahun 2024 ditargetkan UHH sebesar 74,82 dan terealisasi 74,97 tahun meningkat 0,2 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja UHH pada tahun 2024 sudah melebihi target tercapai sebesar 100,20%. Posisi UHH

Banten jika dibandingkan nasional sebesar 74,15 lebih baik 0,82 poin. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2024 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 74 tahun.

Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 telah mencapai 13,10 tahun. Realisasi ini naik sebesar 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Target HLS pada dokumen perencanaan 2024 sebesar 13,93 dengan capaian kinerja HLS mencapai 94%. Dengan demikian bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2024, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten menunjukan perkembangan positif, RLS Banten pada tahun 2024 telah mencapai 9,23 tahun meningkat 0,8 poin dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja RLS pada tahun 2024 telah mencapai target 100 persen atau sesuai target dengan pertumbuhan yang selalu positif. Hal ini artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2024 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp. 2,7 triliun atau 23,14 persen dari APBD (ketentuan minimal 20 persen); 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rp1,16 triliun atau 12,60% dari APBD (ketentuan minimal 10%); 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Pada tahun 2024 telah dijalankan penyelesaian pengembangan dan operasional RSUD Cilograng, RSUD Labuan, RSUD Malingping, pengembangan RSUD Banten menjadi RS Pendidikan, pemenuhan pembiayaan kesehatan (JKN) dan pemenuhan SPM Kesehatan.

#### 3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,8 – 5,0 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor 11/02/36/Th. XIX, 5 Februari 2025, realisasi laju Pertumbuhan ekonomi Banten di Tahun 2024 sebesar 4,79 persen. LPE dibandingan dengan tahun kemarin mengalami pelambatan sebesar 0,02 persen. Banten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa

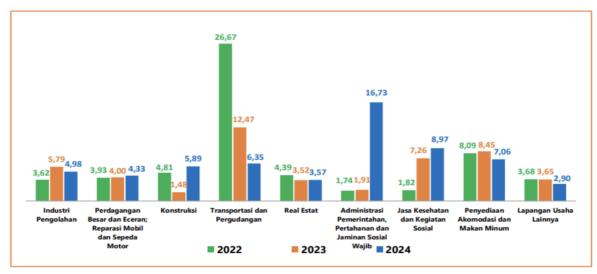
sebesar 6,96 persen naik 0,01 persen dibandingkan tahun lalu dan kontribusi nasional sebesar 3,97. Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Banten 2012-2024 (y on y)

Struktur perekonomian Provinsi Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Perekonomian Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,35 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,38 persen; Konstruksi sebesar 11,69 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,47 persen; serta Real Estat sebesar 7,72 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Banten mencapai 73,61 persen.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.4 Struktur PDRB Lapangan Usaha tahun 2022-2024

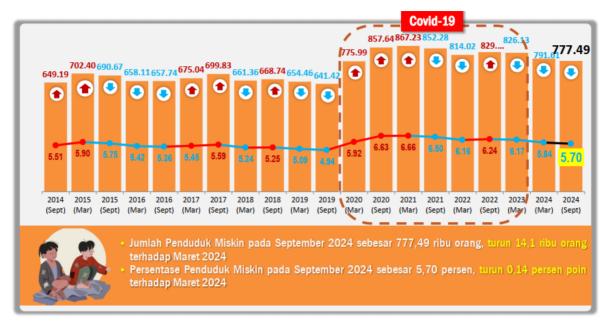
Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Banten, yang pada tahun 2024 ini mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 4,98 persen; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,33 persen; Konstruksi sebesar 5,89 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,35; serta Real Estat sebesar 3,57 persen.

Dari sisi pengeluaran seluruh komponen Pengeluaran mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 13,82 persen disusul komponen Total Net Ekspor yang tumbuh sebesar 11,90 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,83 persen, kemudian komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masing-masing tumbuh 4,39 persen dan 2,63 persen.

Secara umum yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Banten adalah investasi. Di mana, nilai investasi meningkat saat ini didorong oleh investasi bangunan dan non bangunan. Investasi bangunan terdorong oleh peningkatan investasi pada proyek kawasan komersil dan perumahan seperti Kawasan PIK2, Serpong, Alam Sutera, BSD dan Maja investasi non bangunan juga meningkat yang tercermin dari peningkatan impor barang modal yang meningkat 29 persen dari realisasi investasi industri pengolahan yakni PT Lotte Chemical Indonesia yang mulai beroperasi pada awal triwulan II 2025..

#### 3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 05/01/36/Th.XIX, 15 Januari 2025 menunjukan bahwa Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2024 sebesar 5,70 persen, menurun 0,47 persen terhadap Maret 2023 dan turun 0.14 persen jika dibandingkan dengan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 777.490 ribu orang, menurun 48.640 ribu orang terhadap Maret 2023.



Sumber: BPS Banten 2024

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Miskin 2014-2024

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 5,57 persen, turun sebesar 0,43 persen poin dibandingkan pada Maret 2023 diangka 6,0 persen. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 6,20 persen turun 0.59 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar 6,79 persen, Hal lain yang perlu diperhatikan selain dari persentase penduduk miskin adalah Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan. Pada September 2024 indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,971 pada Maret 2024 menjadi 0,799 pada September 2024. Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,247 menjadi 0,154 pada periode yang sama.

Faktor penurunan Kemiskinan pada tahun 2024 secara umum di Banten antara lain, terjadi Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,34 persen, pada periode Maret 2024–September 2024 inflasi umum lebih rendah jika dibandingkan 2 pada periode Maret 2023-september 2023, terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan I ke triwulan III tahun 2024 sebesar 4,48 persen. Industri pengolahan baik secara q-to-q dan yo-y tumbuh secara positif yaitu sebesar 2,26 persen dan 3,40 persen.

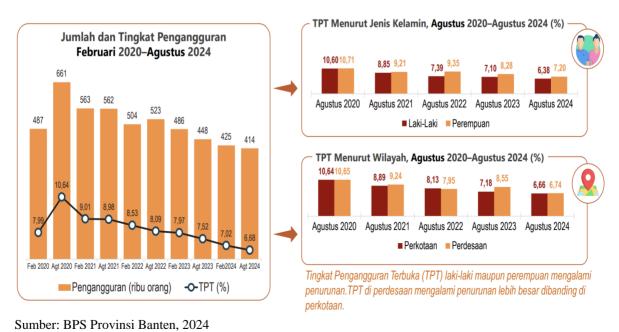
Selain itu Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya menurunkan kemiskinan dengan berbagai intervensi yaitu:

 Adanya kebijakan berupa KEPMENKO PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, selain itu terdapat Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 050/1609-Bapp/2023, perihal Percepatan Penangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

- 2. Penguatan program dan anggaran dalam penanganan kemiskinan
- 3. Menginstruksikan kepada Kabupaten Kota se-Banten penggunaan data kemiskinan yang sama yaitu P3KE,
- 4. Tematik Program dan Kegiatan Pada OPD sesuai tagging nomenklatur SIPD. Kepmen nomor 900.1.15.5-1317,
- 5. Pemberian Akses dan Perlindungan bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar,
- 6. Pemberian akses dan mutu layanan kesehatan dasar
- 7. Pemberian bantuan pangan, pemenuhan gizi seimbang dan makanan sehat
- 8. Menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi daerah

#### 3.1.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten No. 55/11/36/Th.XVIII, 5 November 2024. TPT Provinsi Banten pada periode Agustus 2024 sebesar 6,68 persen, menurun 0,84 poin dari tahun sebelumnya yaitu 7,52 persen di Agustus 2023 hal ini menunjukan kondisi yang baik artinya penangguran semakin menurun. Pada dokumen perencanaan di tahun 2024 TPT ditargetkan sebesar 7,02 persen yang artinya capaian melebihi target yaitu sebesar 104,84%. Namun kondisi TPT Banten tetap perlu diperhatikan karena jika dibandingkan nasional dengan TPT nasional yaitu sebesar 4,91 persen maka TPT kita masih jauh dibawah realisasi nasional.



Gambar 3.6 Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2017-2024 Provinsi Banten

Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 9,39 juta orang, dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 6,21 juta orang dan bukan Angkatan kerja sebanyak 3,18 juta orang dan sebanyak 414,75 ribu orang menganggur. Penurunan pengangguran ini dilihat dari proporsi penduduk di tahun 2024 ini meningkat terhadap pekerjaan pada kegiatan formal, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan buruh/karyawan/pegawai. Kecenderungan penduduk Banten dari sektor pekerjaan utama kerja sebanyak 51.60% bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan sektor kedua adalah berusaha sendiri/wiraswasta sebanyak 22,20%. Perhatian kinerja kedepan masih terus perlu diperhatikan bahwa TPT tertinggi sebesar 11,58% pada jenjang pendidikan SMK, agar terus bersinergi dengan dunia usaha dalam rangka penyiapan skill dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Faktor Pendukung Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah:

- 1. Melakukan pengurangan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial
- 2. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan investasi
- 3. Memaksimalkan peningkatan skill angkatan kerja melalui BLKI
- 4. Penyaluran tenaga kerja
- 5. Peningkatan kualitas dan kapasitas BLKI
- 6. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja

#### 3.1.5. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten No. 06/01/36/Th.XIX, 15 Januari 2025, bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode September Tahun 2024 mencapai sebesar 0,359 poin yang berarti terdapat penurunan 0,009 poin dibanding periode Maret 2023 yaitu 0,368 poin. Berdasarkan RKPD 20024 gini ratio ditargetkan 0,360 dan terealisasi 0,359 poin sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,28%.

Tingkat ketimpangan penduduk Banten termasuk Kategori Rendah (Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah > 17 persen). Tercatat bahwa pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2024 mengalami kenaikan 0,70 persen poin, sementara pengeluaran per kapita per bulan

Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Maret

2021 2021 2022 2022

2023

2024

2024

0.381 0.380 0.369 0.365 0.367 0.382 0.379 0.377 0.365 0.365 0.363 0.363 0.361 0.363 0.359 0.353 0.294 0.292 0.296 0.296 0.294 0.283 0.280 0.278 0.267 0.270 0.261 0.264 0.256 0.254 0.246

2019 2019

Maret Sept Maret Sept Maret Sept

2018

2018

penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah turun masing-masing sebesar 0,12 persen poin dan sebesar 0,57 persen poin

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Maret

2016

Sent

2016

2017 2017

Gambar 3.7 Gini Ratio tahun 2014-2024 Provinsi Banten

2020 2020

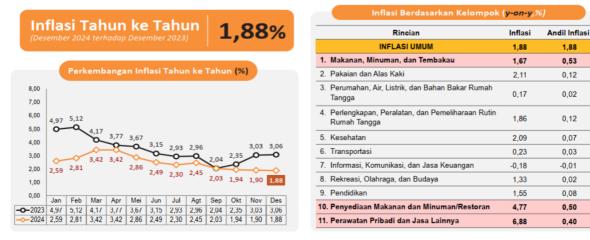
#### **3.1.6.** Inflasi

Maret Sept

2015 2015

2014

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.8 Inflasi Provinsi Banten Tahun 2024

Inflasi di Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 1,88 persen angka ini jika dibandingkan tahun lalu sebesar 2,9 persen maka terjadi penurunan 1,02 persen. Harga komoditas yang sangat mempengaruhi inflasi secara tahunan (Y-on-Y) adalah emas perhiasan, kopi bubuk, sigaret kretek mesin, nasi dengan lauk dan minyak goreng. Untuk andil deflasi cabai merah, cabai rawit dan beras.

Secara umum inflasi Banten relatif terkendali walaupun diatas inflasi nasional sebesar 1,57 persen. Kondisi inflasi yang dapat terkendali tak lepas dari sinergisitas segenap *stakeholders* dan fokus kerja pemerintahan Provinsi Banten yang bersandarkan pada reformasi birokrasi berdampak.

## 3.2. CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Penetapan Indikator kinerja Utama Pemda berdasarkan RPD 2023-2026 yang disahkan melalui Peraturan Gubernrur Banten Nomor 3 Tahun 2022. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut IKU Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten. Pada Misi 1 terdapat 10 tujuan/sasaran daerah dengan 14 Indikator, pada Misi 2 ada 7 tujuan/sasaran daerah dengan 10 indikator, pada misi 3 terdapat 3 tujuan/sasaran dengan 3 indikator dan terakhir misi 4 ada 3 tujuan/sasaran dengan 6 indikator. Adapun capaian IKU Daerah Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.2 Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	keterangan
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas	Tingkat Kemiskinan	%	5,67	5,70	99,47	sangat tinggi
sumberdaya manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,02	6,68	104,84	sangat tinggi
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,02	76,35	100,43	sangat tinggi
Meningkatnya pelayanan sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial	%	7,75	9,60	123,87	sangat tinggi
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,54	66,17	100,96	sangat tinggi
Meningkatkan kualitas keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	63,46	62,20	98,01	sangat tinggi
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,68	0,69	101,47	sangat tinggi
Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,93	13,10	94,04	sangat tinggi
masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,23	9,23	100,00	sangat tinggi
Meningkatnya kualitas	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,82	74,97	100,20	sangat tinggi
kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting pada Balita	%	23,00	24,00	95,65	sangat tinggi
Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,35	93,31	99,96	sangat tinggi
Terbentuknya karakter dan jati	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	56,23	52,49	93,35	sangat tinggi
diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	50,17	53,86	107,35	sangat tinggi
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80-5,0	4,79	99,79	sangat tinggi
pertumbuhan ekonomi	Indeks Williamson	Nilai	0,62	0,770	75,81	sedang
Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	4,92	2,63	53,46	rendah
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan	LPE sektor industri	%	5,82	4,98	85,56	tinggi
Perdagangan	LPE Sektor Perdagangan	%	3,98	4,33	108,79	sangat tinggi
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	5,10	10,22	200,39	sangat tinggi
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan	%	0,80	0,64	80	tinggi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	3,00	4,00	133,33	sangat tinggi
dan infrastruktur strategis. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan	Rupiah	12.303.0 00,00	13.097.00 0,00	103,34	sangat tinggi
Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	18,00	14,82	82,33	tinggi
Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	145,31	128,64	110,98	sangat tinggi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,04	62,54	98,46	sangat tinggi
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	78,17	87,87	112,4	sangat tinggi
			1			
Bersih dan Berwibawa Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK)	Nilai	3,00	2,85	95,00	sangat tinggi

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	keterangan
	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	73,16	69,24	94,64	sangat tinggi
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	84,30	77,93	92,44	sangat tinggi
Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	Nilai	cukup tangguh	cukup tangguh	100,00	sangat tinggi

Sumber: Olahan Bappeda Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan tabel 3.2. misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten tahun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dilengkapi parameter yang menjadi ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. Pencapaian indikator pada tujuan **Pertama Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia** ditunjukkan dengan 14 indikator, dari 14 indikator yang rata-rata capaian kinerjanya sebesar **101,04 persen**. Dimana capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran Meningkatnya pelayanan sosial dengan indikator Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial capaian kinerja sebesar 123,87 persen.

Pencapaian indikator pada **tujuan Kedua Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi** ditunjukan dengan 10 indikator, capaian kinerja pada misi Kedua sebesar 104,07 persen. Capaian kinerja tertinggi pertumbuhan sektor pariwisata dengan capaian sebesar 200,39.

Pencapaian indikator pada **tujuan Ketiga Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan** ditunjukan oleh ketercapaian 3 indikator indikator kinerja daerah, rata-rata capaian kinerja pada misi ini sebesar 97,25 persen. Capaian kinerja tertinggi adalah Indeks Risiko bencana sebesar 110,98 persen.

Pencapaian indikator pada tujuan **Keempat Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa** ditopang oleh 6 (enam) indikator, ratarata capaian kinerja pada misi 4 ini sebesar 96,51 persen. Capaian kinerja tertinggi indeks persepsi kualitas pelayanan public, Indeks reformasi birokrasi dan indeks ketahanan nasional dengan capaian sebesar 100 persen.

Capaian kinerja pada tahun 2024 ini didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang menjadi prioritas pada Pemerintah Provinsi Banten yaitu pada **Bidang pendidikan** membanguan sekolah baru, membangun ruang kelas baru, membangun laboratorium dan membangun fasilitas pendidikan lainnya. Pada **Bidang Kesehatan** membangun Rumah Sakit Labuan dan Rumah Sakit Cilograng, melengkapi peralatan medis terkini di RS Banten dan RS Malingping, Penguatan Sumber Daya Kesehatan, Peningkatan Jaminan

sosial Kesehatan melalui BPJS, penguatan program dalam rangka penurunan angka stunting. Pada Bidang Infrastruktur Pembangunan jalan baru 26,39 Km, membangun rumah layak huni, rehabilitasi jaringan irigasi. Pada Bidang Ekonomi penguatan pengendalian inflasi, peningkatan realisasi investasi, penguatan gerakan pangan murah dan stabilisasi harga komoditas sembako. Pada Bidang Sosial menyalurkan bantuan sosial, menyalurkan bantuan keuangan dana desa, bantuan jaminan sosial keluarga, penguatan data Administrasi kependudukan (Adminduk), penguatan penurunan kemiskinan ekstrem. Pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan menguatkan pengawasan pemerintah melalui SPIP terintegrasi, kerjasama dengan Kejati dan KPK dalam pencegahan korupsi, penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melaui RB general dan RB tematik serta penguatan digitalisasi melalui peningkatan SPBE.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024, tidak terlepas dari capaian kinerja masing-masing perangkat daerah

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
BIDANG PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan o	dan Kebuday	aan)							
Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi				
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	85,74	92,5	107,88	Sangat Tinggi				
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	64	61,32	95,81	Sangat Tinggi				
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	12,2	11,58	105,08	Sangat Tinggi				
BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)		L	L						
Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	50	75	150	Sangat Tinggi				
Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	92,31	92,31	100	Sangat Tinggi				
Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	80	71,52	110,60	Sangat Tinggi				
Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,6	4,5	102.17	Sangat Tinggi				
Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi				

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	PERMUKIMA	AN (Dinas Perui	nahan dan Perm	ukiman)	
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	99,44	99,32	99,88	Sangat Tinggi
Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	77	77	100	Sangat Tinggi
Luas Permukiman Kumuh	На	160	130	118,31	Sangat Tinggi
BIDANG SOSIAL (Dinas Sosial)		1			
Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	6,1	7,34	120,33	Sangat Tinggi
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENA	ATAAN RUAN	NG (Dinas Peker	jaan Umum dan	Penataan 1	Ruang)
Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	68,54	68,54	100	Sangat Tinggi
Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	6,1	3,38	55,41	Rendah
Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	6,47	6,15	95,05	Sangat Tinggi
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	43	88,96	206,88	Sangat Tinggi
Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	63,85	62,76	98,29	Sangat Tinggi
Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	46,09	44,87	97,35	Sangat Tinggi
Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	96	95,18	99,15	Sangat Tinggi
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETER dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah		M SERTA PERI	LINDUNGAN M	[ASYARA]	KAT (Satpol PP
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64	0,61	95,31	Sangat Tinggi
Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Rasio Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	G TIDAK BEI	RKAITAN DEN	GAN PELAYAN	AN DASA	R
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Li	ngkungan Hid	lup dan Kehutar	nan)		
a. Indeks Kualitas Udara (IKU)		74,22	69,84	94,1	Sangat Tinggi
b. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	54,46	54,32	99,74	Sangat Tinggi
c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		82,95	85,46	103,02	Sangat Tinggi

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan				
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)									
Angka Kelahiran Tota TFR ( <i>Total Fertility</i> Rate) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	2,31	1,98	116,81	Sangat Tinggi				
Bidang Kebudayaan (Dinas Pendidikan dan	Kebudayaan)								
Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,95	3,97	100,51	Sangat Tinggi				
Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	5	2,1	42	Sangat Rendah				
BIDANG PENANAMAN MODAL (DPMPT	(SP)	l							
Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	62	105,6	170,32	Sangat Tinggi				
Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	89,72	92,31	102,89	Sangat Tinggi				
BIDANG KEARSIPAN (Dinas Perpustakaan	n dan Kearsipa	an)							
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	80	75,91	94,89	Sangat Tinggi				
BIDANG PERSANDIAN (Dinas Komunikas	i dan Informa	tika)							
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	450	440	97,78	Sangat Tinggi				
BIDANG PANGAN (Dinas Ketahanan Pang	an)								
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	78,71	79,25	100,69	Sangat Tinggi				
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMAT	ΓΙΚΑ (Dinas K	omunikasi dan 1	Informatika)						
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,9	96,87	105,41	Sangat Tinggi				
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,39	3,47	102,36	Sangat Tinggi				
BIDANG TENAGA KERJA (Dinas Tenaga	Kerja dan Tra	nsmigrasi)							
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	71,85	64,76	90,13	Tinggi				
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAC	GA (Dinas Pem	l nuda dan Olahra	l ga)						
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,53	0,53	100	Sangat Tinggi				
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	52,17	53,33	102,22	Sangat Tinggi				
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUA	N DAN PERLI	I INDUNGAN AN	AK (DP3AKKB	)					
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	70,76	69,87	98,74	Sangat Tinggi				
Indek Perlindungan Anak	Nilai	76,02	66,18	87,05	Tinggi				
BIDANG PERPUSTAKAAN (Dinas Perpust	takaan dan Ke	arsipan)							

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan				
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	14	13,28	94,86	Sangat Tinggi				
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	69,3	70,66	101,96	Sangat Tinggi				
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DP3AKKB)									
Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi				
BIDANG STATISTIK (Dinas Kominfo)									
Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi				
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DA	N MENENGA	H (Dinas Koper	asi dan UKM)						
Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	28	28	100	Sangat Tinggi				
Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klister	Persen	5	5	100	Sangat Tinggi				
BIDANG PERHUBUNGAN (Dinas Perhubu	ngan)								
Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	21	24,72	82,29	Tinggi				
Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,73	0,7	95,89	Sangat Tinggi				
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	83	86,17	103,82	Sangat Tinggi				
BIDANG PERTANAHAN (Dinas Perumaha	n dan Permuk	iman)							
Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi				
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAK	AT DAN DES	A (Dinas Pembe	rdayaan dan Ma	syarakat D	Desa)				
Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	5,25	4,77	109,14	Sangat Tinggi				
Persentas Desa Kategori Maju	Persen	25,5	30,53	119,73	Sangat Tinggi				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA N	MINERAL (Dia	nas ESDM)							
Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	70,01	76,2	108,84	Sangat Tinggi				
Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	15	10,34	68,93	Sedang				
Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	99,99	100	Sangat Tinggi				
BIDANG KEHUTANAN (DLHK)									
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39,06	43,03	110,16	Sangat Tinggi				

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan					
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	(Dinas Kelauta	n dan Perikana	n)							
Peningkatan Nilai Tukar Nelayan	POIN	104	98,47	94,68	Sangat Tinggi					
Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	246.654	193819,67	78,58	Tinggi					
BIDANG PARIWISATA (Dinas Pariwisata)										
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	21.063.968	22.465.192	106,65	Sangat Tinggi					
BIDANG PERDAGANGAN (Dinas Perindus	strian dan Per	dagangan)								
Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,53	12,38	91,5	Sangat Tinggi					
BIDANG PERINDUSTRIAN										
Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	30,64	30,35	99,05	Sangat Tinggi					
BIDANG PERTANIAN (Dinas Pertanian)										
Produksi Peternakan	Ton	256.390	244.503	95,36	Sangat Tinggi					
Produksi Hortikultura	Ton	31.091	47.254	151,98	Sangat Tinggi					
Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.154.192	2.362.738	109,68	Sangat Tinggi					
Produksi Perkebunan	Ton	52.146	57.854	110,95	Sangat Tinggi					
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERI	NTAHAN									
SEKRETARIAT DAERAH										
Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	84,2	100	Sangat Tinggi					
Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71	66,77	94,04	Sangat Tinggi					
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	86,55	89,23	103,1	Sangat Tinggi					
Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	91,16	100	Sangat Tinggi					
Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,71	99,54	Sangat Tinggi					
Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	133	133	Sangat Tinggi					
Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	71,43	71,43	Sedang					
Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi					
Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi					

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,29	3,46	80,65	Tinggi
SEKRETARIAT DPRD	l				
Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD	Persen	100	91,96	91,96	Sangat Tinggi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMEI	RINTAHAN				
INSPEKTORAT DAERAH					
Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1	1	100	Sangat Tinggi
Maturitas SPIP	Nilai	3,24	3,4	105,03	Sangat Tinggi
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	15,31	15,37	100,39	Sangat Tinggi
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERII	NTAHAN				
KEUANGAN					
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
Kemandirian Keuangan	Persen	73,8	72,76	98,59	Sangat Tinggi
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif	Inovatif	90	Tinggi
KEPEGAWAIAN					
Indeks Merit Sistem	Nilai	332,5	330,5	99,4	Sangat Tinggi
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,05	52,81	101,46	Sangat Tinggi
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	21,61	31,24	144,56	Sangat tinggi
PERENCANAAN					
Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Kategori/ Nilai	47	43,35	92,23	Sangat Tinggi
PENGHUBUNG					
Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	4	4	100	Sangat Tinggi
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	78,96	75,83	96,04	Sangat Tinggi
Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	91,67	91,67	Sangat Tinggi

Sumber data: Olahan Bappeda 2024

Pelaksanaan kinerja indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tersebar pengampunya di 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah, memiliki andil dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten. Adapun rata-rata hasil Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah **100,88%** yang dihitung dari total 91 indikator. Dengan hasil sebagai berikut

- a. Sangat Tinggi sebanyak 81 Indikator
- b. Tinggi sebanyak 6 Indikator
- c. Sedang sebanyak 2 indikator
- d. Rendah sebanyak 1 indikator
- e. Sangat rendah sebanyak 1 indikator

# 3.3. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi baik urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 17 (tujuh belas) bidang urusan pemerintahan, yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, serta perpustakaan dan kearsipan. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan terdiri atas 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian. Adapun penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas 5 (lima) bidang urusan yakni perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian pengembangan, serta pengelolaan penghubung. Penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas 2 (dua) bidang urusan yakni bidang urusan sekretariat DPRD, dan sekretariat daerah. penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan terdiri atas 1 (satu) bidang urusan yakni inspektorat daerah. Penyelenggaraan unsur pemerintahan umum terdiri atas 1 (satu) bidang urusan yakni kesatuan bangsa dan politik. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 meliputi 165

(seratus enam puluh lima) Program, 932 (Sembilan ratus tiga puluh dua) Kegiatan dan 3.645 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima) Sub Kegiatan. Hasil kinerja Program yang dilaksanakan dengan menghitung kinerja indikator program yang berjumlah 348 (tiga ratus empat puluh delapan) pada tahun 2024. Adapun rincian kinerja program diuraikan pada table berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DASAR	·		TAN DENGAN PELAYANAN								
1.1	1.01 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG PENDIDII	KAN								
		DINAS PENDIDIKAN	DAN KEBUDA	AYAAN								
		DINAS PENDIDIKAN	DAN KEBUDA	AYAAN (UNIT INDUK)								
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDIDIKAN								
					Kualitas Pengelolaan Pendidikan Khusus (Kinerja)	91,00	89,4	98,24	Sangat Tinggi	realisasi melebihi target	- alternatif data menggunakan data regsosek - pada indikator program akan dirubah pada renstra berikutnya	
					Persentasi SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B (%)	80,00	79,2	99,00	Sangat Tinggi			
					Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah / Sederajat (%)	81,31	98,93	121,67	Sangat Tinggi	realisasi melebihi target		
					Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah / Sederajat (%)	60,67	70,51	116,22	Sangat Tinggi			
			Persentase lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan selama 1 tahun setelah kelulusan (%)	26,95	43,50	161,41	Sangat Tinggi	data diambil dari platform tracer study vokasi kemdikbudristek ri tapi belum diakui secara nasional, alumni yang mengisi baru 75%	peningkatan pengisian platform tracer study			
	1.01.03			PROGRAM PENGEMBANGA	l N KURIKULUM							
				1	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Khusus (%)	67,92	64,46	94,91	Sangat Tinggi	akumulasi sampai dengan tahun 2024, yang melaksanakan pengembangan kurikulum mulok sebanyak 78 setuan	akan melaksanakan pengembangan kurikulum mulok pada satuan pendidikan yang belum melaksanakan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										pendidikan dari 121 satuan pendidikan		
					Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah (%)	86,78	97,83	112,73	Sangat Tinggi	terdapat 15 sekolah SMA yang belum melaksanakan pengembangan kurikulum muatan lokal	akan dilakukan pengembangan kurikum muatan lokal ke sekolah menengah yang belum melaksanakan pengembangan kurikulum muatan lokal	
	1.01.04			PROGRAM PENDIDIK DAN 1	TENAGA KEPENDIDIKAN							
					Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidik per mata pelajaran (persen)	76,00	65,97	86,80	Tinggi			
	1.01.05			PROGRAM PENGENDALIAN								
					Persentase sekolah yang mendapatkan izin (Persen)	100,00	88,26	88,26	Tinggi	realisasi sesuai target, pada tahun 2024 yang mendapatkan izin pendirian dan perpanjangan sekolah sebanyak: 1. SKH sebanyak 34 sekolah dari 34 sekolah 2. SMA sebanyak 45 sekolah dari 45 sekolah 3. SMK sebanyak 94 sekolah dari 117 sekolah	meningkatkan pelayanan perizinan agar sesuai dengan SOP	
		Cabang Dinas Pendi Lebak	dikan dan Ke	budayaan Kabupaten								
	1.01.02			PROGRAM PENGELOLAAN F	PENDIDIKAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Lebak (Persen)	53,00	82,9	156,42	Sangat Tinggi			
		Cabang Dinas Pendi Kabupaten Pandegla		budayaan Wilayah								
	1.01.02			PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDIDIKAN							
					Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Pandeglang (Persen)	60,00	87,61	146,02	Sangat Tinggi			
		Cabang Dinas Pendio Cilegon, Kota Serang	dikan dan Ke g dan Kab. Se									
	1.01.02			PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDIDIKAN							
		,			Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon (Persen)	72,00	87,75	121,88	Sangat Tinggi			
		Cabang Dinas Pendi Kabupaten Tangera		budayaan Wilayah								
	1.01.02			PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDIDIKAN							
					Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Tangerang (Persen)	72,00	101,12	140,44	Sangat Tinggi			
		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan										
	1.01.02			PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDIDIKAN							
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang (Persen)	79,00	93,72	118,63	Sangat Tinggi				
		UPTD Teknologi, Inf Kebudayaan	ormasi dan I	Komunikasi Pendidikan dan								
	1.01.02			PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDIDIKAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Ketersediaan dan Penggunaan TIK Pendidikan (Persen)	50,00	75,68	151,36	Sangat Tinggi			
1.2	1.02 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG KESEHAT	AN								
		DINAS KESEHATAN										
		DINAS KESEHATAN	(UNIT INDUK	)								
	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UP PERORANGAN DAN UPAYA								
					Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu (Unit)	239,00	261,00	109,21	Sangat Tinggi	1.kurangnya sarana prasarana,SDM dan alkes yang dimiliki fasyankes sehingga menghambat fasyankes untuk melakukan akreditasi 2.kurangnya monitoring dan evaluasi dalam menjaga kualitas mutu fasyankes	Jumlah Puskesmas 253 unit dan Labkeda pemerintah 8 unit se Provinsi Banten yang sudah terakreditasi. Sesuai Peraturan Menkes (Permenkes) Nomor 34 Tahun 2022 yaitu 1.adanya bantuan rehabilitasi dan bangunan baru sarana prasarana serta bantuan alat kesehatan dari kementerian kesehatan (sophie) 2.adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi di 8 kab/kota	
					Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	1.adanya pengurangan jumlah kepesertaan sesuai verifikasi/validasi data penduduk miskin dari dinas sosial 2.keaktifan kepesertaan JKN di beberapa kab/kota masih kurang dari 75%	1.mendaftarkan penduduk miskin yang belum terdaftar JKN 2.koordinasi dengan kab/kota yang bersangkutan untuk bersama-sama berkontibusi dalam	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		•									pemenuhan keaktifan kepesertaan JKN	
					Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	belum optimalnya evaluasi persediaan obat dan BMHP (bahan medis habis pakai) sehingga menyebabkan bufferstock belum terpakai dikarenakan hanya ada 4 kab/kota yang mengusulkan permintaan obat (kab.lebak.kab.serang,kot a serang dan kab.pandeglang)	mengoptimalkan evaluasi ketersidaan obat dan BMHP di IF (instalasi farmasi) untuk bahan pertimbangan bufferstock pada tahun selanjutnya	
					Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Masih kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana di Provinsi Banten	Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana di Provinsi Banten	
					Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Masih kurangnya pemahaman masyrakat terkait Penyakit yang bisa menimbulkan Kejadian Luar Biasa sehingga ada masyarkat yang menolak di lakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan terkait penyakit yang berpotensi KLB	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terkait penyakit- penyakit yang berpotensi KLB di Provinsi Banten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular. Penyakit Tidak Menular. dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	1. kurangnya kesadaran masyarakat untuk skrining deteksi penyakit menular dan tidak menular serta masih kurangnya kepatuhan minum obat secara rutin 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit menular, tidak menular, dan jiwa 3. belum adanya rumah sakit jiwa dan panti rehabilitas sosial dalam pemberdayaan ODGJ pasca pasung	Monitoring dan evaluasi kegiatan skrining penyakit menular dan tidak menular di kabupaten / kota     Melaksanakan kegiatan sosialisasi penyakit menular, tidak menular dan jiwa di masyarakat     Mendirikan rumah sakit jiwa dan panti rehabilitas sosial dalam pemberdayaan ODGJ pasca pasung	
					Rasio Daya Tampung RS Rujukan (Rasio)	0,14	0,14	97,86	Sangat Tinggi	jumlah daya tampung sebesar 17.294 dengan jumlah penduduk 12.628.199	pada tahun 2025 terdapat perubahan peraturan program kris (kelas rawat inap standar) mengharuskan sesuai peraturannya, pengurangan jumlah tempat tidur pada kelas 3 harus 4 tempat tidur dari sebelumnya 6 tempat tidur yang menyebabkan penurunan jumlah tempat tidur RS provinsi banten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%)	79,37	94,77	119,40	Sangat Tinggi	telah dilakukan rekomendasi teknis rumah sakit kelas B sebanyak 22 rumah sakit yang tersebar di kab/kota provinsi banten	dari 134 RS se Provinsi Banten yang sudah terakreditasi sebanyak 127 RS. Sesuai Peraturan Menkes (Permenkes) Nomor 34 Tahun 2022 yaitu 1. Setiap Faskes (Klinik, puskesmas, RS, Lab, UTD, Tempat Praktek Mandiri) wajib melakukan Akreditasi 2. Akreditasi harus dilakukan paling Lambat 2 thn setelah faskes memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. 3. Akreditasi harus dilakukan kembali secara berkala setiap 5 th	
					Cakupan Kualitas Keluarga Sehat (%)	57,00	87,50	153,51	Sangat Tinggi	data yang dilaporkan baru sampai bulan november 2024, karena laporan desember masih berjalan	laporan desember akan dilaporkan pada bulan januari 2025	
					Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban) (%)	86,00	94,00	109,30	Sangat Tinggi	1.Kurangnya sarana (jamban) dan belum memenuhi standar kesehatan di lingkungan keluarga 2.Belum Maksimalnya Koordinasi Pokja PKP di kabupaten Kota 3.Akses Sanitasi Tinggi tidak sebanding dengan Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan yang rendah karena interfensi tidak fokus	1.koordinasi dengan DPRKP dan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (PKP) dalam pemenuhan sarana jamban di masyarakat 2.meningkatkan koordinasi dengan kab/kota untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku BABS	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.02.03			PROGRAM PENINGKATAN F MANUSIA KESEHATAN	KAPASITAS SUMBER DAYA							
					Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan (Orang)	470,00	470,00	100,00	Sangat Tinggi	Capaian kinerja Program telah sesuai dengan RENSTRA, 297 merupakan kondisi eksisting tenaga kesehatan khusus yang tersedia saat ini. Adapun dinas kesehatan Provinsi Banten tidak dapat merekrut dan mendistribusikan tenaga kesehatan khusus yang baru karena adanya aturan / kebijakan yang tidak memperbolehkan perekrutan pegawai tenaga kesehatan diluar P3K dan PNS	Menunggu keputusan pejabat yang berwenang	
	1.02.04			PROGRAM SEDIAAN FARMA MAKANAN MINUMAN	ASI, ALAT KESEHATAN DAN							
					Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	masih terdapat pelaku usaha yang masih belum menerapkan CDOB (cara distribusi obat yang baik) dan CDAKB (cara distribusi alat kesehatan yang baik) sesuai dengan regulasi/aturan terutama berkenaan dengan pelaporan,masa izin yang sudah habis,perubahan domisili tidak melapor,kode obat yang tidak sesuai NIE (nomor izin edar)	penguatan pembinaan dan pengawasan pada sarana distribusi kefarmasian dan pengawasan alat kesehatan serta koordinasi dengan lintas sektor (BPOM,DPMPTSP dan pemkab/kota)	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	masih terjadi tumpang tindih pengawasan terhadap UKOT (usaha kecil obat tradisional) yang dilakukan oleh Balai POM,dinkes,dpmptsp dan disperindag	penguatan pengawasan melalui pembentukan tim pengawasan terpadu yang melibatkan BPOM,dinkes,dpmptsp dan disperindag	
	1.02.05			PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEHATAN	N MASYARAKAT BIDANG							
					Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Kelompok)	14,00	14,00	100,00	Sangat Tinggi	belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam penyebaran program-program prioritas kesehatan dikarenakan sering bergantinya anggota kepengurusan sehingga informasi tidak berkesinambungan	melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat ke delapan kab/kota secara berkesinambungan	
		UPT RSUD Banten										
	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UP PERORANGAN DAN UPAYA								
					Persentase standar bagian pelayanan sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten (%)	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Program penelitian kolaboratif interprofesional ketahap lebih maju perlu naik kelas dan perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang perlu di tingkatkan lagi serta konsistensi pelayanan dengan standar terakreditasi yang harus dijaga	Menintegrasikan fungsi pelayanan dengan fungsi pendidikan keperawatan dan fungsi penelitian di asuhan keperawatan dan kebidanan serta monev Akreditasi serta penilaian Akreditasi di tahun 2025	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		UPT RSUD Malingpi	ng									
	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UP PERORANGAN DAN UPAYA								
					Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	1. masih perlu ada peningkatan pada jumlah dan sebaran SDMK RS khususnya Bidang Penunjang dan kemampuan serta keterampilan Sumber Daya Manusia Kesehatannya, Diantaranya adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai unit masingmasing dan keterampilan komunikasi yang baik dan ramah terhadap pasien sebagai konsumen	1. Koordinasi bidang dengan bidang pelayanan dan Koordinator tim code blue	
					Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	1. Waktu tunggu di rawat jalan masih belum sesuai karena belum adanya pembeda nomor antrian di poliklinik dan pendaftaran, pemeriksaan pasien yang masih lama 2. Kepuasan pelanggan dirawat jalan masih tidak sesuai karena kurang fahamnya alur pelayanan dan persyaratan untuk mendaftar di rawat jalan 3. Kematian > 48 jam masih Tinggi, karena pasien yang datang keruangan rawat inap ada yang sudah dengan kondisi koma/kondisi kurang bagus, tidak	1. Koordinasi dengan instalasi humas dan promkes untuk adanya sosialisasi secara elektronik dimedia online terkait alur pelayanan di rawat jalan dan persyaratan masuk rawat jalan 2. Perlunya sosialisasi ulang tentang SPM rawat inap terutama pada dokter spesialis mengenai jam visite 3. Perlu adanya dokter jaga ruangan dirawat inap pada jam 16.00-07.00 WIB 4. Perlu adanya pelatihan EWS secara	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										adanya dokter umum diruang perawatan Rawat Inap.	menyeluruh diruang rawat inap 5. Koodinasi dengan tim pengadaan formulir EWS	
					Capaian variabel indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Pemberi pelayanan di klinik spesialis dan jam buka pelayanan masih belum sesuai karena terdapat dokter spesialis yang sakit dan cuti tidak ada ganti     Dokter visite spesialis tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini karena dokter mengutamakan pasien rawat jalan     Kejadian pulang paksa masih Tinggi, kejadian ini karena tidak ada penunggu pasien, pasien terminal, mencari pengobatan tradisional	Koordinasi dengan bidang pelayanan untuk adanya dokter spesialis pengganti di poliklinik	
		UPTD Pelatihan Kese	ehatan									
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN K MANUSIA KESEHATAN				APASITAS SUMBER DAYA							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat (Orang)	420,00	449,00	106,90	Sangat Tinggi	Tidak ada target capain di tw 4 tetapi karena ada jadwal pelatihan yang mundur waktu pelaksanaanya, maka capaian realisasi program baru terealisasi di triwulan IV	Tidak ada	
		UPTD Laboratorium	Kesehatan D	aerah								
	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UP PERORANGAN DAN UPAYA								
					Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Parameter)	123,00	126,00	102,44	Sangat Tinggi	1. parameter yang menjadi target telah terlampaui dalam rangka akreditasi.	1. kedepan akan melaksanakan fungsi labkesmas tingkat 3 dengan 12 fungsi yang harus dilaksanakan 2. mempertahankan pengakuan akreditasi serta menambah akreditasi / sertifikasi lainnya	
1.3	1.03 URUSAN I RUANG			AN UMUM DAN PENATAAN								
		DINAS PEKERJAAN U	JMUM DAN P	ENATAAN RUANG								
		DINAS PEKERJAAN U INDUK)	JMUM DAN P	ENATAAN RUANG (UNIT								
	1.03.02			PROGRAM PENGELOLAAN S	SUMBER DAYA AIR (SDA)							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase penanganan banjir (%)	45,37	60,32	132,95	Sangat Tinggi	Dari luas banjir sebesar 256,204 km2 baru tertangani sebesar 115,154 km sampai dengan tahun 2024.	Akan terus dilakukan penanganan banjir pada tahun mendatang	
					Persentase penanganan abrasi (%)	77,69	68,60	88,30	Tinggi	Dari total panjang pantai yang mengalami kerusakan yaitu 12,1 km, panjang yang ditangani baru sepanjang 8,301 km.	Akan terus dilakukan penanganan abrasi pada tahun mendatang	
					Persentase penanganan situ/embung (%)	6,57	6,57	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan	Akan terus dilakukan penanganan situ/embung pada tahun mendatang	
					Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	68,28	81,04	118,69	Sangat Tinggi	Dari luas Daerah Irigasi sebesar 29.221 Ha yang baru tertangani adalah sebesar 18.338 Ha.	Akan terus dilakukan penanganan pada tahun mendatang	
	1.03.03			PROGRAM PENGELOLAAN I PENYEDIAAN AIR MINUM	DAN PENGEMBANGAN SISTEM							
					Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota (Persen)	10,00	8,57	85,70	Tinggi	Proses penyediaan SPAM Regional di Provinsi Banten telah melalui 6 tahapan dari 7 tahapan yang harus dilalui.	Akan dilaksanakan pada tahun mendatang	
	1.03.04			PROGRAM PENGEMBANGAI PERSAMPAHAN REGIONAL	N SISTEM DAN PENGELOLAAN							
					Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Persen)	0,43	0,25	58,14	Rendah	Penyediaan fasilitas persampahan Regional di Provinsi Banten telah melalui 4 tahapan dari 7 tahapan yang harus dilalui.	Akan terus dilaksanakan pada tahun mendatang	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.03.05			PROGRAM PENGELOLAAN I AIR LIMBAH	DAN PENGEMBANGAN SISTEM							
					Persentase penyediaan IPAL D yang tersambung (Persen)	7,87	1,31	16,65	Sangat Rendah	Dari 7 tahapan yang harus dilalu untuk penyediaan IPALD Regional yang tersambung, baru dilakukan 1 tahapan.	Akan terus dilaksanakan pada tahun mendatang	
	1.03.08			PROGRAM PENATAAN BAN	GUNAN GEDUNG							
				<u> </u>	Persentase Pengelolaan Gedung strategis Provinsi (Persen)	90,48	90,48	100,00	Sangat Tinggi	Tidak terdapat permasalahan	Akan terus dilaksanakan pada tahun mendatang	
	1.03.09			PROGRAM PENATAAN BAN	GUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
					Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Persen)	81,82	81,82	100,00	Sangat Tinggi	Tidak terdapat permasalahan	Akan terus dilakukan pada tahun mendatang	
	1.03.10			PROGRAM PENYELENGGAR								
					Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	96,00	98,66	102,77	Sangat Tinggi	Dari panjang jalan 856,993 km yang merupakan jalan dalam kondisi mantap adalah sebesar 816,260 km.	Akan terus ditindaklanjuti pada tahun mendatang	
					Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	97,00	175,00	180,41	Sangat Tinggi	Dari panjang jembatan 8.520,68 meter, jembatan dalam kondisi mantap adalah sebesar 7.502,46 meter.	Akan terus ditindaklanjuti pada tahun mendatang	
				Persentase Jalan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	84,44	165,89	196,46	Sangat Tinggi	Tidak terdapat permasalahan	Akan terus ditingkatkan di tahun mendatang		
					Persentase Penyelesaian Jalan Baru (%)	40,00	80,00	200,00	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan	Akan ditingkatkan pada tahun mendatang	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.03.11			PROGRAM PENGEMBANGA	N JASA KONSTRUKSI							
					Persentase pembinaan tenaga ahli konstruksi (Persen)	27,53	26,97	97,97	Sangat Tinggi	Dari jumlah 18.354 orang kebutuhan Tenaga Ahli di Provinsi Banten, baru terdapat sebanyak 4.950 orang Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi Banten	Akan terus ditingkatkan pada tahun mendatang	
	1.03.12			PROGRAM PENYELENGGAR	 AAN PENATAAN RUANG							
					Persentase Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	64,00	11,04	182,75	Sangat Tinggi	Tidak terdapat permasalahan	Akan terus ditingkatkan pada tahun mendatang	
					Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	100,00	275,00	275,00	Sangat Tinggi	Rapat Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang tahun 2025 sudah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) rapat koordinasi membahas permohonan informasi kesesuaian ruang dan 1 (satu) rapat koordinasi membahas penyelesaian permasalahan batas daerah dan batas wilayah administrasi di Provinsi Banten. Amanat Permen ATR/BPN 15 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN 9 Tahun 2022 bahwa rapat koordinasi dilaksanakan 1 kali per 6 bulan.	Akan disesuaikan kembali pada penyusunan renstra mendatang	
					Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang (%)	20,00	50,00	250,00	Sangat Tinggi	Pada tahun 2024 telah disusun 4 (empat) kajian teknis Kawasan Strategis Provinsi yaitu: Kajian Teknis KSP Kawasan Bendungan Karian, KSP	Akan disesuaikan pada perencanaan mendatang	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		UPTD Pengelolaan I	Daerah Aliran	Sungai Ciujung-Cidanau						Kawasan Pantai Selatan Terpadu, KSP Kawasan Rawa Danau dan KSP Kawasan Penyangga Adat Baduy. Capaian tersebut telah melampaui target renstra yang hanya menyusun 2 KSP dalam 1 tahun.		
	1.03.02			PROGRAM PENGELOLAAN S	UMBER DAYA AIR (SDA)							
					Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung- Cidanau (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	tidak ada	sudah dilaksanakan sesuai target capaian	
					Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung- Cidanau (%)	100,00	100,02	100,02	Sangat Tinggi	tidak ada	sudah dilaksanakan sesuai target capaian	
		UPTD Pengelolaan D	Daerah Aliran	Sungai Cidurian-Cisadane								
	1.03.02			PROGRAM PENGELOLAAN S	UMBER DAYA AIR (SDA)							
					Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Cidurian- Cisadane (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		UPTD Pengelolaan D	Daerah Aliran	Sungai Ciliman-Cisawarna								
	1.03.02			PROGRAM PENGELOLAAN S	SUMBER DAYA AIR (SDA)							
					Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman- Cisawarna (Persen)	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman- Cisawarna (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	tidak ada kendala		
		UPTD Pengelolaan Ja	alan dan Jem	batan Tangerang								
	1.03.10			PROGRAM PENYELENGGAR	AAN JALAN							
					Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Tangerang (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada	Tidak ada	
		UPTD Pengelolaan Ja	alan dan Jem	batan Serang-Cilegon								
	1.03.10			PROGRAM PENYELENGGAR	AAN JALAN							
					Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Serang Cilegon (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak Ada	Sudah dilaksanakan sesuai rencana	
		UPTD Pengelolaan J	alan dan Jem	batan Pandeglang								
	1.03.10			PROGRAM PENYELENGGAR	AAN JALAN							
					Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	tidak ada kendala	kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana	
		UPTD Pengelolaan J	alan dan Jem	batan Lebak								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.03.10		•	PROGRAM PENYELENGGAR	AAN JALAN							
					Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak Ada	Sudah Dilaksanakan Sesuai Rencana	
		UPTD Pengujian Bal Konstruksi	han, Konstrul	ksi Bangunan dan Informasi								
	1.03.11			PROGRAM PENGEMBANGA	N JASA KONSTRUKSI							
					Persentase layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan (Persen)	100,00	80,00	80,00	Tinggi	Tidak ada	Sudah dilaksanakan Sesuai Rencana	
1.4	1.04 URUSAN I PERMUKIMAN											
		ERMUKIMAN  DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM										
	1.04.02			PROGRAM PENGEMBANGAI	N PERUMAHAN							
					Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi (Persen)	62,34	84,50	135,55	Sangat Tinggi	Target telah tercapai, rumah korban bencana yang ditargetkan dibangun sebanyak 400 rumah sampai dengan 2026. Sanpai dengan tahun 2024 telah terbangun sebanyak 338 unit rumah, sedangkan pada tahun 2024 terbangun sebanyak 218 unit	penyelesaian unit rumah pada bencana banjir di kabupaten serang, kabupaten tangerang, lebak, pandeglang, kota serang dan cilegon	
					Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi (Persen)	50,00	25,00	50,00	Sangat Rendah	pada relokasi rumah yang terdampak program pemerintah diselesaikan dengan ganti kerugian (uang tunai) sehingga tidak ada rumah yang perlu direlokasi. kegiatan ini dilakukan dengan	pada perencanaan selanjutnya indikator relokasi rumah menjadi satu bagian dengan indikator penyediaan rumah bagi korban bencana	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		,								pendataan dan identifikasi.		
	1.04.03			PROGRAM KAWASAN PERM	IUKIMAN							
					Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Ha)	160,00	130,70	81,69	Tinggi	- Target telah tercapai - luasan permukiman kumuh ditangani 2,3 ha, dengan sisa 130,7 ha dengan luasan kumuh terbanyak di Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kota Tangerang selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon		
	1.04.05			PROGRAM PENINGKATAN F UTILITAS UMUM (PSU)	PRASARANA, SARANA DAN							
					Persentase Satuan Perumahan yang dilengkapi PSU (Persen)	99,44	99,56	100,12	Sangat Tinggi	Target belum tercapai, terdapat 9 lokasi tidak dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi		
	1.04.06			PROGRAM PENINGKATAN F KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, PERUMAHAN DAN KAWASA	DAN REGISTRASI BIDANG							
					Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ut (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target telah tercapai		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5		PEMERINTAHAN BIDA PERLINDUNGAN MASY		RAMAN DAN KETERTIBAN								
		SATUAN POLISI PAM	ONG PRAJA									
	1.05.02			PROGRAM PENINGKATAN H KETERTIBAN UMUM	KETENTERAMAN DAN							
	KETEKTIBAN UMUM				Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Persentase)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Jumlah kendaraan operasional tidak seimbang dengan luas wilayah     Belum ada dukungan OPD terkait dalam penyelesaian gangguan trantibum terutama permasalahan PMKS     Belum maksimalnya penanganan gangguan trantibum di wilayah perbatasan antar provinsi karena belum didukung PKS, sarana dan prasarana	1. Memaksimalkan sarana prasarana dan Jumlah personil yang ada dalam pelaksanaan penyelenggaraan trantibum linmas 2. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait, kabupaten/kota dan provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah provinsi Banten dalam pencegahan dan penindakan gangguan trantibum di wilayah perbatasan	
					Persentase Penegakan Perda dan Perkada (Persentase)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sanksi pidana yang tidak tegas dan jelas     anggaran yang minim untuk penyidikan     hambatan dari dalam organisasi seperti saran dan prasarana, sumber daya manusia     hambatan dari luar organisasi seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	1. melakukan sosialisasi perda secara masif 2. meningkatakan keterlibatan satpol pp dalam proses penyusunan perda 3. menambah jumlah SDM Satpol PP 4. meningkatkan kualitas SDM Satpol PP secara berkelanjutan 5. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar satpol pp dengan kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Pengadilan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum (Persentase)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	pemberkasan hasil penyelidikan atas pelanggaran pada tahun 2024 sebanyak 7 dan pemberkasan yang telah disidangkan ditempat sebanyak 7	Kinerja pada program ini adalah pemberkasan hasil penyelidikan bukan monitoing dan evaluasi sehingga perlu diperbaiki ditahun berikutnya	
	1.05.04			PROGRAM PENCEGAHAN, P PENYELAMATAN KEBAKAR KEBAKARAN	ENANGGULANGAN, AN DAN PENYELAMATAN NON							
					Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Realisasi sesuai target	Perlu adanya updeting peta rawan bencana kebakaran provinsi     peningkatan dan pengembangan sistem peringatan dini bencana kebakaran	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
	1.05.03			PROGRAM PENANGGULANG	AN BENCANA							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Rapergub tentang tata cara pemilihan dan kriteria anggota unsur pengarah BPBD, Rancangan Keputusan Gubernur tentang Tim Jitupasna dan dokumen Rencana Kontijensi belum di legalkan oleh Biro Hukum	-BPBD Provinsi Banten sudah membuat surat yang ditujukan ke Biro Hukum terkait Legal drafting Rapergub tentang tata cara pemilihan dan kriteria anggota unsur pengarah BPBD, Keg gub tentang Tim Jitupasna dan dokumen Rencana Kontijensi untuk disahkan oleh Kepala Daerah dan BPBD akan selalu berkoordinasi ke Biro Hukum sampai dokumen tersebut dilegalkan	
					Persentase Penanganan Pra Bencana (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	
					Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	
					Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	
1.6	1.06 URUSAN I	PEMERINTAHAN BIDA	NG SOSIAL									
		DINAS SOSIAL										
		DINAS SOSIAL (UNIT	TINDUK)									
	1.06.02			PROGRAM PEMBERDAYAAN	N SOSIAL							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial (Persen)	100,00	113,02	113,02	Sangat Tinggi	belum tersedianya data terpilah LKS yang terakreditasi di provinsi banten berikut data klien binaan panti     belum tersedianya data tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi di provinsi banten	melakukan pendataan secara terpilah terkait LKS yang terakreditasi di provinsi banten berikut data klien binaan panti     melakukan pendataan tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi di provinsi banten	
	1.06.03			PROGRAM PENANGANAN W KORBAN TINDAK KEKERAS								
				NORDAN TRIDAN NEIKENAS	Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	belum adanya regulasi yang mengatur teknis kegiatan penanganan pekerja migran dan korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke kabupaten kota     belum ada tim reaksi cepat     belum adanya shelter kesejahteraan sosial milik provinsi banten	1. penyusunan regulasi yang mengatur teknis kegiatan penanganan pekerja migran dan korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke kabupaten kota 2. pembentukan tim reaksi cepat 3. refungsionalisasi bangunan yang tidak terpakai untuk shelter kesejahteraan sosial di provinsi banten	
	1.06.04			PROGRAM REHABILITASI S	OSIAL							
					Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Persen)	100,00	155,19	155,19	Sangat Tinggi	belum optimalnya koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial     belum adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan teknis	1. penguatan koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial 2. menyusun regulasi yang mengatur pelaksanaan teknis kegiatan rehabilitasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										kegiatan rehabilitasi sosial 3. belum ada tim reaksi cepat	sosial 3. pembentukan tim reaksi cepat	
	1.06.05			PROGRAM PERLINDUNGAN	DAN JAMINAN SOSIAL							
					Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial (%)	100,00	129,6	129,60	Sangat Tinggi	1. belum adanya analisa kebutuhan nilai bantuan 2. belum optimalnya sinkronisasi dengan kabupaten kota terkait sumber data yang digunakan 3. belum adanya pengukuran keberhasilan pemberian bantuan	1. menyusun analisa kebutuhan nilai bantuan 2. sinkronisasi dengan kabupaten kota terkait sumber data yang digunakan 3. menyusun pengukuran keberhasilan pemberian bantuan	
					Persentase Pegelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	1. belum akuratnya data PMKS, PSKS, dan kemiskinan 2. belum optimalnya sinkronisasi buku data dengan data DTKS	1. rujukan data menggunakan DTSEN (data terpadu sosial ekonomi nasional) 2. penguatan rapat koordinasi dengan kabupaten kota terkait data DTSEN	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (%)	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	belum adanya analisa kebutuhan nilai bantuan     belum adanya regulasi daerah pelaksanaan teknis     belum optimalnya koordinasi dengan kabupaten kota terkait penanganan fakir miskin di daerah perbatasan     belum adanya pengukuran keberhasilan pemberian bantuan	menyusun analisa kebutuhan nilai bantuan     menyusun regulasi daerah pelaksanaan teknis     penguatan koordinasi dengan kabupaten kota terkait penanganan fakir miskin di daerah perbatasan     belum adanya pengukuran keberhasilan pemberian bantuan	
					Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal (%)	100,00	190	190,00	Sangat Tinggi	1. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengasuhan terhadap bayi terlantar 2. belum optimalnya pengasuhan sementara selama proses pengangkatan anak	1. pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengasuhan terhadap bayi terlantar 2. optimalisasi pengasuhan sementara selama proses pengangkatan anak	
	1.06.06			PROGRAM PENANGANAN B	ENCANA							
					Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi (Persen)	100,00	114,29	114,29	Sangat Tinggi	belum terpenuhinya sarana dan prasarana kebencanaan     belum optimalnya koordinasi lintas sektor provinsi dalam tanggap darurat bencana     terbatasnya kemampuan pemenuhan logistik pada daerah daerah rawan bencana     belum adanya regulasi terkait penanganan pra	pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan     penguatan koordinasi lintas sektor provinsi dalam tanggap darurat bencana     optimalisasi pemenuhan logistik pada daerah daerah rawan bencana     menyusun regulasi terkait penanganan pra	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										dan pasca bencana	dan pasca bencana	
		UPTD Perlindungan	Sosial									
	1.06.04			PROGRAM REHABILITASI S	OSIAL							
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100,00	125	125,00	Sangat Tinggi	1.belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana di panti yang sesuai standar 2. belum optimalnya pemenuhan SDM pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial di panti yang sesuai standar 3. belum optimalnya tugas, pokok, dan fungsi UPTD panti dalam melaksanakan pelayanan yang dikarenakan adanya regulasi yang belum sesuai	1. optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana di panti yang sesuai standar 2. optimalisasi pemenuhan SDM pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial di panti yang sesuai standar 3. pengusulan perubahan regulasi terkait tugas, pokok, dan fungsi UPTD panti dalam melaksanakan pelayanan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	1.belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana di panti yang sesuai standar 2. belum optimalnya pemenuhan SDM pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial di panti yang sesuai standar 3. belum optimalnya tugas, pokok, dan fungsi UPTD panti dalam melaksanakan pelayanan yang dikarenakan adanya regulasi yang belum sesuai	1. optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana di panti yang sesuai standar 2. optimalisasi pemenuhan SDM pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial di panti yang sesuai standar 3. pengusulan perubahan regulasi terkait tugas, pokok, dan fungsi UPTD panti dalam melaksanakan pelayanan.	
		UPTD Panti Sosial Ro	ehabilitasi Tu	ına Sosial								
	1.06.04			PROGRAM REHABILITASI S	OSIAL							
					Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100,00	120	120,00	Sangat Tinggi	1.belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana di panti yang sesuai standar 2. belum optimalnya pemenuhan SDM pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial di panti yang sesuai standar 3. belum optimalnya tugas, pokok, dan fungsi UPTD panti dalam melaksanakan pelayanan yang dikarenakan adanya regulasi yang belum sesuai	1. optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana di panti yang sesuai standar 2. optimalisasi pemenuhan SDM pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial di panti yang sesuai standar 3. pengusulan perubahan regulasi terkait tugas, pokok, dan fungsi UPTD panti dalam melaksanakan pelayanan.		
2	2 URUSAN PEN PELAYANAN D	MERINTAHAN WAJIB Y ASAR	ANG TIDAK E	BERKAITAN DENGAN								
2.1	2.22 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG KEBUDAY	/AAN								
		DINAS PENDIDIKAN	DAN KEBUDA	AYAAN								
		DINAS PENDIDIKAN	DAN KEBUDA	AYAAN (UNIT INDUK)								
	2.22.02			PROGRAM PENGEMBANGA	N KEBUDAYAAN							
					Kualitas pengembangan kebudayaan (Kinerja)	91,00	88,98	97,78	Sangat Tinggi			
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA		AN PENGELOLAAN CAGAR									
	HDTD Toman Pudaya dan Musaum			Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola (Persen)	75,00	100	133,33	Sangat Tinggi				
	UPTD Taman Budaya dan Museum											
	2.22.06			PROGRAM PENGELOLAAN F	PERMUSEUMAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pertumbuhan Jumlah Pengunjung museum dan Taman Budaya provinsi (Persen)	20,00	87,2	436,00	Sangat Tinggi	saat ini yang digunakan gedung museum baitul Qur'an	Akan dilakukan peningkatan tipe museum dan taman budaya dari tibe B ke tipe A	
2.2	2.10 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG PERTANA	HAN								
		DINAS PERUMAHAN	RAKYAT DAN	N KAWASAN PERMUKIMAN								
	2.10.03			PROGRAM PENGADAAN TAI UMUM	NAH UNTUK KEPENTINGAN							
					Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target telah tercapai, pengadaan tanah telah dikoordinasikan dan dilaporkan kepada dinas perkim sehingga ketercapaiannya telah 100%	perlu pengkoordinasian terhadap pengadaan tanah sesuai dengan RTRW	
	2.10.06				ANAH DAN GANTI KERUGIAN MUM DAN TANAH ABSENTEE							
					Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target telah tercapai, telah dilakukan redistribusi tanah bekerja sama dengan badan pertanahan tingkat kanwil provinsi banten	akan berkoordinasi dengan BPN terkait data dukung	
	2.10.10			PROGRAM PENATAGUNAAN	I TANAH							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI				Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	kegiatan tercapai namun penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah sulit untuk dihitung	akan ditinjau ulang program ini untuk diambil	
2.3	2.07 URUSAN I	PEMERINTAHAN BIDA	NG TENAGA I	KERJA								
		DINAS KETENAGAKE	ERJAAN DAN	FRANSMIGRASI								
		DINAS KETENAGAKE INDUK)	ERJAAN DAN	FRANSMIGRASI (UNIT								
	2.07.02			PROGRAM PERENCANAAN	TENAGA KERJA							
					Persentase Perencanaan Tenaga Kerja (Persen)	8,80	5,70	64,77	Rendah	Belum semua kab/kota memiliki dokumen RTK     SDM di Kab/Kota belum semua mengikuti terkait Blmtek Penyusunan RTKD	1. akan dilakukan poendampingan dalam penyusunan RTK Kab/Kota. 2. akan dilakukan FGD terkait dengan Bimtek Penyusunan RTKD.	
	2.07.03			PROGRAM PELATIHAN KER TENAGA KERJA	JA DAN PRODUKTIVITAS							
					Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja (%)	5,41	3,53	65,25	Sedang	Kurangnya Koordinasi	Akan lebih intensif berkoordinasi dengan bidang pelatihan dalam rangka mencapai target.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Produktivitas Tenaga Kerja (%)	5,06	9,36	184,98	Sangat Tinggi		akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	
	2.07.04			PROGRAM PENEMPATAN T	ENAGA KERJA							
					Persentase Kesempatan Kerja (Persen)	13,90	12,38	89,06	Tinggi	Kurangnya daya saing tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja untuk dapat bersaing di pasar kerja.	Bidang Penempatan membuat strategi kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kompetensi daya saing tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja	
	2.07.05			PROGRAM HUBUNGAN IND	USTRIAL							
					Persentase Hubungan Industrial (%)	4,48	2,49	55,58	Rendah	1. masih Rendahnya kesadaran perusahan Peraturan dan Perjanjian Kerja Bersama     2. di beberapa perusahaan belum terbantuknya LKS Bipartit     3. Komunikasin dan koordinasi belum maksimal	melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkesinambungan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja (%)	10,00	10,00	100,00	Sangat Tinggi	1.masih banyak perusahaan yang belum menyusun dan melaksanakan struktur skala upah. 2. terdapat peraturan perundangan ketenagakerjaan yang baru	1.melakukan pembinaan bimtek, penyusunan struktur skala upah.     2. mempelajari dan mempedomani peraturan tersebut.	
					Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)	10,00	10,00	100,00	Sangat Tinggi	belum tersedianya data kepersertaan BPJS ketenagakerjaan	melakukan koordinasi dan pendataan data kepesertaan dengan BPJS ketenagakerjaan.	
	2.07.06			PROGRAM PENGAWASAN K	ETENAGAKERJAAN							
					Persentase Kondisi Lingkungan Kerja (Persen)	7,33	4,94	67,39	Sedang	1.bersadarkan WLKP jumlah perushaan setiap tahunnya terus bertambah Sedangkan pengawas ketenagakerjaan jumlahnya berkurang, Sedangkan ada calon pengawas yang sudah melaksanakan diklat dan uji kom blum di lantik menjadi fungsional pengawas ketenagakerjaan.  2. struktur kelembagaan UPTD pengawasan yang saat ini sudah terbit Pergub 35 th 2023, tentang pembentukan, Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas	1.mengusulakan ke BKD untuk segera melantik pegawai untuk menjadi pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan.     2. perlu dibentuk UPTD pengawasan TIPE A agar pelayanan pengawasan lebih efaktif.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksanan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) TIPE B.		
		UPTD Latihan Kerja										
	2.07.03			PROGRAM PELATIHAN KER TENAGA KERJA	JA DAN PRODUKTIVITAS							
					Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja (Persen)	5,41	3,53	65,25	Sedang			
2.4	2.08 URUSAN PERLINDUNGA		NG PEMBERI	DAYAAN PEREMPUAN DAN								
				UAN, PERLINDUNGAN JUARGA BERENCANA								
			UAN, PERLINDUNGAN LUARGA BERENCANA (UNIT									
	2.08.02			PROGRAM PENGARUSUTAM PEMBERDAYAAN PEREMPU								
					Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD (%)	10,00	21,75	217,50	Sangat Tinggi	-	-	
					Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	17,65	14,00	79,32	Tinggi	Belum tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di Parlemen , Periode 2019- 2024 Jumlah anggota parlemen Perempuan di DPRD Banten sebanyak 16 orang dari 85 orang anggota Parlemen, sedangkan Periode 2024-2025 jumlah anggota parlemen perempuan di DPRD Banten sebanyak 14 orang dari 100 orang anggota Parlemen	Peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Kontribusi Perempuan dalam pemberdayaan Ekonomi (%)	37,13	32,14	86,56	Tinggi	Masih rendahnya partispasi perempuan dalam bidang ekonomi, antara lain masih Tingginya angka penggangguran perempuan yang berdampak pada rendahnya pendapatan ekonomi perempuan	Peningatkan Pemberdayaan perempuan agar dapat bekerja pada sektor formal maupun informal serta membangun sinergitas dengan stakeholder	
	2.08.03			PROGRAM PERLINDUNGAN	PEREMPUAN							
					Cakupan peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	
	2.08.04			PROGRAM PENINGKATAN K	KUALITAS KELUARGA							
					Persentase Peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (Persen)	36,36	33,90	93,23	Sangat Tinggi	Belum optimalnya Peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan tentang upaya peningkatan kualitas keluarga yang berkesetaraan gender dan hak anak dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	2.08.05			PROGRAM PENGELOLAAN S ANAK	 SISTEM DATA GENDER DAN							
					Pesentase Pengelolaan Sistem Data Gender (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.08.06			PROGRAM PEMENUHAN HA	K ANAK (PHA)							
					Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	74,30	62,13	83,62	Tinggi	Belum optimalnya pelembagaan pemenuhan hak anak dan penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Penanganan yang terintegrasi, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi melibatkan partisipasi dan dukungan dari seluruh komponen, mulai dari keluarga, masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat.	
	2.08.07			PROGRAM PERLINDUNGAN	KHUSUS ANAK							
					Indeks Perlindungan Khususus Anak (IPKA) (Indeks)	85,24	82,41	96,68	Sangat Tinggi	Masih Tingginya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak	Penanganan yang terintegrasi, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi melibatkan partisipasi dan dukungan dari seluruh komponen , mulai dari keluarga, masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat.	
		UPTD Perlindungan	Perempuan o	dan Anak								
	2.08.03			PROGRAM PERLINDUNGAN	PEREMPUAN							
				1	Persentase cakupan perempuan korban kekerasan dan perilaku salah	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	

N.	Urusan	Organisasi Perangkat	Walt Walter	Hariar Day area	L. Plata Winst Domini	W	D. Harai	Capaian	Waterwal	Dlakar	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut
No	Pemerintahan	Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)	Kategori	Permasalahan	Permasalahan	Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan ter (Persen)							
	2.08.07			PROGRAM PERLINDUNGAN								
					Persentase cakupan anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	
2.5	2.12 URUSAN I DAN PENCATA		NG ADMINIS	TRASI KEPENDUDUKAN								
				UAN, PERLINDUNGAN JUARGA BERENCANA								
				UAN, PERLINDUNGAN LUARGA BERENCANA (UNIT								
	2.12.02			PROGRAM PENDAFTARAN	PENDUDUK							
				,	Persentase Cakupan layanan pendaftaran penduduk (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	
	2.12.03			PROGRAM PENCATATAN SI	PIL							
				1	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun (%)	99,00	95,75	96,72	Sangat Tinggi	Kerjasama layanan pencatatan akta kelahiran oleh fasilitas kesehatan dengan Disdukcapil sesuai domisili belum menyeluruh sehingga berdampak pada percepatan layanan penerbitan akta kelahiran	Peningkatan Kerjasama dengan para pemangku kepentingan	
					Persentase cakupan kepemilikan akta kematian	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					pada seluruh peristiwa kematian (%)							
					Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	
	2.12.04			PROGRAM PENGELOLAAN I KEPENDUDUKAN	NFORMASI ADMINISTRASI							
					Persentase Cakupan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan (Persen)	24,39	24,39	100,00	Sangat Tinggi	-	-	
	2.12.05			PROGRAM PENGELOLAAN F								
		 			Ketersediaan Profil Kependudukan (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	-	-	
2.6	2.14 URUSAN KELUARGA BE	RENCANA										
		ANAK, KEPENDUDUI	KAN DAN KEI									
				UAN, PERLINDUNGAN .UARGA BERENCANA (UNIT								
	2.14.02			PROGRAM PENGENDALIAN	PENDUDUK							
		T NOGRALIA T ZINGZINZI		Median kawin pertama perempuan pada kelompok umur 10-49 tahun (Tahun)	22,10	22,00	99,55	Sangat Tinggi	-	-		
	2.14.03	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN		PROGRAM PEMBINAAN KEI	LUARGA BERENCANA (KB)							
					Angka prevalensi kontrasepsi moden/ Modern Contracetive (mCPR) (Persen)	61,39	63,6	103,60	Sangat Tinggi	Masih rendahnya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kesertaan ber-KB modern (mCPR)	Peningkatan layanan KB, Penyediaan Materi KIE KB, ketersediaan stok alat kontrasepsi yang memadai, ketersediaan fasilitas KB, peningkatan kompetensi petugas KB sehingga Program KB dapat berjalan dengan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											semestinya	
	2.14.04			PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA (KS								
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Spesific Fertility Rate/ASFR) (Nilai)	9,00	13,9	154,44	Sangat Tinggi	Belum optimalnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja	Perlu adanya sistem informasi yang masif tentang kesehatan reproduksi di sekolah dan keluarga	
2.7	2.09 URUSAN I	PEMERINTAHAN BIDA	NG PANGAN									
		DINAS KETAHANAN	PANGAN									
		DINAS KETAHANAN	PANGAN (UN	IT INDUK)								
	2.09.02			PROGRAM PENGELOLAAN S UNTUK KEDAULATAN DAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (%)	100,00	119,76	119,76	Sangat Tinggi	cadangan pangan pemerintah provinsi banten berdasarkan peraturan badan pangan nasional adalah sebesar 370,31 ton, CPP provinsi banten per 31 desember adalah 443,52 ton sehingga presentase CPP provinsi banten sebesar 119,76% namun perlu ditingkatkan cadangan pangan bukan beras	peningkatan cadangan pangan bukan beras di renstra 2025 - 2029 adalah telur dan ayam	
	2.09.03			PROGRAM PENINGKATAN E KETAHANAN PANGAN MASY								
					Skor Pola Pangan Harapan (%)	88,00	92,16	104,73	Sangat Tinggi	target skor pola pangan harapan tercapai namun masih perlu ditingkatkan diversifikasi pangan lokal	peningkatan diversifikasi pangan lokal melalui promosi beragam bergizi seimbang dan aman	
	2.09.04			PROGRAM PENANGANAN K	ERAWANAN PANGAN							
					Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	50,00	50,00	100,00	Sangat Tinggi	baseline data untuk persentase penanganan daerah rawan pangan adalah 18 kecamatan yang tertuntaskan kerawanan pangannya namun	penganganan daerah rawan pangan akan didasarkan pada peta FSVA tahun berjalan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.09.05			PROGRAM PENGAWASAN K	EAMANAN PANGAN							
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	50,00	50,00	100,00	Sangat Tinggi	target persentase pangan segar asal tumbuhan tercapai namun perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap pangan segar yang beredar	peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha		
		UPTD Sertifikasi Mu	tu dan Keam	anan Pangan								
	2.09.05			PROGRAM PENGAWASAN K	EAMANAN PANGAN							
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	50,00	50	100	Sangat Tinggi	target persentase pangan segar asal tumbuhan tercapai namun perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap pangan segar yang beredar	peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha		
2.8	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			GAN HIDUP								
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN	HIDUP DAN	KEHUTANAN (UNIT INDUK)								
	2.11.02			PROGRAM Perencanaan LIN	IGKUNGAN HIDUP							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	target tercapai namun perlu adanya peningkatan kualitas dokumen KLHS Kab/Kota melalui optimalisasi kompetensi tenaga ahli	Optimalisasi Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	
	2.11.03			PROGRAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN								
					Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Persen)	61,00	61,50	100,82	Sangat Tinggi	1.Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan agar seluruh rencana bisa dieksekusi dengan baik 2.Terbatasnya pengatahuan dan keterampilan sumber daya manusia baik tingkat lokal/daerah maupun nasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 3.Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui strategi pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	
	2.11.04			PROGRAM PENGELOLAAN K (KEHATI)	KEANEKARAGAMAN HAYATI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Persen)	14,00	1,00	7,14	Sangat Rendah	Target Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati belum tercapai karena dokumen rencana induk pengelolaan kehati belum ada, belum adanya sarana prasarana pengellaaan kehati	- penyusunan Dokumen RIP dan Penyedian sarana prasarana kehati	
	2.11.05			PROGRAM PENGENDALIAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERACUN (LIMBAH B3)								
					Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 (Persen)	100,00	200,00	200,00	Sangat Tinggi	Masih banyak pelaku usaha/ kegiatan di Provinsi Banten yang belum melakukan pengelolaan Limbah B3 yang sesuai dengan ketentuan peraturan 2. Keterbatasan SDM dan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan Pengendalian dalam pengelolaan limbah B3 dan non B3 terhadap pelaku usaha yang ada di Provinsi Banten	1. Perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian secara optimal terhadap pelaku usaha/ kegiatan yang tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Agar Ditambahkan Jumlah SDM danjumlah anggaran untuk melaksanakan pembinaan dan Pengendalian dalam pengelolaan limbah B3 dan non B3 terhadap pelaku usaha yang ada di Provinsi Banten	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERH IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										and a second	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup (Persen)	85,00	86,87	102,20	Sangat Tinggi	1. Persetujuan Lingkungan belum terintegrasi (semula kewenangan Kab/Kota menjadi Provinsi) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam Pelaporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup belum optimal 3. Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Banten belum optimal	1. Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Persetujuan Lingkungan 2. Optimalisasi Pembinaan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban Pelaporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	
	2.11.07			PROGRAM PENGAKUAN KE HUKUM ADAT (MHA), KEAR YANG TERKAIT DENGAN PP	RIFAN LOKAL DAN HAK MHA							
					Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (Persen)	11,00	17,65	160,45	Sangat Tinggi	tidak ada masalah	-	
	2.11.08				PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN N HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
					Presentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan	100,00	150,00	150,00	Sangat Tinggi	tidak ada masalah	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					hidup (Persen)							
	2.11.09			PROGRAM PENGHARGAAN MASYARAKAT	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK							
		11.10 PROGRAM PENANGAN HIDUP			Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaga/7)	68,00	235,00	345,59	Sangat Tinggi	tidak ada masalah	-	
	2.11.10			PROGRAM PENANGANAN PI HIDUP	ENGADUAN LINGKUNGAN							
					Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Lingkungan (PPNS-LH)	Mengusulkan Bimtek terkait PPLH dan PPNS LH	
	2.11.11			PROGRAM PENGELOLAAN F	PERSAMPAHAN							
					Persentase penanganan sampah sesuai kewenangan provinsi (Persen)	100,00	101,55	101,55	Sangat Tinggi	1. Rendahnya capaian pengurangan sampah di Provinsi Banten (target : 26%, sedangkan capaian hanya 9,03 %) 2. rendahnya capaian penanganan sampah di Provinsi Banten (target 73%, capaian hanya 34,75%)	Perlu dilakukan Peningkatan capaian pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota secara optimal misalnya dalam hal 1) peningkatan pembatasan timbulan sampah dari fasilitas pengelolaan sampah/sumber sampah; 2) optimalisasi dalam melakukan daur ulang dan pemanfaatan sampah 3) Strategi dalam pemasaran/penjualan produk hasil olahan 4) Melakukan sosialisasi /pembinaan kepada masyarakat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			•								terkait tentang pengelolaan sampah agar diperluas kembali;	
		UPTD Laboratorium	ı Lingkungan									
	2.11.03			PROGRAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN								
					Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan (Persen)	21,80	21,80	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada masalah	-	
2.9	2.13 URUSAN DESA			DAYAAN MASYARAKAT DAN								
		DINAS PEMBERDAY	AAN MASYAR	AKAT DAN DESA								
	2.13.02			PROGRAM PENATAAN DESA	Ā							
					Cakupan Jumlah Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (Desa)	69,00	69,00	100,00	Sangat Tinggi	- Keberadaan Lembaga Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Banten belum terdokumentasikan dengan baik; - Pengurus lembaga hukum masyarakat adat yang ada belum terbina dengan baik.	- Perlunya identifikasi dan pendokumentasian lembaga Desa dan lembaga masyarakat hukum adat secara berkala; - Perlunya pembinaan bagi pengurus lembaga Desa dan lembaga masyarakat hukum adat, baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi.	
	2.13.03			PROGRAM PENINGKATAN H	KERJA SAMA DESA							
					Persentase desa yang melakukan kerjasama (Persen)	1,19	1,79	150,42	Sangat Tinggi	Belum tersediannya pemetaan potensi desa yang akan dikerjasamakan     Belum optimalnya dukungan lembaga desa     Belum optimalnya kapasitas aparatur	Penyusunan pemetaan potensi desa yang akan dikerjasamakan     Peningkatan koordinasi dengan lembaga desa     Peningkatan kapasitas	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										pemerintahan desa	aparatur pemerintahan desa	
	2.13.04			PROGRAM ADMINISTRASI I	PEMERINTAHAN DESA							
					Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang (Persen)	6,41	11,99	187,05	Sangat Tinggi	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan desa     Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa     Belum terpenuhinya sarana dan prasarana layanan pemerintah desa	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa     Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa     Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pemerintah desa	
	2.13.05				N LEMBAGA AGA ADAT DAN MASYARAKAT							
					Cakupan jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat di desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang (Desa)	69,00	91,00	131,88	Sangat Tinggi	Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa     Belum optimalnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa     Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	
2.10	2.15 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG PERHUBU	INGAN								
		DINAS PERHUBUNGA	AN									
	DINAS PERHUBUNGAN (UNIT INDUK)											
	2.15.02			PROGRAM PENYELENGGAR ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	AAN LALU LINTAS DAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan (%)	100,00	154,67	154,67	Sangat Tinggi	- Secara umum tidak ada permasalahan pelaksanaan gaturlalin pada libur 1. lebaran 2. nataru 3. pelayanan pimpinan daerah dan pimpinan pusat 4. long weekend 5. penegakan hukum terhadap muatan lebih dan odol ( over dimensi ovel loading)	- Sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan menjadi silpa	
					Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaaan jalan (%)	100,00	137,88	137,88	Sangat Tinggi	- Forum LLAJ belum dilaksanakan, SK Gubernur tentang Forum LLAJ tidak kunjung turun dari Biro Hukum Pembayaran (pembangunan gedung ATCS, pembayaran instalasi kamera ATCS simpang 3 - simpang 4, pemasangan video wall Comand Center ATCS, pembayaran jaringan internet (fiber optic) ATCS), dilaksanakan mundur dari rencana.	- Forum LLAJ tidak dilaksanakan. - Pembayaran dilakukan mundur karena melengkapi kesepakatan. - Sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan menjadi silpa	
					Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi (%)	50,00	65,78	131,56	Sangat Tinggi	- Secara umum pekerjaan selesai. - Adapun kendala selama pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan dengan pilihan solusi terbaik. - Target Prasarana Jalan	- Pemeliharaan perlu dilakukan berkelanjutan. - Sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan menjadi silpa	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										28 unit. - Target Perlengkapan Jalan 1.860 unit.		
					persentase perencanaan transportasi yang diterapkan (%)	50,00	100,00	200,00	Sangat Tinggi	- kajian yang dilakukan pada sebelumnya diterapkan / ditindaklanjuti pada tahun berikutnya minimal 50% kajian sehingga pada tahun ini kajian yang diterapkan / ditindaklanjuti yaitu : 1. Studi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II 2. Studi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Masal		

dapat dibelanjakan menjadi silpa renstra kedepan diperlukan sub kegiat yang mendukung audi dan inspeksi  Persentase Pemenuhan 40,00 110,32 275,80 Sangat - operasionalisasi SAUM - akan dilaksanakan	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Persentase Pemenuhan   Rebutuhan angkutan massal   Persentase Pemenuhan   Persentase Peme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
laksankan karena belum ada izin dari pimpinan daerah, uji coba juga belum dilaksanakan dilaksanakan dengan menggunakan bus sekolah milik dishub dengan rute untirta sindangsari ke MOS (koridor 3)  - Sebagian belanja sewa kendaraan bermotor pada kegiatan mudik bersama						Reselamatan Lalulintas (%)  Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal				Tinggi	terkait pembangunan ZoSS di wilayah Tangerang.  - operasionalisasi SAUM (sarana angkutan umum massa) SMA (serang	pendenkatan dan sosialisasi, sehingga pembangunan ZoSS dapat dilakukan. - Sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan menjadi silpa. - renstra kedepan diperlukan sub kegiatan yang mendukung audit dan inspeksi	
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		2.15.03			PROGRAM PENGELOLAAN E	FLAYARAN					laksankan karena belum ada izin dari pimpinan daerah, uji coba juga belum dilaksanakan dengan menggunakan bus sekolah milik dishub dengan rute untirta sindangsari ke MOS (koridor 3) - Sebagian belanja sewa kendaraan bermotor pada kegiatan mudik bersama		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (%)	100,00	96,16	96,16	Sangat Tinggi	Secara umum pekerjaan selesai, yaitu : 1. Studi DPPT Pembangunan Pelabuhan Sumur. 2. Studi Penlok Pembangunan Pelabuhan Sumur pelabuhan pengumpan regional yang menjadi kewenangan provinsi sampai saat ini belum diserahkan dari kementerian (PPR karangantu, anyerlor, dan labuan)	- Sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan menjadi silpa - akan dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada kementerian perhubungan terkait penyerahan P3D pelabuhan pengumpan regional yang ada di provinsi banten - sudah dilaksanakan tahapan FS, penlok, dan DPTP terkait rencana pembangunan pelabuhan pengumpan regional untuk mendukung wisata di kecamatan sumur kabupatan pandeglang	
					Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (%)	100,00	89,68	89,68	Tinggi	- Monitoring angkutan laut dari target 3 kali, hanya dilaksanakan 1 kali. - Belanja modal SBNP ditiadakan.	- Adanya pemutusan kontrak sepihak terkait belanja BBM dengan pihak ke-3. - SBNP akan dilaksanakan revitalisasi Tahun 2025 - Sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan menjadi silpa	
	2.15.05			PROGRAM PENGELOLAAN P	PERKERETAAPIAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (Persen)	100,00	154,51	154,51	Sangat Tinggi	Secara umum pekerjaan selesai	- Sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan menjadi silpa - pada renstra berikutnya agar disiapkan sub kegiatan pembangunan infrastruktur kereta api kewenangan provinsi	
		UPTD Pengelolaan P	rasarana Per	hubungan								
	2.15.02			PROGRAM PENYELENGGAR ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	 AAN LALU LINTAS DAN							
					Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (UPTD) (%)	100,00	86,61	86,61	Tinggi	-	- Sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan menjadi silpa	
	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN F	 PELAYARAN								
					Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan Pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan (Persen)	100,00	97,89	97,89	Sangat Tinggi	- kelebihan belanja lembur pada SIPD (UPTD). - Belanja pelatihan tidak diserap (UPTD).	Sisa anggaran menjadi Silpa	
2.11	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
		DINAS KOMUNIKASI PERSANDIAN	, INFORMATI	KA, STATISTIK DAN								
	2.16.02			PROGRAM PENGELOLAAN I PUBLIK	NFORMASI DAN KOMUNIKASI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	realisasi sesuai target dengan rumus hitung: Jumlah masyarakat yang memahami pesan informasi publik yang disebarluaskan 8.846.177 jiwa dibagi dengan jumlah masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan informasi publik 8.846.177 jiwa jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun di provinsi banten dikalikan 100, sehingga tercapai 100 %	akan dilakukan perubahan indikator program pada renstra	
					Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF (%)	48,48	84,62	174,55	Sangat Tinggi	Capaian melebihi target dengan rumus hitung: â° OPD yg mencapai katagori INFORMATIF berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Banten = 33 OPD, dari target 39 OPD, sehingga manghasilkan = 84,62 % (melebihi target = 48,48%)	Akan dilakukan perubahan pada indikator program pada Renstra 2025-2029	
	2.16.03			PROGRAM PENGELOLAAN A	APLIKASI INFORMATIKA							
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (%)	93,94	100,00	106,45	Sangat Tinggi	Realisasi sesuai target dengan rumus hitung: â' OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian = 39 OPD dari target OPD, hasil realisasi = 100%, melebihi target tahunan yaitu 93,94%	akan dilakukan perubahan indikator program pada Renstra 2025-2029	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	realisasi sesuai target dengan penghitungan yaitu: dari target 21 layanan publik tercapai seluruhnya, antara lain : Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (dalam Portal Resmi Prov Banten) : 21 Layanan Publik	akan terus dilakukan proses pengintegrasian layanan publik yang diselenggarakan secara online	
2.12	2.20 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG STATISTI	К								
		DINAS KOMUNIKASI PERSANDIAN	, INFORMATI	KA, STATISTIK DAN								
	2.20.02			PROGRAM PENYELENGGAR	AAN STATISTIK SEKTORAL							
					Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyususnan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Realisasi sudah sesuai target dengan rumus hitung yaitu: â~ OPD yg menggunakan Data Statistik Sektoral adalah 39 OPD dan telah ditetapkan dalam SK Penyebarluasan Data dan didiseminasikan pada e-Walidata SIPD Kemendagri RI dari target 39 OPD sehingga realisasi kinerja = 100 %	akan terus dilakukan pembinaan terhadap OPD terkait penyelenggaraan statistik sektoral dan pemanfaatan data tersebut untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	
2.13	2.21 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG PERSAND	IAN								
		DINAS KOMUNIKASI PERSANDIAN	, INFORMATI	KA, STATISTIK DAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.21.02			PROGRAM PENYELENGGAR PENGAMANAN INFORMASI	AAN PERSANDIAN UNTUK							
					Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Persen)	64,00	68,22	106,59	Sangat Tinggi	belum tersedianya pergub manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan 2. masih kurangnya SDM keamanan informasi 3. belum melakukan penilaian resiko sistem elektronik secara menyeluruh 4. belum menerapkan keamanan data dan informasi sesuai standar BSSN	1. menyusun pergub manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan 2. berkoordinasi dengan BKD terkait pemenuhan SDM keamanan informasi 3. melakukan penilaian resiko sistem elektronik secara menyeluruh 4. menerapkan keamanan data dan informasi sesuai standar BSSN	
2.14	2.17 URUSAN I MENENGAH	PEMERINTAHAN BIDA	NG KOPERAS	I, USAHA KECIL, DAN								
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			OAN MENENGAH								
	2.17.03			PROGRAM PENGAWASAN D	AN PEMERIKSAAN KOPERASI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Koperasi Aktif (persen)	25,00	25,00	100,00	Sangat Tinggi	pencapaian target kinerja koperasi aktif masih terdapat kendala antar lain:  1. pelaksanaan pengawasan dan penilain koperasi belum dapat dilaksanakan secara optimal di karenakan terkendala waktu dan SDM Pengawas koperasi yang belum sesuai dengan jumlah koperasi yang ada 2. belum semua koperasi melaporkan RAT ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten dengan permasalahan diatas dinas koperasi dan UKM provinsi Banten telah melakukan pencapaian target semaksimal mungkin sehingga target tercapai	1. Menambah Pengawas Koperasi 2. Memaksimalkan SDM Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) untuk memfasilitasi Koperasi dalam pelaksanaan Laporan RAT sehingga Koperasi bisa melaporkannya ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten	
	2.17.05			PROGRAM PENDIDIKAN DA	N LATIHAN PERKOPERASIAN							
					Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	bahwasanya masyarakat lebih suka pelatihannya ke teknis dan butuh permodalan	pelatihan harus spesifik dan pemerintah harus mengganggarkan bantuan modal untuk koperasi.	
	2.17.06			PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI	I DAN PERLINDUNGAN							
					Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan	25,00	25,00	100,00	Sangat Tinggi	terdapat beberapa permasalahan mengenai fasilitasi akses terhadap koperasi mengenai	bagi para koperasi yang difasilitasi akses tersebut diharapakan pemndamping atau	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					non perbakan) (Persen)					masalah kemitraan melalui rantai pasok, penyediaan pasar bagi koperasi dan pembiayaan baik dari perbakan maupun non perbakan, permasalahan tersebut di sebabkan oleh persyaratan yang diajukan oleh perbankan maupun non perbankan kepada koperasi, koperasi tersebut masih belum bisa menyiapkan dokumen yang diminta, sehingga memerlukan waktu untuk menyipakannya begitu juga dengan masalah penyediaan pasar,	pengawas koperasi dapat memberikan kontribus secara maksimal sehingga dokumen-dokumen yang di minta oleh penyedia diharapkan dapat di penuhi sesuai dengan persyaratan yang ada,	
	2.17.07			PROGRAM Pemberdayaan U KECIL, DAN USAHA MIKRO (								
					Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat (Persen)	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai progers fisik yg tercatum dalan DPA Pelaku Usaha Kurang mahami proses pengadaan barang dan jasa secara elektonik terkait dengan proses pengadaan barang/jasa dan e-katalok - Pelaku Usaha terkendala dengan penjualan produk Pelaku Usaha terkendala kurangnya permodalan Usaha Banyak pelaku Usaha yg belum memiliki legalita usaha.	Terkait dengan hal tersebut perlu adanya sosialisasi terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektroni, perlu adanya pembinaan pemasaran produk, perlu adanya fasilitasi kelengkapan legalitas usaha dan perlu dibantu menjembatani dengan lembaga keuangan dalam hal permodalan usaha, perlu adanya pembinaan SDM pelaku usaha agar memahami teknologi dan laporan keuangan.	
	2.17.08			PROGRAM PENGEMBANGAN	N UMKM							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan) (persen)	25,00	25,00	100,00	Sangat Tinggi	Target kinerja Program untuk mencapainya ada beberapa kendala mengenai pelaku Usaha yang belum bankable sehingga akses perbankan maupun non perbankan terdapat belum bisa langsung di akses oleh pelaku usaha, ditahun ini dinas koperasi dan UKM memfasilitasi pelaku usaha untuk menjadi ukm yang bankable begitu juga akses-akses yang lain bagi pelaku usaha masih terdapat permasalahan-permasalahan permasalahan di fasilitasi oleh dinas koperasi dan UKM seperti akses kemitraan, rantai pasok dan pasar.	Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha UMKM pada tahun berikutnya dinas koperasi usaha kecil dan menegah akan memiliki strategi pencapaian target kinerja mengenai pelaku usaha UMKM yang terfasilitasi akses sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja program.	
2.15	2.18 URUSAN I	PEMERINTAHAN BIDA	NG PENANAN	MAN MODAL								
		DINAS PENANAMAN SATU PINTU	MODAL DAN	PELAYANAN TERPADU								
	2.18.02			PROGRAM PENGEMBANGA	N IKLIM PENANAMAN MODAL							
					Persentase Perencanaan Investasi Sektor Unggulan yang ditindaklanjuti (%)	90,91	81,82	90,00	Sangat Tinggi			
					Persentase kegiatan usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal (%)	50,00	59,00	118,00	Sangat Tinggi			
	2.18.03			PROGRAM PROMOSI PENAM	NAMAN MODAL							
					Presentese Minat Pelaku Usaha Penanaman Modal (Persen)	50,00	69,55	139,10	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.18.04			PROGRAM PELAYANAN PEN	NANAMAN MODAL							
					Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan NSPK (Persen)	90,00	99,74	110,82	Sangat Tinggi			
	2.18.05	18.05 PROGRAM PENGE MODAL			PELAKSANAAN PENANAMAN							
		.18.06 PROGRAM PENGEL			Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Penanaman Modal (Persen)	50,00	52,99	105,98	Sangat Tinggi			
	2.18.06			PROGRAM PENGELOLAAN I PENANAMAN MODAL	DATA DAN SISTEM INFORMASI							
		9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Persen)	50,00	51,26	102,52	Sangat Tinggi			
2.16	2.19 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG KEPEMU	DAAN DAN OLAHRAGA								
		DINAS KEPEMUDAA	N DAN OLAH	RAGA								
		DINAS KEPEMUDAA	N DAN OLAH	RAGA (UNIT INDUK)								
	2.19.02			PROGRAM PENGEMBANGA KEPEMUDAAN	N KAPASITAS DAYA SAING							
					Persentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan (%)	15,00	15,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan (%)	25,89	25,89	100,00	Sangat Tinggi			
	2.19.03 PROGRAM PENGEME	PROGRAM PENGEMBANGA	N DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
				Persentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga (%)	43,00	43,00	100,00	Sangat Tinggi				
					Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga (%)	3,97	4,76	119,90	Sangat Tinggi			
			-		Persentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			•		Internasional (%)							
	2.19.04			PROGRAM PENGEMBANGA	N KAPASITAS KEPRAMUKAAN							
		UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga 9.03 PROGRAM PENGEMBA			Persentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan (Persen)	83,00	83,83	101,00	Sangat Tinggi			
		UPTD Pembinaan da	ın Pelatihan (	Olah Raga								
	2.19.03			PROGRAM PENGEMBANGA	N DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
				I	Persentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (Persen)	26,00	26,37	101,42	Sangat Tinggi			
2.17	2.23 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG PERPUST	AKAAN								
		DINAS PERPUSTAKA	AN DAN KEA	RSIPAN								
	2.23.02			PROGRAM PEMBINAAN PER	RPUSTAKAAN							
					Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	2,00	2,64	132,00	Sangat Tinggi	Tidak ada masalah. Capaian melebihi target karena memaksimalkan pagu pengadaan buku dengan memanfaatkan selisih harga buku untuk menambah volume dan subjek buku, sehingga didapat hasil volume buku yang lebih banyak	Koordinasi dengan pengurus barang untuk pencatatan aset	
					Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di Perpustakaan daerah (%)	20,00	24,81	124,05	Sangat Tinggi	Tidak ada masalah. Capaian melebihi target	Memperbanyak inovasi layanan perpustakaan untuk mempertahankan peningkatan kunjungan perpustaaan	

No	Urusan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Taygot	Realisasi	Capaian	Vatagori	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
NO	Pemerintahan	Daerah Pelaksana	Кенјакан	Uraian Program	indikator kinerja Program	Target	Realisasi	(%)	Kategori	Permasaianan	Permasalahan	DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18	2.24 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG KEARSIPA	AN								
		DINAS PERPUSTAKA	AN DAN KEA	RSIPAN								
	2.24.02			PROGRAM PENGELOLAAN A	L ARSIP							
				L	Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi (%)	22,00	22,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada masalah	Sesuai perencanaan	
					Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa (%)	20,00	(5,00)	(25,00)	Sangat Rendah	Target tidak tercapai. Target kunjungan kearsipan melalui JIKN tahun 2024 hanya tercapai sebanyak 25.885 dari target 78.512 pengguna dikarenakan aplikasi JIKN masih dalam proses migrasi, sehingga tidak bisa menampilkan data kunjungan pada kurun waktu Mei s.d Desember 2024	Berkoordinasi dengan ANRI selaku pemegang otorisasi aplikasi JIKN terkait percepatan migrasi aplikasi	
	2.24.03			PROGRAM PERLINDUNGAN	DAN PENYELAMATAN ARSIP							
					Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media (Persen)	22,00	22,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada masalah. Capaian melebihi target karena sedang dalam proses pengerjaan alih media arsip Bawaslu	Koordinasi dengan Tim Kerja Pengelolaan Arsip Statis untuk peningkatan alih media	
3	3 URUSAN PEN	MERINTAHAN PILIHAN	I									
3.1	3.28 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG KEHUTAN	IAN								
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			KEHUTANAN								
		DINAS LINGKUNGAN	HIDUP DAN	KEHUTANAN (UNIT INDUK)								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN I	HUTAN							
					Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (Persen)	25,00	44,60	178,40	Sangat Tinggi	- tidak ada kendala	-	
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SU EKOSISTEMNYA	MBER DAYA ALAM HAYATI DAN							
					Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun (Persen)	28,00	28,57	102,04	Sangat Tinggi	tidak ada masalah	-	
	3.28.05			PROGRAM PENDIDIKAN DA DAN PEMBERDAYAAN MAS KEHUTANAN	N PELATIHAN, PENYULUHAN YARAKAT DI BIDANG							
					Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok)	47,00	58,00	123,40	Sangat Tinggi	1. Jumlah KTH di Provinsi Banten sampai dengan tahun 2024 sebanyak 339 KTH, sedangkan jumlah Penyuluh Kehutanan ASN sebanyak 6 Orang dan Non ASN (PSKM) 152 Orang, hal ini mengindikasikan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah KTH yang di Bina dengan Jumlah Pendamping. 2. Jumlah luas Perhutanan Sosial yang sudah dilegalisasi sampai dengan tahun 2024 seluas 6.360,35 Ha, sedangkan Pendamping PS sebanyak 6 orang.	1. Meningkatkan kapasitas pendamping KTH khususnya bagi PKSM. 2. Menambah jumlah Pendamping PS	
	3.28.06 PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN I	DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)									
					Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun (Persen)	20,00	40,00	200,00	Sangat Tinggi	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS serta minimnya pemahaman dan kesadaran lingkungan	Peningkatan kesadaran masyarakat dan keterlibatan dalam pengelolaan DAS dengan melakukan pelatihan serta penuluhan secara	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										sehingga menjadi kendala dalam keberhasilan pengelolaan DAS.	berkelanjutan	
		Cabang Dinas Lingk Lebak dan Tangeran		dan Kehutanan Wilayah								
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLA		PROGRAM PENGELOLAAN I	HUTAN							
					Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang (Ha)	2.500,0	3.005,00	120,20	Sangat Tinggi	- Luasnya Jangkauan Lokasi Kegiatan atau Wilayah Kerja - Terbatasnya dukungan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM). Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Mobilitas.	- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota Penugasan, rapat kerja teknis, sosialisasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis yang terus menerus kepada SDM aparatur, unsur Penyuluh, PKSM dan Kelompok tani Hutan serta optimalisasi alat komunikasi	
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SU EKOSISTEMNYA	MBER DAYA ALAM HAYATI DAN							
					Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Kelompok)	9,00	9,00	100,00	Sangat Tinggi	target capaian kinerja tercapai namun masih belum optimalnya data/informasi terkait penangkar satwa dan tumbuhan tidak dilindungi sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi	optimlaissai pendataan atau inventarisasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi diwilayah Lebak dan Tangerang	
		Cabang Dinas Lingk Pandeglang, Serang,		dan Kehutanan Wilayah								
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN I	HUTAN							
					Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi seluas 2.500 Hektar pertahun di wilayah	2.500,0	4.870,32	194,81	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan	- Ket : realisasi seluas 2363,32 Ha, realisasi dari stake holder (APBD,	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pandeglang, Serang dan Cilegon (Ha)						APBN, CSR)	
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUI EKOSISTEMNYA	MBER DAYA ALAM HAYATI DAN							
		HDEED C. (15)			Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon (Kelompok)	9,00	36,00	400,00	Sangat Tinggi	Kurangnya data terkait penangkar satwa dan tumbuhan tidak dilindungi sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi	optimalisasi pelaksanaan kegiatan pendataan atau inventarisasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi diwilayah pandeglang serang dan cilegon	
		UPTD Sertifikasi dar	n Perbeninan	Tanaman Hutan								
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN F	IUTAN							
		UPTD Pengelolaan T	Rava Banten	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat (Persen)	90,00	99,12	110,13	Sangat Tinggi	Permasalahan yang ada seperti perubahan iklim dapat diatasi sehingga tidak mengganggu dalam pencapaian target, namun kendala dalam pencairan keuangan yang lebih banyak lewat bulan yang dikarenakan sistem yang error atau belum mendukung dan human error yang masih terjadi dalam penyelesaian pertanggungjawaban.	terus meningkat koordinasi dengan dinas induk		
		of 1D 1 engeloidan 1	aman nutan									
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUI EKOSISTEMNYA	MBER DAYA ALAM HAYATI DAN							
					Persentase Pengelolaan TAHURA Banten (Persen)	100,00	160,21	160,21	Sangat Tinggi	tidak ada kendala	-	
3.2	3.25 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG KELAUTA	IN DAN PERIKANAN								
		DINAS KELAUTAN D	AN PERIKAN	AN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS KELAUTAN D	AN PERIKAN	AN (UNIT INDUK)								
	3.25.02			PROGRAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL	KELAUTAN, PESISIR DAN							
					Wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi (Ha)	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	realisasi sesuai target, namun sesuai dengan rakortekrenbangpus target seharusnya ditambah 99 ha kawasan koservasi (hmas pert)	akan disesuaikan pada renstra 2025 - 2029	
	3.25.03	5.03 PROGRAM F			PERIKANAN TANGKAP							
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	130.388	77.395,2 6	59,36	Rendah	target perikanan tangkap tidak tercapai, realisasi 59,36% karena masih Tingginya penggunaan alat tangkap yang dilarang sehingga hasil tangkapan tidak bisa tercatat di pelabuhan perikanan dan area penangkapan semakin jauh dari pantai sementara perahu nelayan ukurannya masih dibawah standar penangkapan di laut bebas	pemberian bantuan alat tangkap dan upaya peningkatan jumlah ikan di sekitar pantai dengan peletakan fish apartemen	
					Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan (Rekom) (Rekomendasi)	100,00	358,00	358,00	Sangat Tinggi	target pelayanan rekomendasi kapal tercapai namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan	perlu adanya peningkatan penetapan target di renstra 2025 - 2029	
	3.25.04			PROGRAM PENGELOLAAN	PERIKANAN BUDIDAYA							
					Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	116.266 ,00	116.424, 43	100,14	Sangat Tinggi	target produksi perikanan budidaya tercapai namun perlu adanya diversifikasi produk dengan nilai ekonomis yang lebih Tinggi	peningkatan pembinaan dan pemberian bantuan untuk diversifikasi produk	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani (Unit)	80,00	80,00	100,00	Sangat Tinggi	target jumlah pelaku usaha perikanan budidaya tercapai namun perlu adanya diversifikasi produk dengan nilai ekonomis yang lebih Tinggi	peningkatan pembinaan dan pemberian bantuan untuk diversifikasi produk	
	3.25.05			PROGRAM PENGAWASAN S PERIKANAN	UMBER DAYA KELAUTAN DAN							
					Luas Laut yang terawasi (Mill²)	530,00	613,66	115,78	Sangat Tinggi	target luas laut yang terawasi tercapai dengan pelaksanaan patroli laut sebanyak 18 kali dalam satu tahun	peningkatan jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) perikanan dan pembinaan lebih lanjut pada pokmaswas	
					pelaku usaha perikanan yang terawasi (Unit Usaha)	70,00	72,00	102,86	Sangat Tinggi	target pelaku usaha perikanan yang terawasi tercapai dengan pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha sebanyak 72 unit dalam satu tahun	peningkatan jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) perikanan dan pembinaan lebih lanjut pada pokmaswas	
	3.25.06			PROGRAM PENGOLAHAN D. PERIKANAN	AN PEMASARAN HASIL							
					Jumlah sertifikat usaha pemasaran dan pengolahan perikanan (Sertifikat)	165,00	165,00	100,00	Sangat Tinggi	target untuk sertifikasi usaha pemasaran dan pengolahan perikanan tercapai namun pembinaan dan peningkatan pada pelaku usaha masih dibutuhkan dalam rangka peningkatan sertifikasi kelayakan pengolah	perlunya penguatan dan pembinaan pada pelaku usaha sehingga skala usahanya berkembang	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah hasil uji mutu perikanan (Sampel)	275,00	530,00	192,73	Sangat Tinggi	target hasil uji mutu perikanan tercapai namun masih perlu adanya peningkatan ruang lingkup pengujian melalui penambahan parameter.	penambahan ruang lingkup pengujian	
		Cabang Dinas Kelaut Wilayah Utara	tan dan Perik	anan Provinsi Banten								
	3.25.02	·		PROGRAM PENGELOLAAN F PULAU-PULAU KECIL	KELAUTAN, PESISIR DAN							
					Wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi (Ha)	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada	Tidak ada	
	3.25.03			PROGRAM PENGELOLAAN F								
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	130.388 ,00	130.388, 00	100,00	Sangat Tinggi			
					Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan (Rekom) (Rekomendasi)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
		Cabang Dinas Kelaut Wilayah Selatan	tan dan Perik	anan Provinsi Banten								
	3.25.02			PROGRAM PENGELOLAAN F PULAU-PULAU KECIL	KELAUTAN, PESISIR DAN							
					Wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi (Ha)	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada	Tidak ada	
	3.25.03			PROGRAM PENGELOLAAN F	PERIKANAN TANGKAP							
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	130.388 ,00	111.150, 75	85,25	Tinggi			
					Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan (Rekom) (Rekomendasi)	100,00	152,00	152,00	Sangat Tinggi			
		UPTD Pengujian dan	Penerapan l	Mutu Hasil Perikanan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.06			PROGRAM PENGOLAHAN D PERIKANAN	AN PEMASARAN HASIL							
					Jumlah hasil uji mutu perikanan (Sampel)	250,00	275,00	110,00	Sangat Tinggi			
		UPTD Produksi Peri	kanan Budid	aya Air Payau dan Laut								
	3.25.04			PROGRAM PENGELOLAAN I	PERIKANAN BUDIDAYA							
					Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	116.231 ,00	116.266, 00	100,03	Sangat Tinggi			
					Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani (Unit)	80,00	80,00	100,00	Sangat Tinggi			
		UPTD Pelabuhan Pe	rikanan Pant	ai Labuan								
	3.25.03			PROGRAM PENGELOLAAN I	PERIKANAN TANGKAP							
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	130.338	130.388, 00	100,04	Sangat Tinggi			
					Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan (Rekom) (Rekomendasi)	100,00	82,00	82,00	Tinggi			
3.3	3.26 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG PARIWIS	ATA								
		DINAS PARIWISATA										
	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN I PARIWISATA	DAYA TARIK DESTINASI								
	TAMENDATA				Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata (%)	100,00	91,28	91,28	Sangat Tinggi		Faktor keberhasilan disebabkan seluruh kegiatan yang mendukung capaian target triwulan IV terlaksana sesuai target dan rencana serta pelaksanaan kegiatan penataan dan pengembangan yang di dominasi di wilayah	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											pengembangan pariwisata memudahkan PPTK, Pembantu PPTK serta pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan tanpa kendala yang berarti	
					Rata-Rata Lama inap (Hari)	1,72	1,37	79,65	Tinggi		Pehitungan lama inap ini untuk periode bulan November 2024, Sementara untuk perhitungan lama inap Bulan Desember 2024 akan dirilis kembali oleh BPS Perwakilan Banten sekitar Bulan Januari 2025 mendatang	
	3.26.03			PROGRAM PEMASARAN PAI	RIWISATA							
					Persentase Jumlah Promosi Wisata (%)	100,00	95,00	95,00	Sangat Tinggi		Faktor keberhasilan program dan kegiatan ini ditunjang oleh fasilitasi event promosi Kab/kota yang unggulan yang berjumlah 3 Fasilitasi Event, yang mencakup pengembangan Destinasi Wisata pada kegiatan di Program ini terlaksana dengan baik sesuai rencana dan target.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan (%)	5,00	4,25	85,00	Tinggi	jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami penurunan sebesar 24,68 % dari selisih jumlah wisatawan tahun lalu sebanyak 6.257.303 orang dan untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan 0,85% sehingga memiliki penambahan wisatawan mancanegara sebanyak 2.676 orang	mengoptimalkan informasi mitigasi gangguan cuaca bersama BMKG serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata bersama dinas pariwisata Kab/Kota agar dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan	
	3.26.04			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DAN PERLI INTELEKTUAL	N EKONOMI KREATIF MELALUI NDUNGAN HAK KEKAYAAN							
					Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	0,00	0,00	NaN	Sangat Tinggi			
					Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rupiah)	5.248.7 39,00	3.172.27 4,00	60,44	Rendah	Rata - rata pengeluaran wisatawan Rendah disebabkan adanya faktor cuaca ekstrem dan adanya pengurangan daya beli di masyarakat sehingga wisatawan tidak banyak mengeluarkan pengeluaran pada saat berkunjung di Banten	Dinas Pariwisata Provinsi Banten akan intens berkoordinasi dengan pihak BMKG terkait informasi prakiraan cuaca agar kedepannya aktivitas kegiatan kepariwisataan dapat dikondisikan dengan baik selain itu untuk membantu peningkatan daya beli Dinas Pariwisata akan berkoodinasi dengan pihak BI guna mengantisipasi adanya inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli wisatawan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.26.05			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN EKONOMI KREATIF	SUMBER DAYA PARIWISATA							
					Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Faktor Keberhasilan pencapaian program pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditunjang oleh terlaksananya seluruh kegiatan peningkatan dan kapasitas pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dimana lokus kegiatannya difokuskan kepada wilayah pengembangan pariwisata sehingga memudahkan keterlibatan para pelaku (SDM) dalam mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pada program ini	
3.4	3.27 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG PERTANIA	AN								
		DINAS PERTANIAN										
		DINAS PERTANIAN (	(UNIT INDUK)									
	3.27.02			PROGRAM PENYEDIAAN DA PERTANIAN	N PENGEMBANGAN SARANA							
					Produktivitas padi (Kuintal/Ha)	5,26	51,00	969,58	Sangat Tinggi			
					Peningkatan Produktivitas Jagung (Kuintal/Ha)	4,27	83,91	1.965,11	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Peningkatan Produktivitas cabai (Ton/Ha)	8,84	5,98	67,64	Sedang	Karena pada tahun 2023 kekeringan yang panjang menyebabkan banyak kegagalan pada tanaman cabai, sehingga pada tahun 2024 pelaku usaha/petani cabai banyak yang beralih ke komoditas lain.		
					Peningkatan Produktivitas kelapa (Ton/Ha)	0,79	0,79	100,00	Sangat Tinggi			
					Peningkatan Produktivitas aren (Ton/Ha)	3,11	5,71	183,60	Sangat Tinggi	-	-	
					Peningkatan Produktivitas Daging sapi (Kg/Ekor)	231,21	507,10	219,33	Sangat Tinggi			
					Peningkatan Produktivitas Daging kerbau (Kg/Ekor)	146,61	293,22	200,00	Sangat Tinggi	- Pengawasan Pakan Ternak (Uji Sampel Pakan) terrealisasi Sebanyak 50 sampel	Hasil Uji sampel telah ditindak lanjuti ke asal sampel	
					Peningkatan Produktivitas Daging domba (Kg/Ekor)	13,02	26,04	200,00	Sangat Tinggi	- Bobot ptong tidak optimal dikarenakan permintaan konsumen yang lebih menyukai jenis daging domba muda yang lebih empuk dan juicy - Kulaitas pakan belum optimal - Pengadaan Bibit Rumput di Bulan April - Pengadaan Alat Mesin Pengolah Pakan di Bulan Agustus - November - Laporan Akhir Kegiatan Pengadaan HPT dan Kegiatan Evaluasi Pengadaan HPT	- Kordinasi dan sosialisasi penggunaan pakan HPT berkualitas kepada peternak - Mensoialisasikan bobot potong optimla untuk hasil yang maksimal	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Peningkatan Produktivitas Daging kambing (Kg/Ekor)	12,90	14,27	110,62	Sangat Tinggi	-	-	
					Peningkatan Produktivitas Daging ayam ras (Kg/Ekor)	1,17	4,83	412,91	Sangat Tinggi	-	-	
	3.27.03			PROGRAM PENYEDIAAN DA PRASARANA PERTANIAN	N PENGEMBANGAN							
					Peningkatan Infrastruktur Pertanian (Km)	34,00	67,50	198,53	Sangat Tinggi		1. Kab. Lebak 155 Unit Lokasi (Pembuatan Irigasi Perpompaan) 2. Kab. Pandeglang 85 Unit Lokasi (Pembuatan Irigasi Perpompaan) 3. Kab. Serang 55 Unit Lokasi (Pembuatan Irigasi Perpompaan) 4. Kab. Tangerang 28 Unit Lokasi (Pembuatan Irigasi Perpompaan) 5. Kota Serang 15 Unit Lokasi (Pembuatan Irigasi Perpompaan) 6. Kota Serang 15 Unit Lokasi (Pembuatan Irigasi Perpompaan)	
	3.27.04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT								
					Jumlah kasus Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)	20,00	16,00	80,00	Tinggi			
					Jumlah Penjaminan Keamanan Produk Hewan (Unit Usaha)	39,00	98,00	251,28	Sangat Tinggi			
	3.27.05			PROGRAM PENGENDALIAN BENCANA PERTANIAN	DAN PENANGGULANGAN							
					Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI [deleted] (Persen)	95,00	17,00	17,89	Sangat Rendah			
	3.27.06			PROGRAM PERIZINAN USAH								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Rekomendasi izin usaha pertanian (Rekom)	252,00	252,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan	-	
	3.27.07			PROGRAM PENYULUHAN P	ERTANIAN							
		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pang Hortikultura dan Perkebunan			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani dari madya ke utama (Kelompok)	281,00	281,00	100,00	Sangat Tinggi			
		Hortikultura dan Perkebunan	i Benih Tanaman Pangan,									
	3.27.02				AN PENGEMBANGAN SARANA							
					Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih (Sertifikat)	442,00	551,00	124,66	Sangat Tinggi	Target TW 4 tidak tercapai dikarenakan musim tanam mayoritas dilaksakan pada TW 1, 2 dan 3 serta benih bantuan pemerintah sudah hampir selesai secara keseluruhan pada TW 4 (akhir tahun)	Tidak ada	
		UPTD Benih dan Per Hortikultura dan Pe		anaman Pangan,								
	3.27.02			PROGRAM PENYEDIAAN DA PERTANIAN	AN PENGEMBANGAN SARANA							
					Peningkatan Produktivitas kelapa Peningkatan Produktivitas aren Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah Peningkatan Produktivitas Jagung Produktivitas padi Produ (Ton)	5,20	5,1	98,08	Sangat Tinggi			
	3.27.05	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN BENCANA PERTANIAN										
					Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan	95,00	100,00	105,26	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DPI (Persen)							
		UPTD Pengujian Pak	an dan Peml	oibitan Ternak								
	3.27.02			PROGRAM PENYEDIAAN DA PERTANIAN	IN PENGEMBANGAN SARANA							
		UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner			Tersedianya bibit ternak ruminansia bemutu (Ekor)	360,00	1.960,00	544,44	Sangat Tinggi	Target realisasi sudah tercapai namun perolehan jumlah ternak jantan lebih banyak dari ternak betina, sedangkan untuk perkawinan pada ternak idealnya menurut SNI perbandingannya 1 ekor ternak jantan: 10 ekor ternak betina.	Menambah jumlah populasi ternak betina dengan sinkronisasi birahi dan penyediaan hormon, obat-obatan dan peralatan reproduksi.	
				veteriner veteriner								
	3.27.03			PROGRAM PENYEDIAAN DA PRASARANA PERTANIAN	l N PENGEMBANGAN							
					Peningkatan Akses Infrastruktur Pertanian (KM)	34,40	67,50	196,22	Sangat Tinggi	Realisasi dapat terlaksana pada akhir triwulan 4. Terdapat silpa dari sisa kontrak pelaksanaan.	Realisasi fisik dan keuangan dapat terlaksana pada akhir 2024.	
	3.27.04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT								
					Jumlah kasus Penurunan penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Jumlah)	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan. Terdapat silpa dari sisa kontrak dan akreditasi.	Realisasi tercapai	
3.5	3.29 URUSAN I MINERAL	PEMERINTAHAN BIDA	NG ENERGI D	AN SUMBER DAYA								
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	A MINERAL									
	3.29.02			PROGRAM PENGELOLAAN A	I ASPEK KEGEOLOGIAN							
				1	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (Persen)	70,00	97,84	139,77	Sangat Tinggi	Target Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek	Perlu adanya pemetaan lebih lanjut pemetaan lebih lanjut untuk kecamatan rawan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Geologi Dan Air Tanah tidak tercapai karena masih diperlukan pemetaan lebih lanjut untuk kecamatan rawan bencana dan sumber daya geologi (air tanah, geosite)	bencana dan sumber daya geologi (air tanah, geosite)	
	3.29.03			PROGRAM PENGELOLAAN N	MINERAL DAN BATUBARA							
					Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (Persen)	63,00	84,62	134,32	Sangat Tinggi	1. Kegiatan 3.29.03.1.01.0001 (WIUP) Rekomendasi Teknis 20 Dokumen, melebihi dari target TW4 (6 Dokumen) 2. Kegiatan 3.29.03.1.01.0002 (IUP) seluruh targetnya tercapai 3. Kegiatan 3.29.03.1.01.0003 (IPR) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) target 2 dokumen tidak tercapai, terealisasi 1 Dokumen. Permasalahan target tidak tercapai karena kurangnya minat pelaku usaha di bidang Jasa Pertambangan.	Untuk Kegitan Kegiatan 3.29.03.1.01.0003 (IPR) akan dilakukan evaluasi target untuk penetapan target di Tahun 2025	
	3.29.05			PROGRAM PENGELOLAAN E	ENERGI BARU TERBARUKAN							
					Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (Persen)	42,00	36,43	86,74	Tinggi	Target Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan tidak tercapai karena adanya perbedaan definisi operasional setelah terbitnya Perpres No. 11 Tahun 2023 tentang Urusan	Perlu adanya pemetaan lebih lanjut terkait dengan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan, Pencapaian target dalam bentuk dokumen perencanaan dan sosialisasi/bimbingan teknis tidak dapat dihitung karena mengikuti DO Program EBT.		
	3.29.06			PROGRAM PENGELOLAAN K	KETENAGALISTRIKAN							
					Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS) (Rumah Tangga SasaranÃ, (RTS))	17.000, 00	3.200,00	18,82	Sangat Rendah	Target 2024 sebesar 17.000 RTS dengan pembagian 8.500 dibiayai oleh APBd dan 8.500 oleh APBN, realisasi RTS APBD sebesar 8.200 RTS (96,47%), realisasi RTS APBN sebesar 3.707 RTS (43,61%)	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar target pemasangan RTS dari APBN bisa terpenuhi dan tetap memenuhi target RTS dari APBD	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%)	83,00	140,80	169,64	Sangat Tinggi	Target pelaku usaha yang memenuhi standar tercapai. Target 2024 75 pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar, realisasi sebanyak 202 pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar, namun masih perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih lanjut agar pelaku usaha ketenagalistrikan memenuhi standar.	perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih lanjut agar pelaku usaha ketenagalistrikan memenuhi standar.	
3.6	3.30 URUSAN I	PEMERINTAHAN BIDA	NG PERDAGA	NGAN								
		DINAS PERINDUSTR	IAN DAN PER	DAGANGAN								
		DINAS PERINDUSTR	IAN DAN PER	DAGANGAN (UNIT INDUK)								
	3.30.02			PROGRAM PERIZINAN DAN	PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
					Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan (Persen)	60,00	100	166,67	Sangat Tinggi	Terdapat ketidaktepatan target indikator Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan. Keterangan: Pada Tahun 2024, Disperindag Provinsi Banten melayani 87 pelaku usaha meliputi Penerbitan Hak Akses/SKA, Rekomtek Distributor B2, Rekomtek Distributor Minol dan Rekomtek MB TBB.	Perbaikan dokumen perencanaan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.30.03			PROGRAM PENINGKATAN S PERDAGANGAN	ARANA DISTRIBUSI							
					Laju Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	6,00	4,46	74,33	Sedang	Belum terbangunnya Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Banten.	Pembangunan PDP pada Renstra periode berikutnya.	
	3.30.04			PROGRAM STABILISASI HA POKOK DAN BARANG PENT								
					Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	5,00	2,89	142,20	Sangat Tinggi	Beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga cabe merah disebabkan minimnya stok dari para petani akibat gagal panen serta banyak petani tak bisa melakukan pemeliharaan tanaman akibat perubahan iklim. Lonjakan harga daging ayam ras dipicu Tingginya permintaan yang menyebabkan stok daging ayam ras menipis, Tingginya biaya transportasi, naiknya harga ayam hidup dan harga pakan ayam. Harga minyak mengalami kenaikan karena kenaikan harga minyak mentah dunia termasuk minyak sawit.		
					Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	77,49	41,28	53,27	Rendah	Persentase kinerja realisasi pupuk kurang tepat menjadi indikator kinerja program tersebut. Pada periode Januari s.d 28 November 2024, realisasi distribusi pupuk subsidi dari gudang ke distirbutor Provinsi Banten berjumlah 48.022	Pada periode Renstra periode berikutnya, indikator akan disesuaikan menjadi Realisasi Kinerja Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Ton (Urea) dan 36.434 Ton (NPK). Alokasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 berjumlah 164.633 Ton yang terdiri dari 88.520 Ton Pupuk Urea dan 76.113 Ton Pupuk NPK.		
	3.30.05			PROGRAM PENGEMBANGAN	NEKSPOR							
					Pertumbuhan nilai ekspor non migas (Persen)	27,00	13,61	50,41	Rendah	Nilai ekpor non migas Jan-Okt 2024 dipengaruhi oleh turunnya ekspor produk alas kaki mencapai -24,29%, besi dan baja -20,73% serta plastik dan barang dari plastik -10,60%.	- Meningkatkan diversifikasi produk ekspor - Membangun jaringan kemitraan perdagangan - Menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi sumber daya manusia di sektor ekspor	
	3.30.06			PROGRAM STANDARDISASI KONSUMEN	DAN PERLINDUNGAN							
					Persentase penyelesaian aduan konsumen yang dilayani dan ditangani (%)	55,00	90	163,64	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Jumlah pengaduan konsumen (2024): 20 pengaduan Jumlah pengaduan yang sudah selesai (2024): 18 pengaduan	Optimalisasi fungsi BPSK dan LPKSM di wilayah Provinsi Banten.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan (%)	38,04	70,09	184,25	Sangat Tinggi	Seringkali terdapat pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam pengawasan barang beredar. Secara Kumulatif (Jan- Des) 2024: Jumlah barang beredar diawasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan: 143 Jumlah barang beredar yang diawasi: 204	Sosialisasi dan edukasi produk wajib SNI, K3L dan berlabel bahasa Indonesia terhadap pelaku usaha.	
	3.30.07			PROGRAM PENGGUNAAN D. DALAM NEGERI	AN PEMASARAN PRODUK							
		UPTD Pengujian dan	Sertifikasi M	lutu Barang	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri (Persen)	25,00	25	100,00	Sangat Tinggi	Masih terdapat produk- produk IKM yang tidak lolos kurasi akibat tidak memenuhi standar perusahaan Retail. Jumlah produk yang dipasarkan tahun 2023: 16 produk Jumlah produk yang dipasarkan tahun 2024: 36 produk Produk-produk tersebut dipasarkan melalui Kerjasama dengan Retail, Pameran dan Mall to Mall.	Pembinaan bagi pelaku IKM dalam upaya meningkatkan kualitas produk IKM	
	3.30.06			PROGRAM STANDARDISASI	DAN DEDI INDUNCAN							
	3.30.00			KONSUMEN								
					Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (Persen)	12,00	100	833,33	Sangat Tinggi	- UPT PSMB belum memiliki laboratorium pengujian mutu mumpuni - UPT PSMB belum memiliki tenaga	- Perencanaan penyediaan laboratorium pengujian mutu barang - Penyediaan tenaga	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										fungsiona Penguji Mutu Barang Pada tahun 2024, komoditi potensial yang telah diuji dan sesuai dengan ketentuan berlaku adalah 1 komoditi yaitu Kopi.	fungsional Penguji Mutu Barang pada UPT PSMB - Penyesuaian indikator kinerja pada Renstra berikutnya.	
3.7	3.31 URUSAN	PEMERINTAHAN BIDA	NG PERINDUS	STRIAN								
		DINAS PERINDUSTR	IAN DAN PER	DAGANGAN								
		DINAS PERINDUSTR	IAN DAN PER	DAGANGAN (UNIT INDUK)								
	3.31.02			PROGRAM Perencanaan DA	N PEMBANGUNAN INDUSTRI							
					Persentase Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi (Persen)	0,23	12,83	5.578,26	Sangat Tinggi	Masih terdapat perusahaan yang tidak patuh melaporkan perusahaannya dalam SIINAS. Jumlah industri besar yang tercatat pada SIINAS 2023 (Des): 1605 perusahaan Jumlah industri besar yang tercatat pada SIINAS (Des 2024): 1811 perusahaan	- Kemudahan pengajuan perizinan usaha industri - Penguatan jaringan pemerintah dengan perusahaan - Pada periode Renstra berikutnya, akan dilakukan penyesuaian indikator.	
	3.31.03			PROGRAM PENGENDALIAN	IZIN USAHA INDUSTRI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar ,izin perluasan industri (IPUI) Bagi Industri Besar, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan in (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Ketidaklengkapan berkas pengajuan perizinan berdampak pada lambatnya penerbitan rekomtek izin usaha industri. Pada Triwulan 4, jumlah perusahaan yang diterbitkan rekomtek IUI dan telah dipantau adalah 8 perusahaan. Secara kumulatif (Jan-Des) 2024, jumlah perusahaan yang diterbitkan rekomtek IUI dan telah dipantau adalah 40 perusahaan.	- Kemudahan proses penerbitan rekomtek izin usaha industri - Penyesuaian indikator kinerja pada Renstra periode berikutnya sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.	
	3.31.04			PROGRAM PENGELOLAAN S NASIONAL	SISTEM INFORMASI INDUSTRI							
					Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan indus (Persen)	60,00	100,00	166,67	Sangat Tinggi	Masih terdapat perusahaan yang tidak patuh untuk melaporkan informasi produksi dan operasi secara berkala. Rasio data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi	Optimalisasi pengawasan perusahaan industri secara berkala	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										perusahaan industri adalah 100%, dengan rincian data sbb: - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/energi - Informasi tenaga kerja - Informasi investasi		
		UPTD Pengembanga	ın Teknologi	dan Standardisasi Industri								
	3.31.02			PROGRAM Perencanaan DA	N PEMBANGUNAN INDUSTRI							
					Cakupan Pelayanan Pengembangan teknologi dan Standarisi Industri (Persen)	60,00	69,00	115,00	Sangat Tinggi	Tidak ada kendala yang signifikan dalam pelayanan teknologi dan standarisasi industri. Pada Triwulan 4, pelayanan pengembangan teknologi dan standarisasi industri meliputi pelayanan rumah kemasan bagi 30 IKM. Secara kumulatif (Jan-Des) 2024, pelayanan pengembangan teknologi dan standarisasi industri meliputi:  - Pelayanan rumah kemasan: 61 IKM - Sertifikasi halal: 64 IKM Total jumlah pelaku usaha yang dilayani pada 2024 adalah 125 IKM.	- Optimalisasi kinerja pelayanan teknologi dan standarisasi industri - Optimalisasi pelayanan mobile rumah kemasan	
4	4 UNSUR PENE	DUKUNG URUSAN PEM	ERINTAHAN									
4.1	4.01 SEKRETA	RIAT DAERAH										
		SEKRETARIAT DAER	RAH									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Biro Pemerintahan	dan Otonomi	Daerah								
	4.01.03			PROGRAM PEMERINTAHAN	I DAN OTONOMI DAERAH							
					Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan (%)	100,00	188,37	188,37	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan terkait penamaan Rupabumi	Koordinasi dengan Kemendagri dan Kabupaten/Kota akan lebih ditingkatkan	
					Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah (%)	100,00	181,17	181,17	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, telah dilakukan penyusunan kebijakan LPPD, fasilitasi kepala daerah dan DPRD	Koordinasi dengan Kemendagri dan Kabupaten/Kota akan lebih ditingkatkan	
					Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (%)	100,00	180,20	180,20	Sangat Tinggi	tidak ada permasalahan, telah dilaksanakan fasilitasi kerjasama daerah dan evaluasi kerjasama daerah. pada 2024 sudah dilaksanakan kerjasama antara pemprov dan stakeholder lainnya	Koordinasi dengan Kemendagri, Kabupaten/Kota dan Stakeholder lainnya akan lebih ditingkatkan	
	4.01.04			PROGRAM KESEJAHTERAAI	l N RAKYAT							
					Cakupan realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (%)	100,00	197,40	197,40	Sangat Tinggi	tidak ada permasalahan, unit atau lembaga yang dibina sebanyak 4 (MUI, LPTQ, baznas, hindu parisada)	Pelaksanaan penyaluran HIBAH agar selalu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (%)	100,00	145,86	145,86	Sangat Tinggi	Rumusan kebijakan yang dihasilkan masih berupa dokumen yang berisi analisis dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah (Policy Brief) kebijakan belum sampai kepada rumusan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur	Akan di implementasikan di Tahun 2025	
					Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (%)	100,00	191,62	191,62	Sangat Tinggi	Rumusan kebijakan yang dihasilkan masih berupa dokumen yang berisi analisis dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah (Policy Brief) kebijakan belum sampai kepada rumusan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur	Akan diimplementasikan di Tahun 2025	
		Biro Hukum										
	4.01.05			PROGRAM FASILITASI DAN	KOORDINASI HUKUM							
					Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Realisasi sesuai target terhadap peraturan yang dipublikasikan akan terus dikelola secara berkala untuk terus diupload di web JDIH	penguatan aplikasi web JDIH	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Realisasi sesuai target, perlu peningkatan sumber pembiayaan kepada LBH dimana saat ini SSH Pemprov Banten belum optimal, selain itu banyaknya Masyarakat Miskin yang belum tertangani.	akan dikoordinasikan lebih lanjut ke BPKAD dan BAPPEDA	
					Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Usulan dari kabupaten dan kota terhadap Produk Hukum pada tahun 2024 sudah terfasilitasi semua, namun kurangnya SDM menjadi kendala proses penyelesaian.	kurangnya SDM akan dikoordinasikan dengan BKD	
					Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Realisasi sesuai target, namun perlu SDM yang memadai agar proses penyusunan produk hukum lebih cepat	kurangnya SDM akan dikoordinasikan dengan BKD	
		Biro Organisasi dan	Reformasi Bi	rokrasi	, ,							
	4.01.02			PROGRAM PENATAAN ORGA	ANISASI							
					Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja (%)	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Belum Optimalnya Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pendampingan perangkat daerah dalam penyusunan LKIP	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	1. pada fasilitasi pendataan kelembagaan provinsi dilakukan evaluasi terhadap perda SOTK, kurangnya keselarasan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penataan urusan penyelenggaraan pemerintahan 2. pergub anjab abk, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan telah disahkan di akhir 2024 dan ada penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku 3. pemerintah kab/kota dalam penataan terhadap kelembagaan belum sesuai dengan arah kebijakan yaitu kelembagaan yang efisien dan efektif	Peningkatan kualitas evaluasi kelembagaan dengan melibatkan secara aktif perangkat daerah     Penyesuaian pergub anjab, abk, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan	
					Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Belum seluruh     perangkat daerah     menyusun SOP     Belum optimalnya     evaluasi pelaksanaan peta     proses bisnis     3. Belum adanya evaluasi     sistem kerja baru	1. Meningkatkan pendampingan perangkat daerah dalam penyusunan SOP 2. Meningkatkan kualitas evaluasi dalam pelaksanaan peta proses bisnis 3. Optimalisasi evaluasi implementasi sistem kerja baru	
					Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Belum seluruh perangkat daerah menerapkan budaya kerja core value berakhlak secara komperehensif	Meningkatkan pembinaan perangkat daerah dalam implementasi budaya kerja core value	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											berakhlak	
		Biro Umum dan Perl	engkapan									
	4.01.01			PROGRAM PENUNJANG URU PROVINSI	ISAN PEMERINTAHAN DAERAH							
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) OK	100,00	93,53	93,53	Sangat Tinggi			
					Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA (%)	100,00	94,59	94,59	Sangat Tinggi			
					Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA (%)	100,00	99,98	99,98	Sangat Tinggi			
					Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha (%)	100,00	81,96	81,96	Tinggi			
		Biro Pengadaan Bar Elektronik	ang/Jasa dan	Layanan Pengadaan Secara								
	4.01.07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN BARANG DAN JASA	PELAYANAN PENGADAAN							
					A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	30,00	23,14	77,13	Tinggi	Belum Maksimalnya Pelaporan Setiap Opd Untuk Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/jasa	Penguatan sosialisasi keseluruh perangkat daerah terkait pemanfaatan sistem barang jasa pada aspek pelaporan barang/jasa	
					B. Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	31,11	40,00	128,58	Sangat Tinggi			
					C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Nilai)	25,43	26,09	102,60	Sangat Tinggi			
		Biro Perekonomian	dan Adminis	trasi Pembangunan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.01.06			PROGRAM PEREKONOMIAN	DAN PEMBANGUNAN							
					Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian (%)	100,00	193,00	193,00	Sangat Tinggi			
					Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan (%)	100,00	182,00	182,00	Sangat Tinggi			
					Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah (%)	100,00	181,00	181,00	Sangat Tinggi			
	4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADM	IINISTRASI PEMBANGUNAN								
		4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN AD			Persentase Tersedianya perumusan kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	100,00	160,00	160,00	Sangat Tinggi			
	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol				Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi (%)	100,00	162,00	162,00	Sangat Tinggi			
		Biro Administrasi Pi	mpinan dan l	Protokol								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (%)	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan materi pimpinan     Belum optimalnya publikasi kegiatan pimpinan	1. Mengoptimalkan media/wadah untuk koordinasi antar perangkat daerah 2. Membuat kontenkonten hasil kegiatan pimpinan yang dipublikasikan di media sosial sehingga masyarakat lebih mudah mengakses	
					Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan (%)	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Sarana dan Prasarana penunjang keprotokolan pimpinan tidak layak     Belum optimalnya koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang dihadiri pimpinan	Pengajuan RKBMD sarana dan prasarana penunjang keprotokolan pimpinan     Penguatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang dihadiri pimpinan	
4.2	4.02 SEKRETA	RIAT DPRD									pp	
		SEKRETARIAT DPRI	)									
	4.02.02			PROGRAM DUKUNGAN PEL DPRD	AKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI							
					Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan, Kehumasan Dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD (%)	100,00	84,33	84,33	Tinggi			
					Persentase capaian layanan kinerja fungsi DPRD (%)	100,00	99,58	99,58	Sangat Tinggi			
5	5 UNSUR PENU	JNJANG URUSAN PEME	ERINTAHAN									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1	5.01 PERENCA	NAAN										
		BADAN PERENCANA	AN PEMBAN	GUNAN DAERAH								
	5.01.02			PROGRAM PERENCANAAN I PEMBANGUNAN DAERAH	PENGENDALIAN, DAN EVALUASI							
					Persentase dokumen Pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai target dalam satu tahun (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase dokumen perencanaan yang disahkan (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase Ketersedian data perencanaan pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase pengelolaan sistem informasi pembangunan dan pengendalian daerah (%)	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Presentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD (%)	95,00	95,00	100,00	Sangat Tinggi			
	5.01.03			PROGRAM KOORDINASI DA PERENCANAAN PEMBANGU								
					Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/RPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)							
5.2	5.05 PENELITI	AN DAN PENGEMBAN	GAN									
		BADAN PERENCANA	AN PEMBANO	GUNAN DAERAH								
	5.05.02			PROGRAM PENELITIAN DAN	N PENGEMBANGAN DAERAH							
				I	Persentase hasil kelitbangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase hasil kelitbangan lingkup Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Hasil Kelitbangan (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
5.3	5.02 KEUANGA	AN										
		BADAN PENGELOLA	AN KEUANGA	N DAN ASET DAERAH								
	5.02.02			PROGRAM PENGELOLAAN F	EUANGAN DAERAH							
					Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Rumus Perhitungan: Jumlah Dokumen Penganggaran yang tepat waktu /Jumlah dokumen penganggaran x 100  Dokumen Penganggaran yg tepat waktu berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2024:	Pemerintah Provinsi terus menjaga proses perencanaan dan penganggaran agar tepat waktu dan konsisten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										1. PERDA No 8 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025, tgl 31 Desember 2024 2. PERGUB No 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025, tgl 31 Desember 2024 3. PERDA No 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024, 16 Oktober 2024 4. PERDA No 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024, 16 Oktober 2024 6. PERDA No 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024, 16 Oktober 2024		
					Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (%)	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	1. Permendagri Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025 terlambat; 2. Hasil Evaluasi Raperda APBD dan Rapergub Penjabaran APBD dari Menteri Dalam Negeri terlambat; 3. Data untuk Evaluasi Kabupaten/Kota belum seluruhnya tersedia dari aplikasi. 4. Belum terdapat template baku Evaluasi 5. Dokumen Evaluasi disampaikan oleh Kab/Kota dalam waktu berdekatan, dengan SDM terbatas Hasil Evaluasi kurang optimal	Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait kebutuhan data untuk evaluasi     Penguatan sinergisitas dengan Tim Evaluator Provinsi Banten     Koordinasi intensif dengan Kemendagri dan mencantumkan rekomendasi hasil evaluasi secara normatif dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (%)	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Time Pressure yang begitu ketat dalam penyusunan LKPD     Kualitas data informasi yang disampaikan SKPD ke PPKD masih belum cukup informatif	Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkait dalam penyusunan pelaporan keuangan	
					Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien (%)	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Kesalahan Data (nama, nomor rekening, bank) antara SPM dengan data pendukung     Dokumen Pendukung     Tidak Lengkap/Tidak Sesuai     Kendala Teknis Aplikasi (Gangguan pada aplikasi SIPD)     Keterlambatan penyampaian SPM pada akhir tahun	1. Memastikan data penerima (nama, nomor rekening, bank) sudah sesuai dan valid antara SPM dan Referensi Bank, melakukakan konfirmasi/koordinasi dengan SKPD terkait. 2. Koordinasi dengan SKPD terkait untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen 3.Melaporkan gangguan aplikasi kepada helpdesk atau administrator sistem 4. Penyampaian SPM tepat waktu sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Langkah-langkah akhir tahun	
	5.02.03			PROGRAM PENGELOLAAN I	BARANG MILIK DAERAH							
					Capaian Database Aset Provinsi Banten (%)	24,00	24	100,00	Sangat Tinggi	Pengurus Barang OPD belum tertib dalam proses pencatatan aset dan persediaan sehingga output laporan hasil rekonsiliasi terlambat.     OPD tidak melakukan Rekonsiliasi internal antara pengurus barang dengan pelaksana	Perlu ditingkatkan rekonsiliasi internal antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi sehingga data realisasi dan penginputan belanja modal dan persediaan tidak terdapat selisih pengakuan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten (%)	25,00	25	100,00	Sangat Tinggi	akuntansi. 3. Perangkat Daerah kurang optimal dalam proses penmginputan belanja modal dan belanja persediaan dengan belum menerapkan sistem validasi data sebagai dasar pencairan dana unutk belanja modal dan belanja persediaan.  1.Masih terdapat Aset Tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga 2.Ada Dokumen tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga 3.Ada Kekurangan luas tanah yang besar antan KIB dan hasil ukur tanah	2. Mengoptimalkan sistem validasi data dari aplikasi Atisisbada dan aplikasi SIAP sebagai dasar pencairan dana sesuai dangan amanat peraturan Guberur Banten tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.  Melakukan penyelesaian Aset yang bermasalah dengan melibatkan Kejati Banten melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) antara Gubernur dengan Kepala Kejati	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten (%)	17,00	17	100,00	Sangat Tinggi	1.Dokumen tanah yang tidak lengkap 2.Patok batas yang tidak jelas sehingga luas tanah hasil pengukuran dengan luas tanah berdasarkan kartu inventaris barang (KIB) berbeda 3.Belum selesainya BAST Hibah dari kementerian PUPR untuk hibah tanah ( jalan ) 4.Belum selesainya BAST serah terima pekerjaan pengadaan tanah dari BPN ke perangkat daerah terkait	1.Melakukan koordinasi lebih intensif lagi dengan perangkat daerah terkait untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap 2. Menghadirkan saksisaksi batas tanah dan orang-orang yang mengatahui terkait riwayat tanah tersebut 3. Melakukan koordinasi lebih intensif lagi dengan kementerian PUPR dalam proses hibah Tanah (jalan) 4.Melakukan koordinasi lebih intensif lagi dengan pihak BPN untuk mencari solusi atas dokumen tanah yang belum lengkap agar proses sertifikasi tetap berjalan.	
					Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten (%)	22,00	19,80	90,00	Tinggi	Belum terselesaikannya Penyusunan Pergub Tatacara Kejasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah disebabkan masih dalam tahapan pembahasan awal (bulan desember)	Tim Penyusun akan lebih intensif melanjutkan pembahasan pada tahun 2025 sebagai amanat lanjutan dari Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, selain itu akan disertakan usulan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											muatan lokal pada pembahasan berikutnya.	
		BADAN PENDAPATA	N DAERAH									
		BADAN PENDAPATA	N DAERAH (	UNIT INDUK)								
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN F	PENDAPATAN DAERAH							
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88-8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	1. Melakukan penagihan PKB bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Banten melalui Surat Kuasa Khusus (SKK);  2. Optimalisasi pelayanan PKB telah dilakukan melalui 12 Kantor Bersama Samsat, 31 unit mobil samling, 51 Gerai Samsat, Sinergitas Pelayanan dengan Kabupaten/Kota melalui Samsat Desa;  3. Bapenda Pusat dan UPTD PPD melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
					Presentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain (Persen) (%)	4,56	8,31	182,24	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Retribusi daerah dan PLL tahun 2024: Rp478.848.169.505 -Retribusi daerah dan PLL tahun 2023: Rp442.099.210.279,84 -Perhitungan: (478.848.169.505-	Kebijakan terkait tarif retribusi daerah perlu diperbaharui, penambahan Objek Retribusi daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										442.099.210.279,84) / 442.099.210.279,84 x 100%		
		UPTD Pengelolaan P	Pendapatan D	aerah Serang								
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDAPATAN DAERAH							
					01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88-8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;  2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;  3. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
		UPTD Pengelolaan P	Pendapatan D	aerah Cikande								
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDAPATAN DAERAH							
				,	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target. -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun	1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		UPTD Pengelolaan P	endapatan D	aerah Pandeglang						2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88- 8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	(Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory; 2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor; 3. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN F	 PENDAPATAN DAERAH							
								400.04				
		HDTD Danselslage		anak Danska skitura	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88-8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	Tindak Lanjut:  1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;  2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;  3. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
		UPTD Pengelolaan P	endapatan D	aerah Rangkasbitung								
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN F	PENDAPATAN DAERAH							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88-8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;  2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;  3. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
		UPTD Pengelolaan P	endapatan D	aerah Malingping								
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN F	PENDAPATAN DAERAH							
					01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88-8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory; 2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor; 3. Melaksanakan upaya pendataan melalui	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
		UPTD Pengelolaan P	endapatan D	aerah Ciputat								
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDAPATAN DAERAH							
					01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88-8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;  2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;  3. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
		UPTD Pengelolaan P	endapatan D	aerah Serpong								
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDAPATAN DAERAH							
					01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target. -Pajak daerah tahun 2024:	Meningkatkan     pelayanan kepada     Masyarakat melalui     Samsat Keliling     (Samling), Samsat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88- 8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;  2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;  3. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
		UPTD Pengelolaan P	endapatan D	aerah Balaraja								
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN P	PENDAPATAN DAERAH							
		HDTD Paraclel		angle Cilcolol	01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88-8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;  2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;  3. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
		UPTD Pengelolaan P	endapatan D	aerah Cikokol								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.02.04		•	PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDAPATAN DAERAH							
					01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88-8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;  2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;  3. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
		UPTD Pengelolaan F	endapatan D	aerah Ciledug								
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN I	PENDAPATAN DAERAH							
					01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88-8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;  2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;	

No	Urusan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
	Pemerintahan	Daerah Pelaksana	,		, , ,			(%)			Permasalahan	DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											3. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
		UPTD Pengelolaan P	endapatan D	aerah Cilegon								
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN F	PENDAPATAN DAERAH							
					01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan: (8.552.409.195.855,88-8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;  2. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;  3. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
		UPTD Pengelolaan P	endapatan D	aerah Kelapa Dua							inclaid door to door,	
	5.02.04			DDOCD AM DENORI CT TANK	NEW A DAMEAN DANDAY							
	5.02.04			PROGRAM PENGELOLAAN F	'ENDAPATAN DAEKAH							
					01. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5,85	5,87	100,34	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan, realisasi sesuai target.  -Pajak daerah tahun 2024: Rp8.552.409.195.855,88 -Pajak daerah tahun 2023: Rp8.078.043.383.983 -Perhitungan:	1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										(8.552.409.195.855,88- 8.078.043.383.983) / 8.078.043.383.983 x 100%	Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor;     Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door;	
5.4	5.03 KEPEGAV	NAIAN BADAN KEPEGAWAI	AN DAEDAH									
		BADAN KEPEGAWAI	AN DAEKAH									
	5.03.02			PROGRAM KEPEGAWAIAN I	DAERAH							
					Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan (Nilai)	4,98	5,00	100,40	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan pada dimensi kedisiplinan	Perlu penguatan pembinaan disiplin ASN	
					Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja (Nilai)	5,00	25,61	512,20	Sangat Tinggi	Terdapat penentuan target yang belum menantang dikarenakan pada saat penyusunan renstra BKD 2023-2026 dimensi kinerja pada tahun 2021 mendapatkan nilai yang rendah sehingga saat ini realisasinya melebihi target	Untuk Renstra BKD 2025-2029 akan dilakukan perubahan penyesuaian target pada dimensi kinerja	
					Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi (Nilai)	18,00	22,20	123,33	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan akan dilakukan akses kemudahan penerbitan izin belajar	Dilakukan kemudahan akses penerbitan izin belajar	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai (Nilai)	39,00	40,00	102,56	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan pada nilai kriteria perencanaan kebutuhan pegawai	Mempersiapkan seleksi CASN Tahun 2025 jika dibuka formasi oleh Kemenpanrb	
					Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai (Nilai)	39,00	40,00	102,56	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan pada nilai kriteria pelaksanaan pengadaan pegawai	Fokus penyelesaian seleksi pppk tahun 2024 bagi tenaga honorer di Pemprov Banten	
					Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi (Nilai)	22,00	22,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan pada nilai kriteria pelaksanaan sistem informasi	Melakukan penguatan sistem pada aplikasi sistem informasi kepegawaian SIMASTEN	
					Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi (Nilai)	34,00	37,50	110,29	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan nilai kriteria pelaksanaan mutasi dan promosi	Mutasi dan Promosi berdasarkan sistem merit	
					Nilai Kriteria Pengembangan Karier (Nilai)	70,00	65,00	92,86	Sangat Tinggi	Terdapat permasalahan pada nilai kriteria pengembangan karier belum dilaksanakannya asesment pada sebagian ASN Pemprov Banten	Pelaksanaan asesment bagi seluruh ASN Pemprov Banten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja (Nilai)	78,50	72,50	92,36	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan pada nilai kriteria pelaksanaan manajemen kinerja serta hasil penilaian kinerja dijadikan salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan promosi, mutasi, dan demosi	Fokus pada peningkatan nilai skp dan perilaku ASN Pemprov Banten	
					Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (Nilai)	35	37,5	107,14	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan pada nilai kriteria pelaksanaan penggajian, penghargaan, dan disiplin	Fokus pada pemberian penghargaan kepada ASN Pemprov Banten	
					Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan (Nilai)	15,00	16,00	106,67	Sangat Tinggi	Tidak ada permasalahan pada nilai kriteria pelaksanaan perlindungan dan pelayanan	Bantuan Perlindungan Hukum bagi pegawai BKD bekerja sama dengan Unit KORPRI yang menaungi para pegawai, telah mempersiapkan dan menganggarkan bantuan tersebut. Pelaksanaan bantuan terdapat pada Unit KORPRI sebagaimana tertuang dalam Usulan Hibah	
5.5	5.04 PENDIDIH	KAN DAN PELATIHAN										
		BADAN PENGEMBAN	IGAN SUMBEI	R DAYA MANUSIA								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.04.02			PROGRAM PENGEMBANGAN	N SUMBER DAYA MANUSIA							
					Persentase Capaian pemantauan dan evaluasi, sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi (%)	100,00	266,00	266,00	Sangat Tinggi	realisasi sesuai target ada hal hal perlu perbaikan 1. jenis diklat 2. mutu diklat 3. koodinasi dengan BKD terkait HCDP dan biro organisasi terkait SKJ	kedepan koordinasi dalam rangka peningkatan mutu kediklatan ke BPSDM kemendagri dan akan mengimplementasikan HCDP dan SKJ untuk diklat diklat yang diadakan	
					Rasio ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikasi (%)	80,00	119,53	149,41	Sangat Tinggi	tidak semua peserta lulus pada sertifikasi diklat mengikuti bimtek maupun belajar mandiri secara maksimal. peserta PBJ yang mengikuti ujian sejumlah 255 orang dan yang lulus hanya 111 orang.	pada tahun selanjutnya sertifikasi tidak lagi difokuskan pada barang dan jasa	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi (%)	100,00	166,00	166,00	Sangat Tinggi	- Realisasi sesuai dengan target, pada aplikasi LMS Banten Ceria dikembangkan untuk menunjang pengembangan kompetensi, pembaharuan modul untuk bahan pelatihan, manajemen inovasi	- Penguatan koordinasi dengan BKD dan biro organisasi	
					Rasio peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan,serta Kompetensi Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL (%)	80,00	164,53	205,66	Sangat Tinggi	- realisasi melebihi target - minimnya jenis diklat manajemen dan fungsional	- untuk renstra selanjutnya perlu diperbaiki (presentasi peserta dengan kategori baik / jumlah peserta) dan jenis diklat yang diadakan sesuai HCDP dan SKJ	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Rasio peserta pengembangan kompetensi teknis umum, subtantif, dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL. (%)	80,00	157,48	196,85	Sangat Tinggi	- realisasi melebihi target - minimnya variasi dalam jenis diklat teknis umum, subtansif, dan pemerintahan	- untuk renstra selanjutnya perlu diperbaiki (presentasi peserta dengan kategori baik / jumlah peserta) dan jenis diklat yang diadakan sesuai HCDP dan SKJ	
5.6	5.07 PENGELO	LAAN PENGHUBUNG										
		BADAN PENGHUBUN	IG									
	5.07.02			PROGRAM PELAYANAN PEN	NGHUBUNG							
				ı	Cakupan Koordinasi Badan Penghubung Terhadap Pemerintah Daerah (Indeksi)	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi	tidak ada	tidak ada	
6	6 UNSUR PENG	GAWASAN URUSAN PE	MERINTAHAI	V								
6.1	6.01 INSPEKTO	ORAT DAERAH										
		INSPEKTORAT										

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah Provinsi (persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	kegiatan rutin tercapai, tidak ada permasalahan	Faktor Keberhasilan:	
	6.01.02			PROGRAM PENYELENGGAR	AAN PENGAWASAN							
					Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan (persen)	100,00	95,24	95,24	Sangat Tinggi	1. Padat jya jadwal pengawasan 2. Pengawasan di luar PKPT 3. Banyaknya Penugasan Mandatory 4.Kompetensi auditor/p2upd masih kurang. 5.Banyaknya aturan/kebijakan internal yg sudah tidak sesuai sehingga perlu direvisi 6.Kurangnya dukungan	1. Penambahan Auditor 2. Pengembangan kompetensi Auditor 3. Memperbaharui aturan/kebijakan yang sudah tidak sesuai 4. memperkuat Inspektorat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										perangkat daerah atas tugas Inspektorat 7.Kurangnya kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan inspektorat.		
					Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti (persen)	80,00	77,62	97,02	Sangat Tinggi	Proses Tindak Lanjut masih berjalan namun ada beberapa kendala, yaitu: 1. lambatnya penyelesaian rekomendasi yang berupa kebijakan 2. adanya rotasi mutasi di OPD yang terdapat temuan 3 komitmen pimpinan terhadap penyelesaian temuan	monitoring terhadap penyelesaian rekomendasi yang berupa kebijakan     adanya SK penugasan khusus yang menangani temuan OPD     3 penguatan komitmen pimpinan terhadap penyelesaian temuan     4. pembangunan aplikasi terkait TLHP	
	6.01.03			PROGRAM PERUMUSAN KE ASISTENSI	I BIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN							
					Persentase Ketercapaian Pendampingan dan Asistensi (Persen)	100,00	196,00	196,00	Sangat Tinggi	realisasi sesuai target, tidak ada permasahan. unit atau OPD yang didampingi ZI sebanyak (nama opd)	1. penguatan komitmen pimpinan untuk membangun zona integritas 2. penguatan kriteria ZI terhadap unit pelayanan 3. membuat SK gub penetapan 7 unit kerja yang akan dibangun ZI 4. membuat SK gub reward dan punishment untuk unit kerja yang mendapatkan / tidak mendapatkan ZI	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8 UNSUR PEMI	ERINTAHAN UMUM										
7.1	8.01 KESATUA	N BANGSA DAN POLIT	rik									
		BADAN KESATUAN I	BANGSA DAN	POLITIK								
	8.01.02			PROGRAM PENGUATAN IDE KARAKTER KEBANGSAAN	COLOGI PANCASILA DAN							
					Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (Persen)	100,00	66,66	66,66	Sedang	realisasi sesuai target, dari target pembinaan telah dilakukan pembinaan	cakupan pembinaan lebih ditingkatkan lagi	
	8.01.03				 PERAN PARTAI POLITIK DAN LALUI PENDIDIKAN POLITIK KA SERTA BUDAYA POLITIK							
					Nilai IDI Pada poin hak-hak politik (Nilai)	67,00	149,29	222,82	Sangat Tinggi	realisasi melebihi target, komponen ini dinilai dari partisipasi pemilih terhadap daftar pemilih	melakukan penguatan bersama KPU	
	8.01.04			PROGRAM PEMBERDAYAAI ORGANISASI KEMASYARAK								
					Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Persen)	100,00	150,00	150,00	Sangat Tinggi	jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi belum optimal	perlu pemetaan jumlah ormas yang ada di tingkat provinsi untuk mengetahui sejauh mana ormas yang diberdayakan dan diawasi	
	8.01.05			PROGRAM PEMBINAAN DA KETAHANAN EKONOMI, SO								
					Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil (Nilai)	88,00	170,53	193,78	Sangat Tinggi	terdapat penurunan pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul berserikat berekspresi berpendapat dan berkeyakinan dalam	melakukan koordinasi dengan ormas dan biro hukum serta kesbangpol kabupaten kota	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										setiap kebijakan		
	8.01.06				KEWASPADAAN NASIONAL DAN DAN FASILITASI PENANGANAN							
					Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah (Persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	konflik yang diidentifikasi selama tahun 2024 perlu dikonfirmasi yang menjadi konflik sosial. terdapat 6 konflik sosial yang teridentifikasi dan diminta hasil penyelesaiannya.	potensi konflik sosial yang ada perlu dipastikan tindak lanjutnya berupa bukti penanganannya	

## 3.4. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan target pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026. Kebijakan strategis yang ditetapkan memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Banten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten telah menetapkan kebijakan strategis dengan menetapkan peraturan daerah sebanyak 8 (delapan) peraturan daerah. Selain itu, juga telah ditetapkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kebijakan strategis melalui peraturan kepala daerah. Adapun uraian kebijakan strategis tersebut diuraikan pada tabel 3.13.

Tabel 3.13 Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
PERA	TURAN DAERAH		
1	Pajak dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pengenaan pajak dan retribusi bagi wajib pajak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2	Kebudayaan Banten	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Sebagai kebijakan Provinsi Banten dalam upaya pelestarian, pelindungan, pemanfaatan, dan pemajuan kebudayaan daerah Banten secara berkelanjutan
3	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Sebagai bentuk pelaporan menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Sebagai kebijakan yang mencantumkan target dan sasaran perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Banten dan upaya mendukung Rencana Pembangunan Panjang Nasional menuju Indonesia Emas
5	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum dalam pelaksanan pembangunan daerah dan program kegiatan Pemerintah Daerah pada masa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
6	Penanaman Modal	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal	Sebagai kebijakan yang mendukung kemudahan berinvestasi di Provinsi Banten untuk memperbanyak lapangan kerja
7	Perempuan dan Anak	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Sebagai upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam memperkuat perlindungan kepada perempuan dan anak dengan penyesuaian ketentuan perundang- undangan terbaru
8	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Sebagai dasar hukum Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan program Pembangunan daerah, rencana pendapatan, dan belanja daerah di Tahun 2025
	PERATURAN GUBERN	UR	
1.	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum dalam pedoman melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
2.	Tata Naskah Dinas	Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas	Sebagai pedoman hukum dalam penerapan tata naskah dinas dengan format dan tata cara terbaru
3.	Pajak Kendaraan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023	Sebagai dasar bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam menerapkan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan yang diproduksi pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya
4.	Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Banten
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum dalam perubahan penjabaran untuk penyesuaian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten Tahun 2024, untuk menyelesaikan target pendapatan dan belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2024
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum dalam perubahan penjabaran untuk penyesuaian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten Tahun 2024, untuk menyelesaikan target pendapatan dan belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2024
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang	Sebagai dasar hukum dalam perubahan penjabaran untuk penyesuaian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten Tahun 2024, untuk menyelesaikan target pendapatan dan

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023	belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2024
8.	Standar Harga Satuan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan	Sebagai dasar hukum dalam perubahan untuk penyesuaian atas nilai dan besaran dalam Standar Harga Satuan Provinsi Banten
9.	Satuan Harga Barang/Jasa	Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025	Sebagai dasar hukum atas nilai dan besaran dalam Satuan Harga Barang/Jasa Provinsi Banten Tahun 2025
10.	Darurat Bencana	Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana	Sebagai pedoman hukum dalam proses penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
11.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten	Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025	Sebagai acuan mengenai target dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025
12.	Rencana Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025	Sebagai acuan mengenai target dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025
13.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten	Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana	Sebagai penyesuaian terhadap beberapa perubahan atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024	
14.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Sebagai dasar hukum dalam penjabaran uraian laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
15.	Rencana Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024	Sebagai penyesuaian terhadap beberapa perubahan atas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024
16.	Penanggulangan Bencana	Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2024 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Sebagai dasar pedoman dalam Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
17.	Pajak Kendaraan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya	Sebagai dasar hukum dalam memberikan keringanan bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya
18.	Kebijakan Akuntansi	Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun	Sebagai penyesuaian terhadap penyesuaian atas ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten	
19.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum dalam penjabaran lengkap dari rencana pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
20.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum atas penyesuaian perubahan penjabaran lengkap dari rencana pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
21.	Pemungutan Opsen Pajak	Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bentuk Sinergi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan
22.	Pengelolaan Kinerja	Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Sebagai dasar hukum terhadap penyesuaian ketentuan Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Provinsi Banten

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
23.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum atas penyesuaian perubahan penjabaran lengkap dari rencana pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
24.	Standar Operasional Prosedur	Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Sebagai dasar hukum atas penyesuaian perubahan pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
25.	Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	Sebagai dasar hukum atas penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Pegawai di Provinsi Banten
26.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum atas penyesuaian perubahan penjabaran lengkap dari rencana pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
27.	Pajak Kendaraan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea	Sebagai dasar hukum atas pemberian keringanan kepada Wajib Pajak berupa Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
28.	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai	Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara	Sebagai dasar hukum dan acuan dalam penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Provinsi Banten
29.	Pengelolaan Arsip	Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan, Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	Sebagai dasar hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan, pelindungan dan penyelamatan arsip
30.	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Provinsi Banten	Sebagai dasar hukum dalam penyesuaian beberapa nilai dan besaran untuk pelaksanaan pemberian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Provinsi Banten
31.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Sebagai dasar hukum dan uraian penjabaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta rencana pendapatan dan belanja daerah tahun 2024
32.	Standar Harga Satuan Barang/Jasa	Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum atas penyesuaian dan perubahan beberapa nilai dan besaran dalam Satuan Harga Barang/Jasa Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: Biro Hukum, Setda Provinsi Banten

## 3.5. TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI BANTEN ATAS LKPJ GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan melalui pembahasan Pansus LKPJ TA 2023 telah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah/Biro sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Utama LKPJ Gubernur Banten TA 2023. Hasil pembahasan Pansus LKPJ diperoleh sejumlah rekomendasi yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Banten.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Rekomendasi DPRD Provinsi Banten tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya. Adapun tindaklanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor: 100.3.3.7.-06 tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023, akan diuraikan pada tabel 3.14.

Tabel 3.14 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Banten

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	Rekomendasi Umum				
1	Rekomendasi DPRD pada LPKJ baik yang berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya ditindaklanjuti secara serius, menjadi bagian dalam penyusunan perencanaan dan anggaran serta kebijakan strategis kepala daerah sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu dalam penyampaian ataupun pembahasan KUA PPAS atau R-APBD diharapkan ada penjelasan terkait tindak lanjut rekomendasi DPRD	2.	Penyusunan Perencanaan pembangunan yang tertuang pada dokumen perencanaan tahunan telah memperhatikan seluruh Rekomendasi DPRD TA.2023.  Melaksanakan rapat kinerja dengan OPD untuk memastikan seluruh rekomendasi LKPJ telah ditindaklanjuti	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran	Bappeda

No	Dalraman da si	Tindole I onice	Tujuan/Masalah	Perangkat
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	yang Diselesaikan	Daerah
2	Pemerintah Provinsi Banten menelaah semua Peraturan Daerah yang belum mempunyai aturan teknis pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Gubernur atau lainnya supaya bisa disusun untuk berdayaguna baik sebagai payung hukum dalam tatalaksana maupun sebagai payung hukum dalam perencanaan dan penyusunan program pembangunan. Dan juga menelaah Peraturan Daerah yang perlu direvisi ataupun dicabut dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan-perundangan diatasnya	<ol> <li>Biro Hukum telah melaksanakan Pembahasan dengan mengundang seluruh OPD yang memilik Perda untuk di tindaklanjuti dengan Perkada.</li> <li>Biro Hukum telah memfasilitasi OPD untuk mengusulkan Raperda dan Rapergub dalam kegiatan Propemperda dan Propemperkada yang seharusnya di manfaatkan OPD untuk mengusulkan Rapergub delegasi Perda.</li> <li>Biro Hukum telah Memfasilitasi Pencabutan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>Telah ada beberapa aturan menangani tindak lanjut tersebut:         <ul> <li>Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah.</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Bidang Perikanan, Perternakan, Pertanian, Keungan Daerah, Kepegawaian dan Pertanahan.</li> </ul> </li> </ol>	Penertiban Peraturan Daerah	Biro Hukum
3	Meningkatkan keseriusan OPD dalam mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Banten	Provinsi Banten terus berkomitmen untuk fokus pada tujuan dan sasaran pembangunan serta menjadikan DPRD sebagai mitra strategis untuk sama-sama membangun Banten sesuai visi misi Provinsi Banten yang telah ditetapkan. Rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD Provinsi Banten menjadi fokus pimpinan dan akan selalu berkomitmen serta serius dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat.	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	SELURUH PD

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
4	Kendaraan dinas dan kendaraan operasional pemerintah daerah yang sudah tidak digunakan agar dihibahkan kepada Balai Latihan Kerja atau SMK sehingga dapat digunakan untuk praktek siswa	Terhadap Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat dapat dimutasikan ke Perangkat Daerah (Balai Latihan Kerja) atau SMK dengan merubah Kode Barang	Penguatan tata kelola aset BMD	BPKAD
5	Penguatan kepada lembaga Baznas dalam upaya peningkatan pengumpulan zakat untuk kesejateraan umat supaya dilakukan dan ditindaklanjuti secara serius termasuk perbedaan pandangan terkait Pemberian hibah pemprov 2024 kepada Baznas oleh OPD terkait supaya segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan anggaran dalam APBD 2024.	Penguatan koordinasi lebih intensif dengan BAZNAS Provinsi Banten	Penguatan Lembaga Baznas	BIRO PEMKESRA
6	Optimalisasi Peran forum CSR dalam rangka pemberdayaan CSR di Provinsi Banten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga berperan dalam membantu ekosistem perekonomian di Provinsi Banten.	Dilakukan peran CSR melalui forum SDG'S dimana kolaborasi antara Bappeda, Perangkat Daerah dan Perusahaan dalam pemberian bantuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.	pembiayaan pembangunan melalui perusahaan	Bappeda
	Rekomendasi Terhadap Pendapatan	Daerah		
1	Upaya peningakatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan serta pemanfaat aset daerah	Upaya Peningatan PAD melalui: 1. Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 2. Peningkatan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 3. Peningkatan Pendapatan Pajak Air Permukaan. 4. Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 5. Pajak Alat Berat (PAB). 6. Peningakatan Pendapatan Pajak Rokok. 7. Retribusi Daerah	Optimalisasi peningkatan PAD	Bapenda
2	Guna mengoptimalisasi pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah agar diprioritaskan pembangunan kantor UPT/Samsat yang sampai saat ini masih menyewa	Dikarenakan terbatasnya anggaran maka SAMSAT yang masih menyewa tetap dilanjutkan sampai tahun 2025  UPTD PPD Kelapa Dua sampai dengan saat ini belum memiliki gedung kantor sehingga masih menyewa. Dalam Rencana Strategis Bapenda Tahun 2025-2030 yang sedang disusun, hal tersebut menjadi perhatian dan	Efisiensi anggaran dengan sewa gedung	BAPENDA

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		akan dimasukkan sebagai salah satu prioritas capaian. Namun perlu analisis dan kajian lebih lanjut mengenai opsi-opsi pembangunan tersebut yaitu lahan yang akan digunakan dalam pembangunan.		
	Rekomendai Terhadap Urusan Peme	rintahan		
A	Upaya dalam pembenahan dan peningkatan mutu pendidikan			
1	Program beasiswa kepada pelajar/mahasiswa/ pemuda/ masyarakat / Pegawai baik ASN non ASN yang kurang mampu dan/atau berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih lanjut. Program tersebut bisa dilakukan melalui Kerjasama/afirmasi antara Pemprov Banten dengan Perguruan Tinggi. Dan juga program dimaksud termasuk untuk bisa membantu Generasi muda Provinsi Banten ikut dalam berbagai kompetisi/even/kegiatan di tingkat nasional atau internasional yang bisa membawa harum Nama Provinsi Banten	Telah dilakukan pembahasan mengenai Peraturan Gubernur tentang tata cara pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa/pemuda/masyarakat.	Peningkatan daya saing Sumber Daya manusia.	Dinas Pendidikan Biro Pemerintahan
2	Penyesuaian ataupun penyelarasan Pergub No.52 Tahun 2022 tentang Pendidikan Gratis dan Pergub No. 30 Tahun 2017 tentang Komite Sekolah	Pengkordinasian Lebih lanjut mengenai Peraturan Gubernur tentang pendidikan gratis	Peningkatan daya saing Sumber Daya manusia.	Dinas Pendidikan
3	Upaya penataan /pemeliharaan lingkungan sekolah-sekolah (SMA/SMK/SKH) negeri agar tertata rapi, hijau, bersih tidak kumuh. Pemeliharaan dan penataan aset sekolah, Ruangan/bangunan disesuaikan dengan peruntukannya, audit dan revitalisasi ruangan/bangunan yang tidak termanfaatkan, termasuk penataan dan percepatan penghapusan aset yang sudah tidak bisa terpakai	Penguatan penataan sekolah melalui:  a. Adanya program sekolah bersih dan sehat  b. Telah adanya Laporan penataanusahaan aset  c. Telah dilakukan revitalisasi SMAN dan SMKN serta penataan infrastruktur sekolah diantaranya pembangunan toilet sekolah, pemasangan jalan paving blok, pembangunan laboratorium, pembangunan pagar dan akses sekolah d. Rekon Aset bersama BPKAD	Penataan sekolah tertib dan sehat	Pendidikan
4	Sekolah untuk membuat dan mensosialisasikan secara terbuka pemakaian dana BOS, Fakta Integritas sekolah tentang sekolah bebas korupsi, bebas pungutan liar, bebas kekerasan / bullying, bebas tawuran, bebas diskriminasi, dan bebas Napza	Penguatan Integritas sekolah melalui: 1. Diklat Penyuluh Anti Korupsi bagi Guru PKN 2. Telah diimplementasikan Pergub nomor 40 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi.	Peningkatan Iklim Keamanan dan Iklim Kebhinekaa dan terciptanya Satuan Pendidikan yang bebas Korupsi (kawasan WBBK)	Dinas Pendidikan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang	Perangkat
110	Recomendasi	<u> </u>	Diselesaikan	Daerah
5	Penataan kembali/revitalisasi SMAN	<ul> <li>3. Pada satuan pendidikan di Provinsi Banten berdasarkan SK Gubernur telah dijadikan sampling penerapan Zona Integritas.</li> <li>4. Telah disusun SK Tim Pencegahan PPKSP (pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan)</li> <li>Pembuatan kajian terkait</li> </ul>	Peningkatan	Dinas
	CMBBS Pandeglang sesuai dgn semangat awal pembentukannya	penataan kembali regulasi SMAN CMBBS	kualitas sekolah dan tata kelola penerimaan Murid.	Pendidikan
6	Percepatan perencanaan, persiapan perangkat aturan, SOP dan sarana prasarana yang dibutuhkan terkait sekolah terbuka atau sekolah PJJ atau sekolah digital dalam rangka peningkatan APS di Provinsi Banten, temasuk dilakukan Pilot progam tersebut	Telah mengusulkan penyelenggaraan sekolah terbuka/ Metaverse/ sekolah PJJ, namun usulan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum sesuai dengan Permendikbud yang ada.	Akses sekolah yang lebih terjangkau .	Dinas Pendidikan
7	Peningkatan pemberdayaan sekolah swasta dan Pondok Pesantren untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan di Provinsi Banten	Penyediaan BOSDA pada sekolah swasta juga menjadi prioritas dalam anggaran APBD Provinsi Banten sehingga semua Usia sekolah 15-19 tahun dapat mengenyam pendidikan.	Peningkatan APS pendidikan menengah	Dinas Pendidikan
8	Memperhatikan Ketercukupan kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikaan dan juga kesejahteraan mereka lebih khusus kepada tenaga honorer serta mempercepat pengangkatan tenaga P3K yang telah passing grade. Termasuk meninjau ulang kesenjangan tunjangan kinerja struktural dengan fungsional dilingkungan sekolah	Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Banten telah mengangkat Guru Honor menjadi PPPK sebanyak 490 orang dari total usulan sebanyak 500 orang. Provinsi Banten masih menyisakan Guru P1 yang sudah mengikuti seleksi kopetensi pengadaan PPPK Guru tahun 2021 sebanyak 1824 orang tetapi belum di angkat menjadi PPPK dengan rincian Guru Negeri sebanyak 679 orang dan Guru Swasta sebanyak 1145 orang. Sesuai arahan pemerintah pusat di bulan Desember 2024 bahwa pemerintah daerah harus selesai mengenai pengangkatan pegawai yang berststus non asn/honorer. Maka Pemda Banten sudah membuat usulan pada tahun 2024 khusus pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 4695 orang/guru dan teknis sekolah 2178 orang yang terdata pada data BKN tahun 2022,	Kependidikan di	Dinas Pendidikan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		namun sampai dengan saat ini pemda Banten masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat mengenai pengangkatan PPPK baik guru maupun teknis.		
9	Membentuk Tim Koordiansi Pendidikan Vokasi, program link and match kebutuhan dunia industri, dunia kerja dan dunia usaha dengan SMK dan BLK yang ada di Provinsi Banten	<ul> <li>Mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan tim koordinasi.</li> <li>Meningkatkan penyelarasan kurikulum sekolah dengan yang ada di dudika;</li> <li>Mengadakan kegiatan tracer study untuk mengetahui keterserapan lulusan SMK di dunia kerja</li> </ul>	Penurunan Pengangguran	Dinas Pendidikan
10	Penambahan USB dan sarana prasarana Sekolah Khusus Negeri (SKHN) terkhusus di Kota Tangerang dan Kab. Serang yang SKHN belum mempunyai gedung sekolah	Telah dialokasikan rencana anggaran untuk pembangunan USB pada lokasi dimaksud (Kota Tangerang dan Kabupaten Serang Kecamatan Padarincang) pada tahun Anggaran 2025	Tersedianya SKH pada setiap Kab./Kota	Dinas Pendidikan
11	Penambahan USB SMA dan SMKN di wilayah yang daya tampung sekolah negeri masih sangat rendah, terkhusus di wilayah Cipondoh, Ciledug, Larangan Kota Tangerang	Telah dibangun USB untuk wilayah Cipondoh (SMKN 10 Tangerang)	Meningkatnya APS Pendidikan Menengah di wilayah tersebut	Dinas Pendidikan
12	Peningkatan pembangunan literasi masyarakat termasuk gemar baca masyarakat	1. Melakukan sosialisasi budaya membaca melalui gerakan Banten membaca dan pembudayaan gemar membaca melalui kominitas.  2. Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi Banten sudah dikembangkan.  3. Perluasan layanan perpustakaan melalui layanan perpustakaan offline (ditempat), layanan perpustakaan digital melalui iBanten dan Batu Pusaka  4. Perluasan Program TPBIS melalui kelas pemustaka serta peningkatan kualitas perpustakaan melalui standarisasi perpustakaan. serta melakukan kampanye peningkatan minat baca melalui gerakan literasi ke masyarakat dan sekolah	Peningkatan Literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan
В	Upaya dalam pembenahan dan peningkatan mutu kesehatan			
13	Upaya dalam pembenahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dimasyarakat	Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui akreditasi/reakreditasi fasilitas	Mutu dan kualitas layanan fasyankes meningkat	Dinas Kesehatan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	perlu terus ditingkatkan	layanan kesehatan serta pelatihan tenaga kesehatan		
13	Disegerakan pengoperasian RSUD Labuan dan RSUD Cilonggrang	Untuk operasional RSUD.Labuan dan Cilograng Dinas kesehatan sudah menyiapkan anggaran pada 2024 baik teknis maupun admnisitrasi. Sudah ada Plt.pejabat pada masing-masing UPTD namun terkendala pada pemenuhan SDM Kesehatan sehingga operasional pelayanan di undur hingga tahun 2025	Pemerataan layanan kesehatan di wilayah Banten bagian selatan	Dinas Kesehatan
14	Peningkatan sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat obatan di RSUD Banten, RSUD Malingping, RSUD Labuan, RSUD Cilonggrang	Pada tahun 2024 telah dianggarakan peningkatan sarana dan prasarana serta alat kesehatan serta pengadaan obat pada masing-masing UPTD dan RSUD	terpenuhinya standar mutu dan layanan kesehatan di RSUD	Dinas Kesehatan
15	Menyesuaikan kertercukupan tenaga medis di RSUD Provinsi sesuai dengan kebutuhan sehinggan pelayanan kesehatan semakin baik dan cepat	Pemenuhan tenaga kesehatan di UPTD dan RSUD direkrut melalui mekanisme belanja pegawai BLUD. Namum pada tahun 2024 tidak dilakukan perekrutan karena komposisi tenaga kesehatan telah terpenuhi melalui mekanisme pengangkatan PPPK	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan di RSUD	Dinas Kesehatan
16	Program UHC dengan kerjasama BPJS bisa mencakup 8 Kab/Kota dan terus berkelanjutan	UHC Provinsi Banten sampai dengan Desember 2024 sudah mencapai 99,63% atau 12.455.722 Orang Penduduk Provinsi Banten telah tercover oleh PBI/JKN dan telah sesuai dengan target Nasional yaitu 98% dengan tingkat keaktifan 77,13. Namun jika dilihar per Kab/Kota, masih terdapat 2 Kabupaten yang belum memenuhi target Nasional yaitu Kab Pandeglang dan Kab Serang	warga Banten memiliki akses	Dinas Kesehatan
17	Peningkatan Program Kesehatan bidang Promotif dan Preventif yang meningkatkan peran serta masyarakat	Promotif dan preventif bidang kesehatan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Promotif dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan melaui media (cetak, radio, elektronik). Preventif dilakukan melalui advokasi serta menjalin kemitraan dengan Ormas	pencegahan dan mengurangi resiko terhadap suatu penyakit	Dinas Kesehatan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
18	Penguatan dan pemberdayaan Posyandu (termasuk melalui forum kader Posyandu) baik dari disisi pembinaan secara kelembangaan maupun dari sisi pemberian bantuan sarana prasarana dan juga perhatian/pemberdayaan kepada kader-kader Posyandu (seperti pemberian baju seragam, sertifikat penghargaan atau dalam bentuk perhatian lainnya) sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagai garda terdepan dalam kesehatan Balita, Kesehatan Lansia terlebih khusus dalam penanganan stunting	Pelaksanaan Jambore kader Posyandu, dan pemberian penghargaan kepada kader posyandu berprestasi	Penurunan prevalensi stunting	DINKES, DP3AKB
19	Upaya penurunan prevalensi stunting mengadopsi prinsip tuntas dimana program pencegahan stunting terus dilakukan dari hulu ke hilir pada sasaran dan penanganan balita stunting yang dari dari data E-PPGM Desember 2023 sebanyak 21.171 Balita dari 466.637 jumlah Balita yang diukur/ditimbang secara tuntas ditangani "by name by address" dan juga keluarga beresiko stunting yang tercatat masih sebanyak 412.335 keluarga. Balita stunting tersebut harus tuntas mendapatkan penanganan secara kesehatan dan keluarga beresiko stunting tuntas mendapatkan penangangan, pendampingan serta pemberdayaan baik secara kesehatan, pendidikan, ekonomi, pangan, sandang, papan maupun secara sanitasi dan air yang bersih layak dan aman	DP3AKKB menindaklanjuti:  1. Melakukan inovasi melalui Banten ASIK (Atasi Stunting dengan Kolaborasi) yang dilakukan secara multisektor dengan melibatkan semua unsur.  2. Ketersediaan anggaran untuk stunting. DINKES menindak lanjuti:  - Pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal untuk balita gizi kurang, dan ibu hamil KEK  - Pemberian imunisasi dasar lengkap.  - Pemberian jaminan kesehatan kepada penderita stunting dan gizi buruk  - Pemberian Formula 100 untuk balita gizi buruk  DPMD menindaklanjuti:  - Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Anak yang terindikasi Stunting dengan Gizi Kurang dan/atau gizi kurang, jumlah sasaran sebanyak 3.516 Anak, terdiri dari 1750 Anak diintervensi melalui Pemberian Makanan Basah sebanyak 2 kali dalam 1 Hari selama 30 Hari Kalender, dan 1766	Penurunan prevalensi stunting	DINKES ,DP3AKKB, DPMD

			Tujuan/Masalah	Daway alsa4
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	ACROILE RULES	Anak diintervensi melalui Pemberian Makanan Kering, berupa Susu F100 dan Telur, yang bertujuan untuk Peningkatan Gizi bagi anak gizi kurang dan gizi buruk, diberikan selama 1 bulan. Gerakan Memasyarakatan Pemanfaatan Pangan Lokal sebagai Upaya Penanggulangan Stunting, berupa Pemberian Bibit Ikan sebanyak 5000 benih dan	Diselesaikan	Daerah
		Benih Sayuran sebanyak 288 Kg, untuk 8		
C	Upaya penanganan kemiskinan dan	Kab/Kota		
	pengangguran:			
20	Upaya penanganan kemiskinan dilakukan dengan pembukaan lapangan pekerjaan, lapangan usaha sebanyak mungkin melalui berbagai program Pemerintah Provinsi Banten disemua sektor yang melibatkan masyarakat banten termasuk dalam proyek-proyek pembangunan infrastuktur.	Upaya penanganan kemiskinan dilakukan Di Disnakertrans Banten antaralain:  1. Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetsi dan berbasis masyarakat.  2. melakukan kegiatan pendataan BPJS Ketenagakerjaan	Daya saing tenaga kerja di pasar kerja	Dinas Tenaga Kerja
21	Memperbanya program peningkatan kompetensi, pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat disemua bidang baik berbasis masyarakat maupun berbasis BLK selain dari bagian upaya pemerataan pembangunan ke tingkat masyarakat	Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan peserta masyarakat Banten usia produktif di tahun 2025 ini dibuka 5 gelombang dengan total peserta 1040 orang;  2. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi (PBUK) di laksanakan langsung ke lingkungan masyarakat Banten kejuruan yang dibuka Make Up dasar, Barista dan Packaging	Daya saing tenaga kerja di pasar kerja	Kerja
22	Memperkuatperanan BLKI Provinsi Banten termasuk revitalisasi sarana prasarana dan peningkatan daya tampung	<ol> <li>Pelaksanaan Revitalisasi Gedung Workshop UPTD LATKER.</li> <li>Pelaksanaan belanja modal alat peraga pelatihan dan alat bantu pelatihan.</li> <li>Pelaksanaan belanja modal alat atau barang untuk kebutuhan setiap kamar di asrama UPTD LATKER</li> </ol>	Daya saing tenaga kerja di pasar kerja	Dinas Tenaga Kerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
23	Meningkatkan peran serta Industri di Provinsi Banten untuk memperioritaskan penerimaan tenaga kerja ber KTP Banten serta pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing	1. Disperindag menindak lanjuti melalui kerjasama dengan Perusahaan Industri untuk melaksanakan Pelatihan/ Magang/ Vokasi bagi Siswa/Mahasiswa di Provinsi Banten (yang sudah tentu bestatus Penduduk Provinsi Banten) sedangkan pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing merupakan wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.  2. Disnakertrans menindak lanjuti melalui Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja dengan: a. Rekomendasi agar memprioritaskan penerimaan tenaga kerja ber KTP Banten bertentangan dengan undang-undang dasar 45 ayat 27 pasal 2 mengatur tentang hak Warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. b. Pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing sudah dilakukan dengan adanya TIMPORA yang melibatkan berbagai instansi meliputi Kepolisia, TNI, Kejaksaan, Disdukcapil, Disnaker, Bea Cukai , Dishub dan Pemerintah Daerah	Daya saing tenaga kerja di pasar kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Disperindag
24	Memperkuat peran serta BUMD yang dimiliki dalam <i>core</i> bisnisnya, Koperasi dan UMKM dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat BUMD dengan: Penyertaan modal dari Pemprov Banten, Bank Banten bergabung dengan Bank Jatim dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk memenuhi modal inti minimum Rp3 triliun pada akhir tahun 2024. Bank Banten melakukan berbagai pembenahan tata kelola dan kinerja untuk menjaga kondisi yang sehat, likuid, dan solvent. Menurunkan rasio kredit bermasalah (non	Penguatan BUMD	Biro ekonomi dan Adoministrasi Pembangunan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		performing).	Diselesaikan	
25	Membentuk Tim Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) mafia/percaloan tenaga kerja	Disnakertrans Provinsi Banten akan membentuk Tim satuan tugas (satgas) mafia/percaloan tenaga kerja	Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta mempermudah para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan	Bappeda dan Dinas tenaga kerja
26	Pemanfaatan sumberdaya alam laut dan termasuk aset Provinsi Banten yang memberi nilai tambah dalam memperbanyak lapangan .pekerjaan untuk menurunkan angka kemiskinan dan Provinsi Banten	Pembuatan <i>Hatchery</i> di     UPTD PPPB Unit     Cigorondong diharapkan     dapat meningkatkan produksi     benih.      Revitalisasi Kios di     Pelabuhan Perikanan Cituis     agar meningkatkan kapasitas     bagi pedagang serta     peningkatan K5 di     Lingkungan Pelabuhan     Perikanan Cituis	Penurunan kemiskinan	DKP
27	Memberikan prioritas dalam menarik investasi yang padat karya ke Provinsi Banten dan juga mempermudah perijinan berinvestasi yang orientasi padat karya serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang berkualitas	DPMPTSP Provinsi Banten telah melakukan Program kegiatan untuk menarik investasi berupa Promosi investasi, kemudahan untuk berusaha berupa pelayanan perizinan secara elektronik, dan penyusunan kebijakan penanaman modal dengan melakukan:  1. Penyediaan materi investasi yang siap ditawarkan sebagai bahan untuk promosi penanaman modal.  2. Percepatan Pelaksanaan Berusaha.  3. Pelayanan perizinan kepada pelaku usaha/masyarakat.  4. Penyusunan Peraturan Gubernur Banten turunan Perda Penanaman Modal dalam pengaturan ketentuan pemberian kemudahan dan persyaratannya dalam menarik investasi padat karya ke Povinsi Banten sesuai regulasi di atasnya	Peningkatan investasi daerah	DPMPTSP
28	Revitalisasi Panti Sosial (yang di Cipocok dan di Rangkas Bitung) baik, gedung, sarana prasarana maupun layanan yang diberikan kepada masyarakat penyandang masalah kesejateraaan sosial yang menjadi	Revitalisasi untuk sarana dan prasarana telah bertahap dilakukan agar dapat memberikan pelayanan dengan baik. Selain itu telah dilakukan koordinasi dengan BAPPEDA Provinsi	Penanganan kemiskinan	Dinas Sosial,

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
29	tanggungjawab Pemerintah Provinsi Banten. Termasuk penyediaan lahan pemakaman untuk warga yang terlantar  Program Rumah Tidak Layak Huni	Banten terkait kebutuhan akan Panti Sosial di Provinsi Banten sebagai amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dengan memasukan rencana pembangunan Panti Sosial/Rehabilitasi Sosial Terpadu di Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025-2026 dengan terlebih dahulu disusun perencanaan kajian Detail Engineering Design (DED) yang akan di rencanakan pada anggaran perubahan tahun 2025.	Peningkatan	Dinas Sosial,
	(RTLH) yang dilaksanakan oleh Perkim agar terkoordinasi dengan Dinas Sosial	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim Data yang digunakan sebagai data penerima bantuan sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial RI, namun seiring dikeluarkankanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka DTKS dipadupadankan dengan data P3KE sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrsim. Data Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Penanggulangan Kemiskinan ekstrim yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim menggunakan data P3KE.	rumah layak huni	Dinas Perkim
D	Upaya penguatan ketahanan pangan dan pertanian	1 JML.		
30	Pembatasan konversi lahan pertanian, peningkatan produktifitas lahan dan pemanfataan lahan yang menganggur, irigasi, mitigasi perubahan iklim terhadap produktifias pertanian	Melaksanakan Kegiatan Irigasi Perpompaan	Peningkatan IP dari 0 - 3	Dinas Pertanian

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
31	Menumbuhkembangkan semangat menanam dimasyarakat termasuk pemanfaatan pekarangan, urban farming di perkotaan	Dilaksanakan Bimtek dan Widya Wisata	Meningkatkan Minat Generasi Muda untuk berminat menjadi petani Milenial setelah mendapatkan pengetahuan dan Potensi Penghasilan dai sektor Pertanian	Dinas Pertanian
32	Program peningkatan diversifikasi pangan dan termasuk pangan lokal	Upaya penguatan Ketahanan Pangan ang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan melalui Program Program peningkatan diversifikasi pangan dan termasuk pangan lokal dalam Upaya meningkatkan dan optimalisasi:  1. Ketersediaan Pangan dengan pemantauan stok pangan, penyelenggaraan CPPD komoditas beras, penyaluran CPP sebanyak 1.736. ton dan pembentukan satgas Pemantauan Stok Pangan.  2. Keterjangkauan Pangan dengan melaksanakan gerakan Pangan Murah sebanyak 123 titik lokasi di wilayah di 8 Kab./Kota.  3. Pemanfaatan Pangan dengan peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat B2SA dan penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.  4. Pengembangan Data Informasi Pangan dengan Wilayah, Panel Harga Pangan dan Database Cadangan Pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Dinas Ketahanan pangan
33	Peningkatan program masyarakat pemberdayaan petani, peternak, nelayan	<ol> <li>Pembinaan dan pemberian sarpras alat penangkapan ikan kepada 60 KUB;</li> <li>Pembinaan dan pemberian sarpas kepada 100 pokhlasar;</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir</li> </ol>	Peningkatan Kesejahteraan nelayan	DKP
34	Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktifas pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	<ol> <li>Dilaksanakan Bimtek dan Widya Wisata</li> <li>Teknologi Demplot Penanaman Padi Varietas Biosalin.</li> </ol>	Peningkatan produktifas pertanian, perkebunan, kehutanan dan	Dinas Pertanian,

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		<ol> <li>Meningkatkan Minat Generasi Muda untuk berminat menjadi petani Milenial setelah mendapatkan pengetahuan dan Potensi Penghasilan dai sektor Pertanian</li> <li>Untuk meningktkan IP/Intensifikasi sehingga lahan yang terkena air payau bisa ditanami padi tahun berikutnya</li> </ol>	kelautan	
E	Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik			
35	Mempercepat digitalisasi governance dan government	Pengembangan aplikasi dan layanan digital, Penyediaan infrastruktur IT serta pemenuhan regulasi dan kebijakan yang mendukung digitalisasi government	Optimalisasi Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik.	Dinas Kominfo
36	Mempercepat penataan birokrasi yang rightsizing dan right man in the right place	Penempatan pegawai dalam suatu tempat tertentu, dilihat dari kualifikasi dan kompetensi serta dirapatkan bersama oleh tim penilai kinerja, sehingga penempatan seseorang pada suatu tempat merupakan hasil dari pembahasan TPK. Dalam waktu dekat, Pemprov Banten sedang bersiapmenerapkan manajemen talenta untuk pengelolaan pegawai dalam menentukan posisi yang tepat sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki.	Mempercepat penataan birokrasi yang rightsizing dan right man in the right place	BKD
37	Mempercepat koordinasi dan penyelesaian kepegawaian non ASN utk menadi ASN/PPPK dan solusi yang baik tepat bagi mereka non ASN yang belum memenuhi syarat	Bahwa saat ini seluruh pegawai non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Banten baik yang terdata dalam data base atau pangkalan data BKN maupun yang belum termasuk dalam data tersebut sebagaimana amanat pemerintah pusat diarahkan untuk melamar dalam seleksi PPPK ditahun 2024. Provinsi Banten telah mengusulkan dan ditetapkan formasi sebanyak 11.737 pegawai, bagi pelamar yang memenuhi syarat dan lulus pada seleksi tersebut mereka dapat diangkat sebagai PPPK penuh waktu, sedangkan untuk pelamar yang mengikuti seleksi dan belum mendapatkan formasi dapat di	Mempercepat koordinasi dan penyelesaian kepegawaian non ASN	BKD

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		pertimbangkan untuk di angkat sebagai PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, seluruh pegawai non asn di lingkungan pemerintah provinsi banten dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan paruh waktu sekaligus melarang pada seluruh perangkat daerah untuk mengangkan pegawai non asn baru pada program kepegawaian daerah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawian asn sub		
38	Meningkatkan produktifitas, kompetensi pengawai sesuai dengan kebutuhan	kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK.  Memberikan pelatihan berupa program diklat, bimbingan teknis, pendidikan formal dan informal sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan produktifitas, kompetensi pengawai sesuai	BKD
39	Menegakan displin pegawai dengan birokrasi yang proaktif dan cepat.	Penegakan disiplin pegawai saat ini dilaksanakan secara continue melalui beberapa pendekatan baik bersifat klasikal/sosialisasi/ coaching clinic juga memanfaatkan media elektronik sebagai sarana untuk mempercepat informasi terkait aturan - aturan disiplin pegawai. disamping itu penegakan disiplin juga dilaksanakan melalui pembinaan bagi pegawai yang diduga/melakukan tindakan yang berkaitan dengan disiplin pegawai. Seluruh pegawai dilingkungan pemerintah Provinsi Banten PNS dan PPPK dapat menegakkan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	dengan kebutuhan  Menegakan displin pegawai dengan birokrasi yang proaktif dan cepat.	BKD
40	Upaya Percepatan Pemanfaatan Aset atau barang milik daerah diantaranya: Gedung Islamic Center di Kawasan Banten, Banten Internastiona Stadium (BIS), Gedung Asrama BLKI Serpong yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukan masterplan awal, termasuk situ dan aset lainnya. Bisa melibatkan BUMD Provinsi Banten dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset atau barang milik daerah tersebut	BPKAD selaku Penatausahaan Pengelola Barang saat ini sedang mengidentifikasi aset-aset yang Idle dan Penggunaan aset yang belum optimal. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi bahan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pelaku bisnis termasuk BUMD untuk turut serta dalam pemanfaatan aset atau barang milik daerah tersebut.	Peningkatan tata kelola aset	BPKAD

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
41	Lahan milik Pemerintah Provinsi Banten yang menjadi destinasi wisata seperti situ, pengelolaan dan pemeliharaannya agar diserahkan kepada Dinas PUPR dengan pengelolaaan destinasi wisata melalui pemberdayaan POKDARWIS. Bisa juga melibatkan BUMD Provinsi Banten dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset atau barang milik daerah tersebut	Sesuai dengan program kerja Pemerintah Provinsi Banten pengelolaan Situ dititikberatkan pada kawasan inti berupa konservasi air dan kawasan penunjang untuk peningkatan pendapatan asli daerah berupa Destinasi Wisata melalui pemberdayaan POKDARWIS dan UMKM.	Peningkatan Koservasi air dan Optimalisasi PAD	BPKAD
42	Percepatan sertifikasi aset-aset (tanah), situ dan aset lainnya termasuk penyelesaian beberapa permasalahan terkait dengan kepemilikan aset sekolah	Sedang melengkapi dokumen pengukuran, permohonan pengukuran, proses penerbitaan PBT, permohonan hal pakai. Tanah yeng bermasalah sedang proses rapat penyelesaian di kejati	Peningkatan tata kelola aset	BPKAD
43	Revitalisasi dan pembenahan BUMD Provinsi Banten baik dari sisi Core Bisnis maupun dari penambahan permodalan, termasuk percepatan proses rencana pemberian hibah saham Bank Banten ke Kabupaten/kota supaya Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten mempunyai nilai kepemilikan terhadap Bank Banten	Sebagai langkah strategis terdapat 2 daerah yang telah berkomitmen menggunakan Bank Banten sebagai rekening RKUD yaitu Kabupaten Lebak dan Kota serang		BPKAD
F	Upaya Peningkatan pada Urusan pemerintahan			

<b>3</b> . T	n		m. 1	Tujuan/Masalah	Perangkat
No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	yang Diselesaikan	Daerah
44	Pelebaran Jalan palima - pandeglang, peleberan jalan maja - mengger - cimanuk, serta pelebaran jalan mengger mandalawangi - caringin menuju akses wisata Pantai Carita, Jalan Hasyim Ashari Kota Tangerang, termasuk peninggian jembatan Puribeta 1 dan Puribeta 2 di Jalan Ciledug Raya kota Tangerang	2.	Pelebaran Jalan Palima - Pandeglang - Jalan Palima - Pandeglang terbagi menjadi 2 kewenangan status yaitu Jalan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Jalan Kewenangan Pemerintah Provinsi Jalan Kewenangan Pemerintah Pusat (Simpang Palima-Simpang Tiga Cigadung), yang belum dilakukan pelebaran adalah Simpang Palima-Simpang Tiga Cigadung Jalan Kewenangan Pemerintah Provinsi (Simpang Tiga Cigadung - Pusat Kota Pandeglang), kondisinya belum dilakukan pelebaran Pada Tahun 2024 telah dilakukan kajian Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan (RIJJ) yang didalamnya terdapat rencana pelebaran Jalan Nasional pada Ruas Simpang Palima - Baros (Banten International Stadium Peleberan Jalan Maja - Mengger - Cimanuk: - Ruas jalan yang Maja - Mengger - Cimanuk terdiri dari 2 Kewenangan Pemerintah Pusat: Ruas Jalan Saketi - Bts. Kota Pandeglang dan Kewenangan Pemerintah Pusat: Ruas Jalan Saketi - Bts. Kota Pandeglang dan Kewenangan Pemerintah Provinsi : Ruas Jalan Labuan sepanjang 3,6 km Pada Tahun 2024 untuk ruas Kewenangan Pemerintah Provinsi belum terdapat anggaran pelebaran jalan, tapi telah dilaksanakan pemeliharaan rutin oleh UPTD PJJ Pandeglang Akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pada segmen Maja - Bts. Kota Pandeglang dengan pelebaran ROW eksisting. Pelebaran Jalan Mengger Mandalawangi - Caringin	Penguatan Infrastruktur jalan daerah	PUPR

			Tujuan/Masalah	Perangkat
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	yang Diselesaikan	Daerah
		menuju akses wisata Pantai Carita: - Tahun 2024 telah dilakukan pelebaran jalan sepanjang 1,34 km Pada Tahun 2025 telah dianggarkan pelebaran jalan sepanjang 2,5 km dengan sumber dana DAK yang akan dilaksanakan setelah adanya juknis pelaksanaan DAK tersebut. 4. Jalan Hasyim Ashari Kota Tangerang, termasuk peninggian jembatan Puribeta 1 dan Puribeta 2 di Jalan Ciledug Raya kota Tangerang - Penggantian dan peninggian jembatan Puribeta 1 (Pelawad 1) sudah dilakukan pada tahun 2024 sepanjang 14 m Penggantian dan peninggian jembatan Puribeta 2 (Pelawad 2) akan dilakukan pada tahun 2025.		
45	Pembangunan Jalan Bangangah agar didukung rambu lalu lintas dan penerangan jalan.	Telah direncanakan pemasangan rambu jalan pada anggaran 2025	Penyediaan infrastruktur jalan	Dinas Perhubungan
46	Pemerintah Provinsi Banten agar membangun TPA/TPST Regional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota sehingga membantu penanganan masalah pengelolaan sampah yang ada di kabupaten/kota se Provinsi Banten	<ol> <li>Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan perencanaan pembangunan TPST Regional di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak yang terdiri dari penyusunan Masterplan, DED, Persetujuan Teknis Lokasi PTSP, dan Penyusunan studi kelembagaan TPST.</li> <li>Telah terbangunnya Ruas Jalan Akses Persampahan sepanjang 0,4 Km untuk mendukung Rencana Pembangunan TPST Regional Cileles.</li> <li>Dalam proses pelaksanaannya, perencanaan TPST Regional</li> </ol>	Penanganan Persampahan Kab/Kota	PUPR

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Cileles mendapat penolakan dari masyarakat sehingga perlu adanya pertimbangan teknis dalam penentuan lokasi lainnya.		
47	Melakukan review perizinan penambangan pasir laut disepanjang pesisir pantai	Pelaksanaan rapat pembahasan teknis PKKPRL dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan ruang laut sesuai aturan yang	DKP
48	Meningkatkan upaya pembangunan Olahraga di Provinsi Banten baik dalam peningkatan prestasi di tingkat Nasional mapun dalam kegemaran olahraga dimasyarakat sehingga Indeks Pembangunan Olahraga semakin meningkat	Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Nasional, Dispora Provinsi Banten memberikan Dana Hibah ke KONI yang diantaranya diperuntukan bagi pelatihan atlet secara terus menerus sebelum bertanding pada pelaksanaan PON di Aceh-Sumut. Diberikan penghargaan kepada atlet, pelatih dan pengurus cabor berprestasi. Prestasi Provinsi Banten pada PON Aceh-Sumut Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu peringkat ke-11 yang sebelumnya pada tahun 2021 di Papua peringkat ke-14 Dispora Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegemaran olahraga di masyarakat, dilakukan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui senam bersama yang dilakukan di Kab/ Kota se Provinsi Banten, juga dengan penyelenggaraan event olahraga daerah, diantaranya POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Lomba Lari Marathon 10 km, FORPROV (Festival Olahraga Masyarakat Provinsi), PEPARPEDA (Pekan Paralympic Pelajar Daerah), POTRADDA dan perlombaan olahraga dalam rangka memperingati HUT Banten, seperti Lomba Bola Volley, Bola Basket dan Jalan Santai	Peningkatan Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Banten	DISPORA

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
49	Meningkatkan program pembumian nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di semua lini sektor termasuk program dalam pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten	Menjalankan penguatan ideologi pancasila melalui kegiatan- kegiatan Koordinasi dan monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI	KESBANGPOL
50	Meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dini, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik bencana alam, bencana non-alam maupun bencana sosial, termasuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan dan ekosistem lingkungan hidup	Upaya ini melalui pendidikan dan pelatihan, kampanye kesadaran dalam penanggulangan bencana, simulasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini, pembentukan tim reaksi cepat, pengembangan rencana kontijensi, pengadaan peralatan penanggulangan bencana, pengembangan sistem komunikasi yang epektif, pengembangan sistem partisipasi dan pengembangan kerjasama.	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak bencana	BPBD

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, diolah

#### **RARIV**

# CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

#### 4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

## 4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah tingkat Atasnya

Selain melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya meliputi sebagian urusan pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN mencakup salah satunya pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah otonom berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Selain itu, alokasi dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

### 4.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 137.188.965.000,- dengan realisasi Rp. 133.258.724.419,00 atau setara 97,14 persen yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga.

Kementerian/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan di Provinsi Banten, diuraikan sebagaimana Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Kementerian dan Realisasi Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2024

No	Nama k/l	Anggovan	Anggaran Realisasi keuangar	ngan	
110	Nama K/I	Anggaran		(%)	
1	Kementerian desa, pembangunan	229.574.000	218.915.600	95,36	
	daerah tertinggal dan transmigrasi				
2	Kementerian Kelautan dan	2.134.975.000	1.523.091.497	71,34	
	Perikanan				
3	Kementerian Pariwisata dan	1.330.000.000	1.264.178.001	95,05	
	Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata				
	Dan Ekonomi Kreatif				
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan	16.969.084.000	16.915.737.319	99,69	
	Perumahan Rakyat				
5	Kementerian Perdagangan	299.671.000	219.275.000	73,17	
6	Kementerian Perindustrian	1.138.305.000	1.114.751.000	97,93	
7	Kementerian Pertanian	115.087.356.000	112.002.776.002	97,32	
	JUMLAH	137.188.965.000	133.258.724.419	97,14	

### 4.1.3. Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Banten dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yang terdiri dari 17 program, capaian Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Perangkat Daerah Provinsi Banten diuraikan sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perangkat Daerah Penerima Dana Tugas Pembantuan Tahun 2024

No	Downwalket de each	Angganan	Realisasi keuangan	
NO	Perangkat daerah	Anggaran	Rp	(%)
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten	2.134.975.000	1.523.091.497	71,34
2	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	1.330.000.000	1.264.178.001	95,05
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten	16.969.084.000	16.915.737.319	99,69
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Banten	1.437.976.000	1.334.026.000	92,77
5	Dinas Pertanian Provinsi Banten	115.087.356.000	112.002.776.002	97,32
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten	229.574.000	218.915.600	95,36
	Grand Total	137.188.965.000	133.258.724.419	97,14

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Wilayah Provinsi Banten diuraikan sebagaimana Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2024

	Uraian		TT *	<b>A</b>	Realisasi	
			Uraian	Anggaran	Rp	(%)
P	ER		KELAUTAN DAN ANAN PROVINSI EN	2.134.975.000	1.523.091.497	71,34
			ram Dukungan	1.108.900.000	731.647.549	65,98
	N	Ian	ajemen			
		In Pe	ukungan Manajemen ternal Lingkup Ditjen engawasan Sumber Daya elautan dan Perikanan	67.952.000	66.758.000	98,24
		•	Layanan Manajemen Kinerja Internal	67.952.000	66.758.000	98,24
		In	ukungan Manajemen ternal Lingkup Ditjen engelolaan Ruang Laut	93.474.000	89.686.949	95,95
		-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	17.474.000	17.377.000	99,44
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	76.000.000	72.309.949	95,14
		In Pe	ukungan Manajemen ternal Lingkup Ditjen enguatan Daya Saing oduk Kelautan dan	235.597.000	158.792.000	67,40
	Perikanan					
		-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	145.427.000	106.574.000	73,28
		-	Layanan Manajemen Kinerja Internal	90.170.000	52.218.000	57,91

Uraian	Anggaran	Realisasi	
Uraian	Anggaran	Rp	(%)
Dukungan Manajemen	222.347.000	146.032.800	65,68
Internal Lingkup Ditjen			
Perikanan Budidaya			
- Layanan Dukungan	54.139.000	37.886.500	69,98
Manajemen Internal			
- Layanan Manajemen	168.208.000	108.146.300	64,29
Kinerja Internal			
Dukungan Manajemen	205.530.000	106.845.000	51,99
Internal Lingkup Ditjen			
Perikanan Tangkap			
- Layanan Dukungan	80.200.000	52.188.000	65,07
Manajemen Internal			
- Layanan Manajemen	125.330.000	54.657.000	43,61
Kinerja Internal	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 12 722 000	
Pengelolaan Perencanaan,	284.000.000	163.532.800	57,58
Keuangan dan BMN	201000		
- Layanan Manajemen	284.000.000	163.532.800	57,58
Kinerja Internal	00 000 000	<b>20 200 043</b>	00.20
rogram Kualitas	80.000.000	78.708.813	98,39
ingkungan Hidup	00.000.000	<b>5</b> 0 <b>5</b> 00 01 <b>2</b>	00.00
Perlindungan Dan	80.000.000	78.708.813	98,39
Pemanfaatan Kawasan			
Konservasi Dan			
Keanekaragaman Hayati			
Laut			
- Kebijakan Bidang	50.000.000	49.661.000	99,32
Kemaritiman dan			
Kelautan	20,000,000	20.047.012	06.00
- Pelatihan Bidang	30.000.000	29.047.813	96,83
Pertanian dan Perikanan	140 742 000	114 000 000	7672
rogram Nilai Tambah dan Paya Saing Industri	149.742.000	114.898.000	76,73
Pemasaran Hasil Kelautan	60.000.000	38.762.500	61.60
dan Perikanan	00.000.000	38.762.300	64,60
- Promosi	60.000.000	38.762.500	61.60
			64,60
Pengolahan dan Bina Mutu	89.742.000	76.135.500	84,84
Produk Kelautan dan			
Perikanan	22.7.4.222		
- Fasilitasi dan Pembinaan	89.742.000	76.135.500	84,84
Industri	<b>T</b> 0 < <b>222</b> 000	<b>505.005.105</b>	
Program Pengelolaan	796.333.000	597.837.135	75,07
Perikanan dan Kelautan			
Pemantauan, Operasi	81.100.000	81.052.000	99,94
Armada dan Infrastruktur			
Pengawasan			
- Fasilitasi dan Pembinaan	81.100.000	81.052.000	99,94
Kelompok Masyarakat			
Pengelolaan Kapal	35.390.000	15.490.000	43,77
Perikanan, Alat			
Penangkapan Ikan dan			
Pengawakan Kapal			
Perikanan			

Uraian	Anggaran	Realisasi	
Oraian	Anggaran	Rp	(%)
- Fasilitasi dan Pembinaan	35.390.000	15.490.000	43,7
Pemerintah Daerah			
Pengelolaan Kawasan dan	138.083.000	103.887.200	75,24
Kesehatan Ikan	120,002,000	102.005.200	
- Penyidikan dan Pengujian Penyakit	138.083.000	103.887.200	75,2
Pengelolaan Pelabuhan	56.520.000	18.735.000	33,13
Perikanan	30.320.000	10.755.000	33,1.
- Fasilitasi dan Pembinaan	56.520.000	18.735.000	33,1
Pemerintah Daerah			,
Pengelolaan Perizinan dan	140.618.000	56.560.000	40,2
Kenelayanan			
- Fasilitasi dan Pembinaan	29.618.000	10.960.000	37,0
Pemerintah Daerah			
- Pemantauan masyarakat	111.000.000	45.600.000	41,0
dan kelompok masyarakat			
Pengelolaan Sumber Daya	34.622.000	14.120.000	40,7
Ikan			
- Pemantauan produk	13.062.000	4.840.000	37,0
- Tata Kelola Kelembagaan	21.560.000	9.280.000	43,0
Publik Bidang Ekonomi			
Perencanaan Ruang Laut	310.000.000	307.992.935	99,3
- Kebijakan Bidang Ruang	310.000.000	307.992.935	99,3
dan Pertanahan			
NAS PARIWISATA	1.330.000.000	1.264.178.001	95,0
OVINSI BANTEN			
D 1	120,000,000	110 404 414	04.0
Program Dukungan	130.000.000	110.404.414	84,9
Manajemen			
Manajemen Pengembangan	<b>130.000.000</b> 130.000.000	<b>110.404.414</b> 110.404.414	
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	130.000.000	110.404.414	84,9
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan			84,9
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	130.000.000	110.404.414	84,9
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Program Kepariwisataan	130.000.000	110.404.414	84,9
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	130.000.000 130.000.000 <b>1.200.000.000</b>	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587	84,9 84,9 <b>96,1</b>
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan	130.000.000	110.404.414	84,9 84,9 <b>96,1</b>
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan	130.000.000 130.000.000 <b>1.200.000.000</b>	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587	84,9 84,9 <b>96,1</b>
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	130.000.000 130.000.000 <b>1.200.000.000</b> 500.000.000	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000	84,9 84,9 <b>96,1</b> 97,1
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event	130.000.000 130.000.000 1.200.000.000 500.000.000	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000	84,9 84,9 <b>96,1</b> 97,1 97,1
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event Pengembangan Sumber	130.000.000 130.000.000 <b>1.200.000.000</b> 500.000.000	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000	84,9 84,9 <b>96,1</b> 97,1
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi	130.000.000 130.000.000 1.200.000.000 500.000.000	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000	84,9 84,9 <b>96,1</b> 97,1
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	130.000.000 130.000.000 1.200.000.000 500.000.000 200.000.000	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000 485.513.000 189.087.400	84,9 <b>96,1</b> 97,1 97,1 94,5
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Pelatihan Bidang	130.000.000 130.000.000 1.200.000.000 500.000.000	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000	84,9 84,9 <b>96,1</b> 97,1 97,1 94,5
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	130.000.000 130.000.000 1.200.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000 485.513.000 189.087.400	94,5 94,9 96,1 97,1 97,1 94,5
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber	130.000.000 130.000.000 1.200.000.000 500.000.000 200.000.000	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000 485.513.000 189.087.400	84,9 <b>96,1</b> 97,1 97,1 94,5
Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	130.000.000  130.000.000  1.200.000.000  500.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.0	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000 485.513.000 189.087.400 189.087.400 191.295.000	94,5 95,6
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber	130.000.000 130.000.000 1.200.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000 485.513.000 189.087.400	94,5 95,6
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata - Pelatihan Bidang Pariwisata dan	130.000.000  130.000.000  1.200.000.000  500.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.0	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000 485.513.000 189.087.400 189.087.400 191.295.000	94,5 95,6
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif  Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event  Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif  Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata - Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	130.000.000  130.000.000  1.200.000.000  500.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.0	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000 485.513.000 189.087.400 189.087.400 191.295.000	94,5 95,6
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Konferensi dan Event Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata - Pelatihan Bidang Pariwisata dan	130.000.000 130.000.000 1.200.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.0	110.404.414 110.404.414 1.153.773.587 485.513.000 485.513.000 189.087.400 189.087.400 191.295.000 191.295.000	94,5 95,6 95,9

Tiusian	A	Realisasi	
Uraian	Anggaran	Rp	(%)
DINAS PEKERJAAN UMUM	16.969.084.000	16.915.737.319	99,69
DAN PENATAAN RUANG			
PROVINSI BANTEN	1 (2( 740 000	1 506 353 010	07.51
Program Dukungan Manajemen	1.626.749.000	1.586.252.819	97,51
Dukungan Manajemen	827.257.000	815.932.819	98,63
Ditjen Bina Marga	027.237.000	013.732.017	70,03
- Layanan Dukungan	827.257.000	815.932.819	98,63
Manajemen Internal			,
Dukungan Manajemen	799.492.000	770.320.000	96,35
Ditjen Sumber Daya Air			
- Layanan Dukungan	799.492.000	770.320.000	96,35
Manajemen Internal	10.028.910.000	10.028.695.500	100,00
Program Infrastruktur Konektivitas	10.020.910.000	10.020.095.500	100,00
Pelaksanaan Preservasi dan	10.028,910.000	10.028.695.500	100,00
Peningkatan Kapasitas	10.020.710.000	10.020.090.000	100,00
Jalan Nasional			
- OM Prasarana Bidang	9.972.210.000	9.972.207.500	100,00
Konektivitas Darat (Jalan)			
- OM Prasarana Bidang	56.700.000	56.488.000	99,63
Konektivitas Darat (Jembatan)			
Program Ketahanan	5.313.425.000	5.300.789.000	99,76
Sumber Daya Air	0.010.120.000		<i>&gt;&gt;</i> ,
Operasi dan Pemeliharaan	5.313.425.000	5.300.789.000	99,76
Sarana Prasarana SDA			
serta Penanggulangan			
Darurat Akibat Bencana			
- OM Prasarana Jaringan	5.313.425.000	5.300.789.000	99,76
Sumber Daya Air  DINAS PERINDUSTRIAN	1.437.976.000	1.334.026.000	92,77
DAN PERDAGANGAN	1.437.370.000	1.334.020.000	94,11
BANTEN			
Program Dukungan	69.840.000	69.840.000	100,00
Manajemen			,
Pengelolaan Manajemen	69.840.000	69.840.000	100,00
Kesekretariatan Bidang			
Industri Kecil Menengah			
dan Aneka	CO 040 000	CO 040 000	100.00
- Layanan Dukungan Manajemen Internal	69.840.000	69.840.000	100,00
Program Nilai Tambah dan	1.068.465.000	1.044.911.000	97,80
Daya Saing Industri	2,000,100,000	2.0110211000	21,00
Penumbuhan dan	1.068.465.000	1.044.911.000	97,80
Pengembangan Industri			
Kecil, Menengah, dan			
Aneka			
- Fasilitasi dan Pembinaan Industri	784.179.000	761.890.000	97,16
- Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	284.286.000	283.021.000	99,56

Uraian	Angganan	Realisasi	
Oraian	Anggaran	Rp	(%)
Program Perdagangan	299.671.000	219.275.000	73,17
Dalam Negeri			
Pengembangan	299.671.000	219.275.000	73,17
Perdagangan Dalam Negeri			
Daerah			
- Fasilitasi dan Pembinaan	299.671.000	219.275.000	73,17
Pemerintah Daerah  DINAS PERTANIAN	115.087.356.000	112.002.776.002	97,32
PROVINSI BANTEN	115.067.550.000	112.002.770.002	91,34
Program Dukungan	1.875.100.000	1.314.707.400	70,11
Manajemen	1.075.100.000	1.514.707.400	70,11
Dukungan Manajemen dan	182.120.000	182.043.400	99,96
Dukungan Teknis Lainnya	102.120.000	102.013.100	,,,,
Ditjen Perkebunan			
- Layanan Manajemen	182.120.000	182.043.400	99,96
Kinerja Internal			,
Dukungan Manajemen dan	244.914.000	91.350.000	37,30
Dukungan Teknis Lainnya			
Ditjen Peternakan			
- Layanan Dukungan	53.576.000	30.040.000	56,07
Manajemen Internal	404.000	-1.210.000	
- Layanan Manajemen	191.338.000	61.310.000	32,04
Kinerja Internal	598.896.000	596.946.000	00.67
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	398.890.000	390.940.000	99,67
Ditjen Prasarana dan			
Sarana Pertanian			
- Layanan Manajemen	598.896.000	596.946.000	99,67
Kinerja Internal	270.070.000	270.710.000	,,,,,
Dukungan Manajemen dan	729.170.000	324.646.000	44,52
Teknis Lainnya pada			ŕ
Ditjen Tanaman Pangan			
- Layanan Manajemen	729.170.000	324.646.000	44,52
Kinerja Internal			
Peningkatan Usaha	120.000.000	119.722.000	99,77
Dukungan Manajemen dan			
Teknis Lainnya pada			
Ditjen Hortikultura	100 000 000	110 500 000	00.55
- Layanan Manajemen	120.000.000	119.722.000	99,77
Kinerja Internal	110 000 220 000	107 940 194 000	07.04
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi	110.099.330.000	107.849.184.000	97,96
Pangan Berkualitas			
Fasilitasi Pembiayaan	25.000.000	25.000.000	100,00
Pertanian	25.000.000	25.000.000	100,00
- Prasarana Bidang	25.000.000	25.000.000	100,00
Pertanian, Kehutanan dan		22.000.000	-00,00
Lingkungan Hidup			
Pengelolaan Air Irigasi	102.232.730.000	100.045.630.000	97,86
Untuk Pertanian			
- Fasilitasi dan Pembinaan	2.503.440.000	2.449.040.000	97,83
Kelompok Masyarakat			

	Urajan	Anggaran	Realisasi	
	Uraian	Anggaran	Rp	(%)
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan	99.729.290.000	97.596.590.000	97,86
	Lingkungan Hidup			
	ngelolaan Produksi	2.415.000.000	2.370.975.000	98,18
	naman Serealia			
	naman Pangan			
	Koordinasi	90.000.000	90.000.000	100,00
	Sarana Pengembangan Kawasan	2.325.000.000	2.280.975.000	98,11
	ngelolaan Sistem	900.000.000	900.000.000	100,00
	nyediaan dan			
	ngawasan Alat Mesin			
	rtanian	000 000 000	000 000 000	100.00
	Koordinasi	900.000.000	900.000.000	100,00
	ngelolaan Sistem	4.040.000.000	4.020.979.000	99,53
	rbenihan Tanaman			
	ngan Koordinasi	80.000.000	79.354.000	99,19
	Sarana Pengembangan Kawasan	3.960.000.000	3.941.625.000	99,54
	ngendalian dan	450.000.000	450.000.000	100,00
	nanggulangan Penyakit			
	wan	450,000,000	450,000,000	100.00
	Pelayanan Publik Lainnya	450.000.000	450.000.000	100,00
	nyediaaan Benih dan	36.600.000	36.600.000	100,00
	oit Serta Peningkatan			
	oduksi Ternak Pelayanan Publik Lainnya	21.400.000	21.400.000	100,00
-				
-	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan	15.200.000	15.200.000	100,00
	Lingkungan Hidup			
	ram Nilai Tambah dan	3.112.926.000	2.838.884.602	91,20
_	Saing Industri			,
	sca Panen, Pengolahan	305.605.000	283.833.202	92,88
(Hi	ilirisasi) dan Pemasaran			
Ha	sil Perkebunan			
-	Koordinasi	123.000.000	122.999.202	100,00
-	Sarana Bidang Pertanian,	182.605.000	160.834.000	88,08
	Kehutanan dan			
	Lingkungan Hidup	100.000.000	100.000.000	100.00
	sca Panen, Pengolahan n Pemasaran Hasil	100.000.000	100.000.000	100,00
	naman Pangan			
	Koordinasi	100.000.000	100.000.000	100,00
	ngembangan Pengolahan	470.000.000	288.583.012	61,40
	n Pemasaran Hasil	470.000.000	200.303.012	01,40
	rnak			
	Fasilitasi dan Pembinaan	270.000.000	90.000.000	33,33
	Lembaga	2,0.000.000	70.000.000	23,33
-	Prasarana Bidang	100.000.000	99.483.012	99,48
	Pertanian, Kehutanan dan			
1 1	Lingkungan Hidup			

***	<b>A</b>	Realisasi	
Uraian	Anggaran	Rp	(%)
- Sarana Bidang Pertanian,	100.000.000	99.100.000	99,10
Kehutanan dan			
Lingkungan Hidup			
Pengolahan dan Pemasaran	1.400.000.000	1.391.210.000	99,37
Hasil Hortikultura			
- Prasarana Bidang	960.000.000	953.450.000	99,32
Pertanian, Kehutanan dan			
Lingkungan Hidup			
- Sarana Bidang Pertanian,	440.000.000	437.760.000	99,49
Kehutanan dan			
Lingkungan Hidup			
Penguatan Perbenihan	325.071.000	265.493.638	81,67
Tanaman Perkebunan			
- Kebijakan Bidang	195.050.000	184.763.798	94,73
Pertanian dan Perikanan			
- Sarana Pengembangan	130.021.000	80.729.840	62,09
Kawasan			
Penguatan Perlindungan	512.250.000	509.764.750	99,51
Perkebunan			
- Sarana Pengembangan	152.650.000	152.100.000	99,64
Kawasan			
- Sertifikasi Produk	359.600.000	357.664.750	99,46
DINAS TENAGA KERJA	229.574.000	218.915.600	95,36
DAN TRANSMIGRASI			
PROVINSI BANTEN			
Program Daerah	184.532.000	184.532.000	100,00
Tertinggal, Kawasan			
Perbatasan, Perdesaan, dan			
Transmigrasi			
Pembangunan dan	184.532.000	184.532.000	100,00
Pengembangan Kawasan			
Transmigrasi			
- Fasilitasi dan Pembinaan	184.532.000	184.532.000	100,00
Keluarga			,
Program Dukungan	45.042.000	34.383.600	76,34
Manajemen			,
Dukungan Manajemen	45.042.000	34.383.600	76,34
Eselon I Direktorat		2 1.2 32.000	,
Jenderal Pembangunan dan			
Pengembangan Kawasan			
Transmigrasi			
- Layanan Dukungan	45.042.000	34.383.600	76,34
Manajemen Internal	73.042.000	JT.J0J.000	10,54
Grand Total	137.188.965.000	133.258.724.419	97,14
Sumber: Perangkat Daerah Provinsi Bante			71,17

Sumber: Perangkat Daerah Provinsi Banten Pelaksana Tugas Pembantuan, Tahun 2024

# 4.1.4. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah tingkat Bawahnya

Pemerintah Daerah Provinsi Banten tidak memberikan penugasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2024.

# 4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Pada tahun anggaran 2024 dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan terdapat beberapa permasalahan yang dapat kami sampaikan, diantaranya :

- 1. Beberapa pejabat perbendaharaan pada satker TP masih belum tersertifikasi pada awal tahun anggaran
- 2. Banyak satuan kerja yang masih memiliki blokir anggaran, total mencapai Rp1,54M (1,08% dari total pagu keseluruhan) Contoh: Blokir terbesar pada satker Dinas Pertanian Provinsi Banten (299380) sebesar Rp404 juta.
- 3. Penunjukkan pejabat perbendaharaan tidak menentu dan belum dapat dipastikan pada awal tahun anggaran dimulai atau pada saat DIPA berlaku efektif, sehingga apabila ternyata terdapat penggantian pejabat perbendaharaan maka diperlukan perubahan SK pejabat perbendaharaan, SK penetapan user SAKTI, termasuk proses aktivasi OTP SAKTI atau sampai dengan proses pencairan anggaran siap dilakukan.
- 4. Pola pengelolaan keuangan pada dinas/SKPD cenderung menggunakan cara bayar UP dan minim pembayaran langsung ke pihak ketiga, sehingga apabila ternyata pada satker terkendala regulasi sertifikasi BNT/bendahara maka proses pencairan anggaran menjadi terhambat, padahal sejatinya bisa dilakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
- 5. Aturan serta kebijakan pengelolaan keuangan yang sangat dinamis tidak diimbangi dengan kemauan belajar dan upgrade pengetahuan oleh para pengelola keuangan pada dinas/SKPD karena mindset yang dimiliki adalah bahwa penugasan bersifat sementara dan dapat diganti sewaktu-waktu oleh pimpinan daerah salah satunya akibat polarisasi politik di daerah.
- 6. Perlu ada jaringan koordinasi atau PIC koordinator untuk satker-satker dinas/SKPD pada suatu daerah sebagai forum/pintu komunikasi antara BUN di Daerah dengan dinas/SKPD sehingga apabila terjadi permasalahan dapat segera diberikan solusi dan dinas/SKPD dapat melakukan follow up rekomendasi/solusi yang diberikan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan diiringi dengan konsistensi dan kepatuhan pada Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan.

- 2. Satker dapat mengajukan surat permohonan percepatan sertifikasi, khususnya pada satker yang alpa pejabat perbendaharaan sertifikasi ke KPPN Mitra satker agar dapat dimasukkan dalam penjadwalan sertifikasi terdekat.
- 3. Internal satker perlu melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan/belanja secara rutin untuk kemudian dilakukan evaluasi guna perbaikan probis maupun implementasi kebijakan di lapangan.
- 4. Satker perlu menunjuk koordinator (PIC) yang memenuhi klasifikasi : 1).Mudah dihubungi; 2).Telah paham terkait pengelolaan APBN; 3). Fast response; 4).Dapat memfasilitasi perbaikan kinerja anggaran satker.

### BABV

#### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.

Secara umum pelaksanaan urusan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan secara optimal, yang tentunya hal ini merupakan pencapaian bersama sebagai bentuk sinergi antara Pj.Gubernur dan DPRD selaku unsur Penyelenggara Pemerintahan. Indikasi atas pencapaian hal tersebut, antara lain didukung dengan kondisi sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kinerja indikator makro daerah, yang antara lain dilihat dari realisasi IPM Provinsi Banten Tahun 2024 sebesar 76,35 poin yang melebihi dari target yang ditetapkan dan naik 0,58 poin dari realisasi tahun sebelumnya. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,68 persen melebihi dari target yang ditetapkan dan menunjukan kinerja baik dengan turun 0,84 poin dibanding realisasi sebelumnya, Persentase Penduduk Miskin realisasi sebesar 5,70 persen lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya dengan kinerja baik dengan turun 0,47 poin dan mendekati target yang ditetapkan, realisasi gini ratio sebesar 0,359 dimana ini menunjukan kinerja lebih baik dengan turun 0,009 poin dibanding realisasi sebelumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi tumbuh sebesar 4,79 terjadi pelambatan dibanding tahun sebelumnya.
- 2. Pada APBD Provinsi Banten TA 2024, bahwa dari target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2024 sebesar Rp12.408.206.036.154,00 terealisasi sebesar Rp12.404.001.670.529,00 atau sebesar 99,97 persen. Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2024 dialokasikan sebesar Rp12.356.583.363.283,00 dengan realisasi sebesar Rp11.913.012.429.184,00 atau Sebesar 96,41 persen. Selanjutnya Pembiayaan Daerah yang pada Perubahan APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp86.875.060.165,00 terealisasi sebesar Rp86.875.060.165,00 atau 100 persen.
- 3. Capaian Indikator Kinerja Daerah, secara umum telah menunjukkan capaian yang baik dimana terdapat 33 indikator Kinerja Tujuan dan sasaran Daerah dengan capaian 28 indikator memiliki kriteria kinerja sangat tinggi (≥91-100%), 3 indikator tinggi (76-90%), 1 indikator memiliki kritera kinerja sedang (≥66-75%), 1 indikator memiliki kriteria kinerja rendah (≥51-65%) dengan kendala dan permasalahan yang sangat dinamis dan beragam. Untuk kinerja pada Perangkat Daerah berhasil merealisasikan

kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2024. Terhadap kondisi kinerja yang belum tercapai tentunya bagian yang harus diupayakan untuk dapat dipenuhi pada tahun 2025 dan/atau periode selanjutnya.

- 4. Berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembantuan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp137.188.965.000,00 dengan realisasi Rp133.258.724.419,00 atau setara 97,14 persen yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata Dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Banten.
- 5. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Banten baik dari Pemerintah Pusat/Kementerian/Badan/Lembaga Lainnya sebagai indikasi terobosan atau inovasi daerah yang senantiasa diupayakan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.
- 6. Pemerintah Provinsi Banten akan terus melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang berdampak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya dalam hal:
  - a. Penangangan Kemiskinan Ekstrim melalui strategi penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan;
  - Penangangan Stunting secara komprehensif dengan melibatkan peran stake holder pembangunan sehingga angka prevelensi stunting diharapkan turun sesuai target nasional;
  - Pengendalian Inflasi melalui 6 langkah konkrit meliputi: Operasi pasar murah, Sidak
     Pasar dan Distributor, Kerjasama antar daerah demi kelancaran pasokan, gerakan menanam, dan merealisasikan belanja tak terduga;
  - d. Penguatan Program Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia sesuai dengan siklus percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - e. Penguatan Investasi melalui kemudahan perizinan dan dukungan penyiapan kawasan industri baru dan pengembangan kawasan industri yang ada sehingga pembangunan ekonomi bisa lebih merata dan cepat;
  - f. Digitalisasi pemerintahan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

Selanjutnya Apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD atas kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan untuk

pencapaian target pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024, untuk dibahas dan diberikan rekomendasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan "Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi".